



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL Tahun 2019



KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Sulawesi Tenggara

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Ririn Kadariyah

Ketua Tim:

Plt. Kepala Bidang PPA II

Eka Yuniwasita

Anggota:

Lukas Lazarus Lerrick

Afif Efendi

Rachmadi Wahyu Priyo S.

Syarif Hidayat

Iman Agus Gumelar

Novianti Panggalo

Emar Sukardi

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
Arif Wibawa

Ketua Tim

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Eko Wahyu Budi Utomo

Anggota

Rachmadi Wahyu Priyo Saptata
Afif Efendi
Zamrud Siswa Utama
Novianti Panggalo
Tasliun
Agustina Diprianti



KATA PENGANTAR

*Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara*

Kondisi perekonomian Sulawesi Tenggara menunjukkan kinerja positif. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, turunnya angka kemiskinan, perbaikan rasio gini, dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Kondisi ini membuktikan fundamental perekonomian Sulawesi Tenggara dapat bertahan di tengah meningkatnya tensi perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global. Sumber daya alam khususnya nikel menjadi penggerak utama perekonomian melalui peningkatan pertumbuhan sektor pertambangan, industri pengolahan dan bermuara pada peningkatan ekspor.

Capaian tersebut tidak terlepas dari bauran kebijakan yang diambil pemerintah maupun otoritas moneter. Kebijakan fiskal yang ekspansif terbukti menjadi pilihan tepat bersamaan dengan desain alokasi belanja yang fokus pada bidang infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia menjadi tema sentral APBN tahun 2019. Sumber daya manusia yang unggul merupakan faktor utama penggerak perekonomian di masa mendatang. Dalam banyak *literature*, *knowledge spillover* dan *technology spillover* terbukti menjadi faktor utama kemajuan perekonomian suatu negara melalui kemampuannya untuk menemukan cara baru berproduksi dan meningkatkan kapasitas produksi. Diharapkan dengan bertambahnya infrastruktur dan

meningkatnya kualitas SDM, perekonomian dapat tumbuh lebih tinggi dan lebih inklusif.

Sebagai sebuah bentuk analisis ekonomi dan pembangunan dari sudut pandang kebijakan fiskal, Kajian Fiskal Regional (KFR) memotret gambaran perekonomian dan peran kebijakan fiskal suatu wilayah secara utuh sekaligus sebagai *economic outlook* perekonomian ke depan. Untuk mempertajam analisis, Kajian Fiskal Regional tahun 2019 menambah pembahasan terkait perkembangan dan analisis belanja wajib (*mandatory spending*) dan belanja infrastruktur pusat dan daerah dengan harapan dapat diperoleh informasi mengenai dampak *mandatory spending* sesuai dengan tujuan pemerintah. Selain itu terdapat bab khusus yang secara tematik membahas isu-isu penting permasalahan fiskal, ekonomi dan sosial. Adapun tema yang dipilih tahun 2019 adalah “Sinergi dan Konvergensi Program Penanganan Stunting di Daerah”. Permasalahan stunting menjadi *concern* pemerintah mengingat dampak negatifnya pada perkembangan bangsa dan ekonomi ke depan. Hasil Kajian Fiskal Regional Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan, perbaikan dan penyusunan perencanaan pembangunan pada periode berikutnya bagi pemerintah daerah se- Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebagai sebuah hasil kajian atas indikator ekonomi dan fiskal, penyusunan KFR melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karenanya, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kerjasama dan sinergi yang dibangun selama ini. Besar harapan kami kerjasama dan sinergi terus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan, bersama kami mengawal APBN untuk kemajuan Indonesia.

Mengawal APBN, Indonesia Maju.

Kendari, 26 Februari 2020,
Kepala Kantor Wilayah,

Arif Wibawa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ekonomi Sultra pada tahun 2019 mampu tumbuh positif diatas pertumbuhan nasional (5,02%) sebesar 6,51% di tengah ketidakpastian global. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika dan Tiongkok tidak berpengaruh terhadap perekonomian Sultra. Masih besarnya kapasitas ekonomi Sultra yang dapat dioptimalkan menyebabkan kinerja ekonomi Sultra tetap solid. Hal tersebut juga didukung oleh laju pertumbuhan penduduk Sultra yang mengalami peningkatan disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal lain yang mendukung perekonomian Sultra adalah kondisi geografis Sultra yang terdiri dari 74,25 % perairan sehingga sangat potensial untuk perikanan serta wisata bahari. Secara geologis, Sultra terbentuk dari tumbukan dua lempeng besar yang membentuk lapisan tiga batuan utama yang salah satunya adalah *ocenic terrane*. *Ocenic terrane* sendiri terdiri kompleks ofiolit yang menyebabkan Sultra memiliki cadangan nikel cukup besar. Dalam menyusun dokumen perencanaan, pemerintah menetapkan beberapa sasaran pembangunan di Sultra yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat atau SDM, produktivitas daya saing sektor-sektor perekonomian dan investasi, konektivitas infrastruktur, pelayanan dasar, kapasitas pemerintahan, pengelolaan sumber daya air dan ketersediaan pangan. Sasaran-sasaran tersebut ditetapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan baik dalam bidang perekonomian, sosial dan geografis.

Sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan mampu mendorong pertumbuhan pada seluruh komponen. Pada komponen pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh ekspor barang dan jasa sementara dari komponen lapangan usaha pertumbuhan tertinggi terjadi pada industri pengolahan. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi otoritas moneter telah menetapkan kebijakan moneter untuk menghadapi ketidakpastian global dan tensi perang. Salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga dari posisi 6% menjadi 5%. Selain itu, pemerintah juga mengendalikan inflasi pada tingkat 3,22% selama tahun 2019. Nilai tukar Rupiah (IDR) terhadap Dolar Amerika (USD) bertahan di sekitar Rp14.000,- per dollar Amerika. Sebaliknya nilai tukar Rupiah terhadap China Yuan (CYN) mengalami penguatan sepanjang 2019. Bila di bulan Januari CYN diperdagangkan sebesar Rp2.806,- per China Yuan, di perdagangan akhir tahun 2019 kurs Rupiah terhadap China Yuan ditutup di posisi Rp1.997,56 untuk rata-rata perdagangan Desember. Kinerja positif ekonomi Sultra telah memberikan dukungan pada perbaikan kesejahteraan masyarakat Sultra melalui perbaikan IPM menjadi 71,20 tahun, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 11,04% serta gini ratio yang mengalami

perbaikan menjadi 0,393. Kendati demikian ekonomi Sultra belum sepenuhnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, dimana tingkat pengangguran mengalami peningkatan menjadi 3,59%. Bonus demografi yang diharapkan dari pertumbuhan penduduk, dibayangi oleh prevalensi *stunting* di Sultra. Pemerintah melalui kebijakan konvergensi penanganan *stunting* berhasil menekan angka prevalensi *stunting* menjadi 27,67%, melampaui target RPJMD Prov. Sulawesi Tenggara.

Capaian tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah melalui kebijakan fiskal baik APBN maupun APBD di Sultra. Pendapatan APBN tahun 2019 telah melampaui target, baik yang bersumber dari perpajakan maupun PNBPN. Demikian pula dari sisi belanja, telah terealisasi sebesar 96,50%. Sebaliknya dari sisi APBD, realisasi pendapatan belum berhasil mencapai target kendati realisasi pendapatan tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2018. Sementara itu, belanja APBD telah terealisasi sebesar 88,14%. Belanja dari sisi APBN diperuntukkan untuk beberapa program dan capaian output strategis seperti pemerataan kualitas layanan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, percepatan pengurangan kemiskinan dan penyelenggaraan jalan, jembatan, sumber daya air, bendungan, irigasi, penyebarangan dan transportasi udara.

Meskipun pertumbuhan kinerja ekonomi Sultra cukup baik namun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi usaha untuk meningkatkan produksi sektor-sektor unggulan, melalui kebijakan investasi, kemudahan perizinan dan kebijakan agraria. Pemerintah daerah perlu mendorong investor untuk memanfaatkan fasilitas *tax holiday* dan *tax allowance* yang telah ditetapkan pemerintah. Kecenderungan pergeseran basis ekonomi perlu disikapi dengan peningkatan kapasitas SDM sehingga mobilitas pekerja antar sektor tidak terhambat dan menyebabkan ketimpangan. Tingginya ketimpangan di Sultra perlu diatasi dengan kebijakan untuk memberikan kemudahan akses masyarakat kepada fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi serta akses permodalan/pembiayaan. Pemerintah daerah perlu menggali/mengintensifkan sumber-sumber pendapatan dengan tetap menjaga iklim usaha. Disisi belanja, peran pemerintah masih tetap diperlukan namun dengan design anggaran yang tidak menimbulkan *crowding out effect*. Pemerintah, baik daerah dan pusat serta lembaga penyalur perlu mendorong penetrasi penyaluran KUR terutama kepada sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi. Kebijakan penanganan *stunting* perlu lebih dioptimalkan khususnya terkait strategi pencapaian output. Penanganan *stunting* harus melibatkan masyarakat untuk memberikan perhatian lebih pada kesehatan ibu hamil, anak dan balita serta sanitasi lingkungan.



DAFTAR ISI

BAB I	SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH 1.1. PENDAHULUAN 1.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.3. TANTANGAN DAERAH	1	BAB IV	SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH 4.1. APBD TINGKAT PROVINSI (KONSOLIDASI PEMDA) 4.2. PENDAPATAN DAERAH 4.3. BELANJA DAERAH 4.4. PERKEMBANGAN BLU DAERAH 4.5. SURPLUS/DEFISIT APBD 4.6. PEMBIAYAAN 4.7. ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 4.8. PERKEMBANGAN BELANJA WA IIR DAFRAH	60
BAB II	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 2.1. INDIKATOR EKONOMI MAKRO FUNDAMENTAL 2.2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN 2.3. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL	14	BAB V	SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH 5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN 5.2. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN 5.3. BELANJA KONSOLIDASIAN 5.4. SURPLUS/DEFISIT KONSOLIDASIAN 5.5. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGREGAT	77
BAB III	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN TINGKAT REGIONAL 3.1. APBN TINGKAT PROVINSI 3.2. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL 3.3. BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL 3.4. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 3.5. ANALISIS CASH FLOW APBN TINGKAT REGIONAL 3.6. PENGELOLAAN BLU PUSAT 3.7. PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT 3.8. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING) DAN INFRASTRUKTUR PUSAT DI DAERAH	33	BAB VI	SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH 6.1. SEKTOR UNGGULAN DAERAH 6.2. SEKTOR POTENSIAL DAERAH 6.3. TANTANGAN FISKAL REGIONAL DALAM MENDORONG POTENSI EKONOMI DAERAH	89
			BAB VII	ANALISIS TEMATIK	106
			BAB VIII	PENUTUP 8.1. KESIMPULAN 8.2. REKOMENDASI	117

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 laju pertumbuhan dan distribusi PDRB menurut pengeluaran (%).....	15
Tabel 2.2 IHK dan Inflasi Kota Kendari Sub Kelompok Bahan Makanan bulan Juni 2019	20
Tabel 2.3 Perkembangan IPM, AHH, HLS, RLS dan RPP	25
Tabel 2.4 Kondisi KetenagaKerjaan Sulawesi Tenggara	28
Tabel 2.5 Perbandingan Asumsi KUA Provinsi Sultra dan Realisasi	30
Tabel 2.6 Tabel 2.6 Hasil Regresi.....	31
Tabel 3.1 Pagu dan Realisasi APBN lingkup Sultra (miliar Rp.).....	33
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Perpajakan lingkup Sultra (miliar Rp.).....	34
Tabel 3.3 Tax Ratio dan Tax per Kapita lingkup Sultra	35
Tabel 3.4 Penerimaan Perpajakan versi SPAN dan Versi KPP lingkup Sultra (miliar Rp.)	36
Tabel 3.5 Perkembangan PNBPNP lingkup Sultra (miliar Rp.).....	37
Tabel 3.6 Perkembangan PNBPNP Fungsional lingkup Sultra (miliar Rp.)	38
Tabel 3.7 PNBPNP Ratio dan PNBPNP per Kapita lingkup Sultra	39
Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi per Fungsi lingkup Sultra (miliar Rp.).....	42
Tabel 3.9 Pagu dan Realisasi per Jenis Belanja lingkup Sultra (miliar Rp.).....	42
Tabel 3.10 Rasio Belanja Pemerintah terhadap Populasi dan PDRB lingkup Sultra ...	44
Tabel 3.11 Transfer ke Daerah dan Dana Desa lingkup Sultra (miliar Rp.)	46
Tabel 3.12 Komparasi TKDD dengan Indikator Makroekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara.....	48
Tabel 3.13 Aset UHO dan RS Bhayangkara Kendari (miliar Rp).....	53
Tabel 3.14 Pagu RM dan PNBPNP UHO dan RS Bhayangkara Kendari (miliar Rp.).....	54
Tabel 3.15 Pagu RM dan PNBPNP 10 besar pagu PNBPNP Satker lingkup Sultra (miliar Rp.)	55
Tabel 3.16 Data SLA lingkup Sultra	55
Tabel 4.1 Profil Apbd Sulawesi Tenggara	60
Tabel 4.2 Jenis Pendapatan Apbd Sulawesi Tenggara.....	61
Tabel 4.3 Profil Apbd Sulawesi Tenggara Berdasarkan Klasifikasi Jenis Belanja.....	66
Tabel 4.5 Profil Aset Dan Pagu Satker Blu Daerah Di Sulawesi Tenggara.....	69
Tabel 4.6 Pembiayaan Daerah	71
Tabel 4.7 Realisasi Pendapatan 2019 Per Kab/Kota/Prov Sultra (Dalam Miliar)	73
Tabel 4.8 Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota	74

Tabel 4.9 Tiga Jenis Urusan Belanja Wajib.....	75
Tabel 5.1. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Lingkup Sultra (Miliar Rp.)	77
Tabel 5.2 Tax Ratio Dan Tax Per Kapita Konsolidasian Lingkup Sultra	80
Tabel 6.1 Keunggulan Komparatif Wilayah Sultra Per Sektor	90
Tabel 6.2 Keunggulan Kompetitif Wilayah Sultra Per Sektor.....	91
Tabel 6.3 Kriteria Tipologi Wilayah.....	92
Tabel 6.4 Hasil Pengukuran Rasio Pertumbuhan Nasional (Rpr) Dan Rasio Pertumbuhan Sultra (Rps) Tahun 2015-2019.....	97
Tabel 6.5 Kur Dan Umi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Lingkup Sultra Tahun 2017-2019.....	98
Tabel 6.6 Hasil Estimasi Pdrb Sektor Pertanian Dan Kemiskinan	100
Tabel 6.7 Matriks Swot Dan Alternatif Strategi Pengembangan Sektor Pertanian.....	102
Tabel 7.1 Realisasi Anggaran Penanganan Stunting: Intervensi Sensitif	110
Tabel 7.2 Realisasi Anggaran Penanganan Stunting: Intervensi Spesifik.....	111
Tabel 7.3 Realisasi Anggaran Penanganan Stunting: Intervensi Spesifik.....	112
Tabel 7.4 Lokus Prioritas Stunting Oleh Bkkbn Di Sultra.....	113
Tabel 7.5 Penyaluran Dak Fisik Dan Dana Desa Dalam Penanganan Stunting	114
Tabel 7.6 Realiasi Apbd Untuk Penanganan Stunting.....	114

DAFTAR GRAFIK

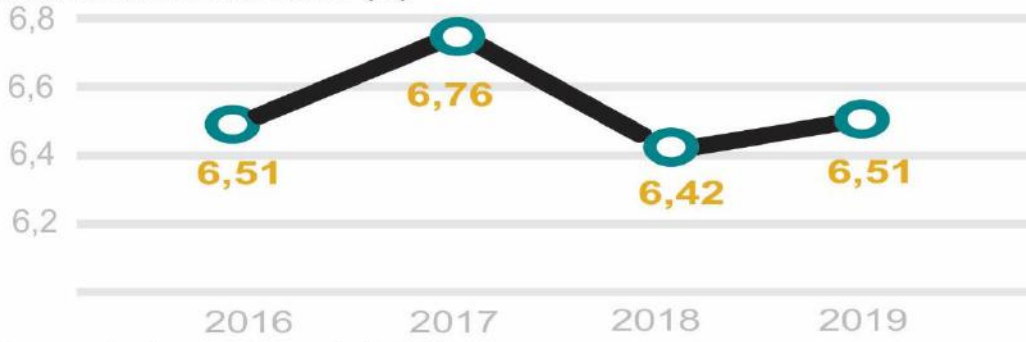
Grafik 1.1	Komposisi Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan Sultra Tahun 2019 (Ribuan).....	9
Grafik 2.1	PDRB Sultra Menurut Lapangan Usaha (Triliun Rp.).....	15
Grafik 2.2	Rata-Rata Tingkat Suku Bunga Bank Umum Secara Nasional (%) (Per November 2019).....	16
Grafik 2.3	Pertumbuhan Outstanding Pinjaman Di Sultra (Sampai Dengan November 2019).....	17
Grafik 2.4	Perkembangan Suku Bunga Acuan Dan Inflasi Sultra 2019.....	17
Grafik 2.5	Perkembangan Inflasi Sultra Dan Nasional (%).....	18
Grafik 2.6	Inflasi Kota Kendari Tahun 2019 Berdasarkan Komponen Pembentuk (%;Mtm).....	19
Grafik 2.7	Perkembangan Indeks Yang Dibayar Petani (Ib).....	20
Grafik 2.8	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Beberapa Mata Uang Asing (Kurs Tengah Bi).....	21
Grafik 2.9	Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Vol Perdagangan.....	22
Grafik 2.10	Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Vol Perdagangan.....	23
Grafik 2.11	Persentase Penduduk Miskin Sultra (%).....	25
Grafik 2.12	Perkembangan Angka Kemiskinan Sultra Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal (Ribu Jiwa).....	25
Grafik 2.13	Perkembangan Ketimpangan Di Asia Timur 1990-An Dan 2000-An.....	26
Grafik 2.14	Perkembangan Rasio Gini Sultra.....	27
Grafik 2.15	Perkembangan Inflasi Sultra Dan Nasional.....	30
Grafik 3.1	Target Dan Realisasi Pnbp Lingkup Sultra (Miliar Rp.).....	37
Grafik 3.2	Target Dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Lingkup Sultra (Miliar Rp.).....	40
Grafik 3.3	Penyerapan 10 K/L Pagu Terbesar Lingkup Sultra (Miliar Rp.).....	40
Grafik 3.4	Perbandingan Belanja Sektor Konsumtif Dan Sektor Produktif Lingkup Sultra.....	43
Grafik 3.5	Perbandingan Domisili Rekanan 50 Kontrak Terbesar Lingkup Sultra.....	44
Grafik 3.6	Perkembangan Cash Flow Belanja Negara Lingkup Sultra (Miliar Rp.).....	52
Grafik 5.1	Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Lingkup Sultra (Miliar Rp.).....	79
Grafik 5.2	Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Lingkup Sultra (Miliar Rp.).....	79

Grafik 5.3 Perbandingan Komposisi Pendapatan Pusat Dan Daerah Konsolidasian Lingkup Sultra (Miliar Rp.)	80
Grafik 5.4 Belanja Pemerintah Konsolidasian Lingkup Sultra (Miliar Rp.).....	82
Grafik 5.5 Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Belanja Konsolidasian Lingkup Sultra (Miliar Rp.)	83
Grafik 5.6 Perubahan Belanja Konsolidasian Lingkup Sultra (Miliar Rp.)	83
Grafik 6.1 Nilai Ekspor Komoditas Pertambangan Dan Penggalian (Dalam Juta Us\$)	93
Grafik 6.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2019.....	94
Grafik 6.3 Jumlah Perusahaan Konstruksi Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019	94
Grafik 6.4 Perkembangan Lalu Lintas Penumpang Angkutan Laut Tahun 2017, 2018, Dan 2019 (Dalam Ribu Orang).....	95
Grafik 6.5 Perkembangan Lalu Lintas Penumpang Angkutan Udara Tahun 2017, 2018, Dan 2019 (Dalam Ribu Orang).....	95
Grafik 6.6 Persentase Jumlah Usaha Imk Menurut Kabupaten/Kota.....	98
Grafik 7.1 Prevalensi Stunting Sulawesi Tenggara 2018 (%)	106
Grafik 7.2 Realiasi APBD 2019 Untuk Penanganan Stunting	114

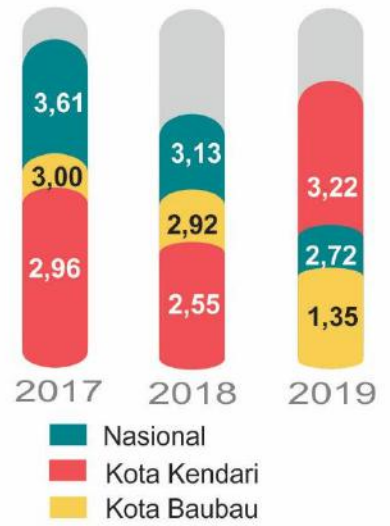
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Stratigrafi Kepingan Sultra.....	11
Gambar 6. 1 Klasifikasi Tipologi Klassen Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Perspektif Nasional	92
Gambar 7. 1 Konsep Malnutrisi.....	107
Gambar 7. 2 Lima Pilar Penanganan Stunting Di Indonesia.....	108
Gambar 7. 3 DFDD Untuk Mengatasi Stunting.....	113
Gambar 7. 4 Konsep Rumah Cegah Stunting	114

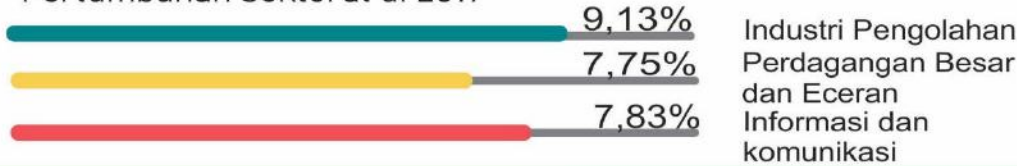
Pertumbuhan Ekonomi (%)



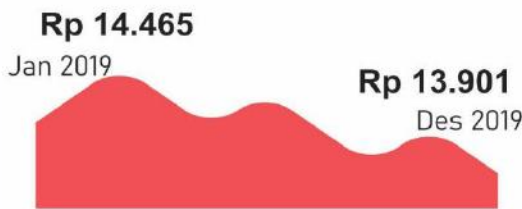
Inflasi (%)



Pertumbuhan sektoral di 2019



Kurs USD

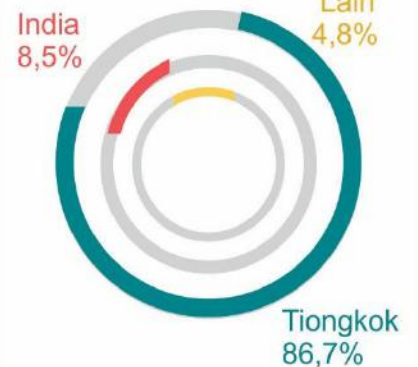


Kurs CNY



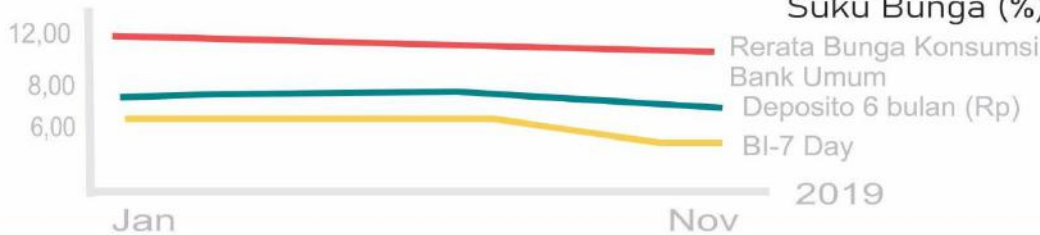
Nilai Ekspor

\$1.859,76



Nilai Impor \$1.376,63

Suku Bunga (%)



Gini Rasio



Indeks Pembangunan Manusia

2017	2018	2019	IPM
69,86	70,61	71,20	Angka Harapan Hidup (Tahun)
70,47	70,72	70,97	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
13,36	13,53	13,55	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
8,46	8,69	8,91	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun (000 Rp)
9.094	9.262	9.436	

Tingkat Pengangguran Terbuka



Kemiskinan

Tahun	% Nasional	% Sultra	Jumlah (Sultra)
Sep 2019	9,22	11,04	299.970 jiwa
Sep 2018	9,66	11,32	301.850 jiwa
Sep 2017	10,12	11,97	313.160 jiwa

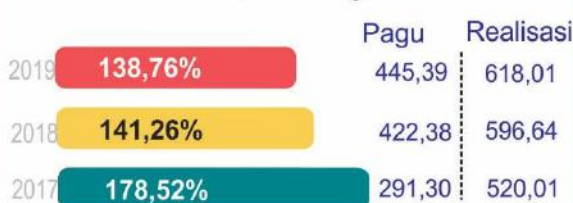
APBN

Pendapatan Negara (Miliar Rp)

Pajak

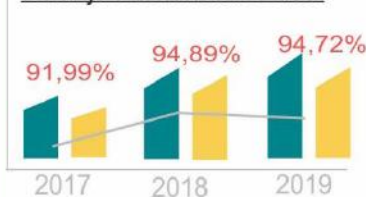


Bukan Pajak



Belanja Negara (Miliar Rp)

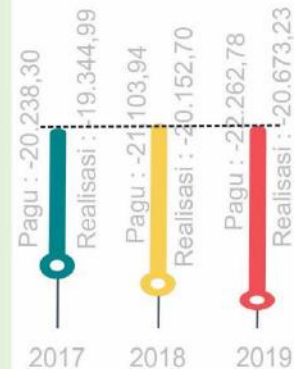
Belanja Pemerintah Pusat



Transfer



Surplus Defisit (Miliar Rp)



APBD

Pendapatan Daerah (Miliar Rp)

PAD

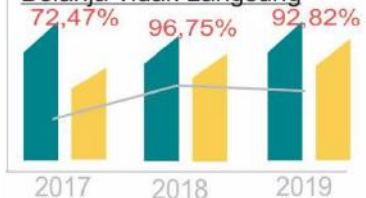


Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



Belanja Negara (Miliar Rp)

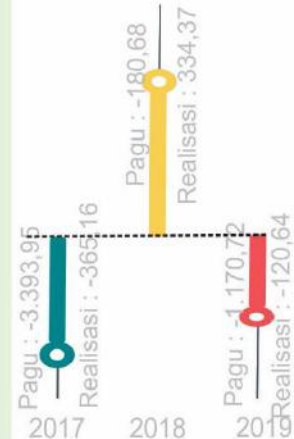
Belanja Tidak Langsung



Belanja Langsung



Surplus Defisit (Miliar Rp)



CAPAIAN OUTPUT APBN DI SULTRA

Pendidikan

Program Indonesia Pintar

1.070 santri

Bidik Misi PTKI

± 459 mahasiswa

Tunjangan Profesi

1.171 guru

Penerima BOS

± 61 ribu siswa

Rehabilitasi Sarpras

430 ruang

Kesehatan

Surveilans Gizi

17 layanan

Alat Laboratorium

30 unit

Ketersediaan Alokasi

358 faskes

Infrastruktur

Jembatan

Sungai Rahabangga dan Sungai Aser

Infrastruktur Transportasi Udara

Kapasitas dan Layanan Bandar Udara di Bandara Udara Halu Oleo, Kendari

Bandara Udara Beto Ambari, Buton

Kantor Upbu Matahora

Kantor Upbu Sangia Ni Bandera

Bandara Udara Sugimanuru, Muna

Dermaga Penyeberangan

Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa

Pelabuhan Penyeberangan Tomia dan Binongko

Infrastruktur Irigasi

Jalan

Jalan Nasional dan Dukungan Jalan Daerah

BAB I



Patung Kepala Naga Kerajaan Kesultanan Buton

SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH

BAB I

SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH

1.1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Guna mewujudkan peningkatan pembangunan daerah yang baik, diperlukan suatu perencanaan di dalamnya agar terarah dan tepat sasaran. Di samping itu, setiap upaya pembangunan daerah harus mempunyai tujuan dan sasaran utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja masyarakat yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketentuan perencanaan pembangunan daerah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut UU SPPN) yang mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah harus menjadi satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini bertujuan agar terjamin konsistensi sinergitas sasaran, dan arah kebijakan pembangunan di daerah dengan di pusat dan terjalinnnya koordinasi dalam rangka upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional serta penyesuaian alokasi anggaran pembangunan yang berorientasi pada *outcome*. Selain itu, setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah harus sinkron satu sama lain.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pemerintah daerah hendaknya mengetahui setiap potensi dan tantangan yang dihadapi oleh daerah. Hal ini bertujuan untuk mengintervensi kebijakan fiskal, melalui prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan karena masalah utama pembangunan daerah terletak pada penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas suatu daerah.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.2.1 Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), disertai dengan Rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat indikatif.

Tabel 1. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kondisi aman pada berbagai aspek kehidupan dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang baik	Terpeliharanya kondisi aman dalam akses lapangan kerja dan pendapatan yang layak
		Terpeliharanya kondisi aman dalam keterpenuhan pangan masyarakat untuk terbebas dari ancaman kelaparan dan kurang gizi
		Terpeliharanya kondisi aman dalam akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan meningkatnya literasi masyarakat
		Terpeliharanya kondisi aman pada aspek kesehatan masyarakat
		Terpeliharanya kondisi aman dalam daya dukung daya tampung lingkungan hidup untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat
		Terpeliharanya kondisi aman secara pribadi dan komunitas sehingga bebas dari ancaman kekerasan dan ketegangan antar identitas
		Terpeliharanya kondisi aman dalam kehidupan politik dan pemenuhan hak asasi
		Memerangi Perubahan Iklim dan Dampaknya
2.	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah
		Meningkatnya daya saing investasi daerah
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan dasar berbasis SPM dan pelayanan publik lainnya secara inklusif
		Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan
4.	Meningkatkan daya saing infrastruktur wilayah dalam mendukung konektivitas antar daerah	Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas wilayah

Sumber: RPJMD Prov. Sultra Tahun 2018-2023

RPJMD bertujuan untuk merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta merupakan kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Adapun penyusunan RPJMD harus memenuhi prinsip strategis, demokratis dan partisipatif, politis, perencanaan bottom-up dan perencanaan top down.

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 - 2023 disusun pasca pelantikan Gubernur terpilih H. Ali Mazi, SH dan Wakil Gubernur Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si pada tanggal 5 September 2018 sebagai penjabaran dari visi dan misi yang dijanjikan kepada masyarakat. Visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 - 2023 adalah “Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”.

1.2.2 Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan visi dan misi yang telah disusun dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 - 2023, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyusunan RKPD harus dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kemampuan dana pada tahun bersangkutan. Isi RKPD lebih banyak diarahkan pada perumusan program dan kegiatan secara rinci, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya untuk masing-masing program dan kegiatan. RKPD juga memuat perkiraan kebutuhan dana untuk masing-masing program dan kegiatan berikut unit atau bagian yang akan mengerjakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Adapun tema RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 adalah “*Peningkatan Konektivitas dan Daya Saing Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan*”. RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara disusun dengan mengacu dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dengan berakhirnya periode RPJMD 2013 - 2018, maka penyusunan RKPD Tahun 2019 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD provinsi. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 disusun secara realistis dan obyektif dengan mempertimbangkan potensi, isu permasalahan, hasil analisis dan evaluasi, capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya. Mengingat periode RPJMD tahun 2013 - 2018 merupakan bagian dari tahapan RPJPD tahun 2005 - 2025, sehingga terdapat program dan kegiatan pada RPJMD yang lalu belum terlaksana tetapi masih relevan dengan kondisi ekonomi sosial ekonomi masyarakat, maka tujuan dan sasaran Pembangunan tahun 2019 juga mengacu pada tujuan dan sasaran pokok RPJPD dalam memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan. RKPD tahun 2019 juga memperhatikan kondisi saat ini dan kebutuhan masyarakat berdasarkan usulan dalam musrenbang provinsi.

Tabel 1. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah nasional melalui upaya peningkatan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup saat lahir, dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta peningkatan mutu pelayanan dasar dan pemerataan pelayanan dasar	Meningkatnya Akses, Mutu dan Kualitas Pendidikan Masyarakat
		Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
		Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
		Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular
		Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB) dan pelayanan kesehatan reproduksi
		Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
2.	Membangun infrastruktur antar wilayah yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan dan sentra produksi serta mempercepat pembangunan infrastruktur pada kawasan strategis untuk mendukung peningkatan nilai tambah sumberdaya alam melalui investasi	Meningkatnya pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi darat, laut dan udara
3.	Meningkatnya produksi pertanian, berkembangnya tata ruang dan kawasan konservasi laut, hutan serta destinasi pariwisata	Menurunnya persentase penduduk miskin
		Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi serta pemberdayaan PMKS
		Meningkatnya pariwisata daerah
		Meningkatnya perdagangan dalam dan luar negeri
		Meningkatnya usaha koperasi dan UMKM serta wirausaha baru
		Meningkatnya investasi daerah
		Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan
		Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja
4.	Meningkatkan penyediaan pangan hasil pertanian dan perikanan, Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, Pemenuhan kebutuhan air untuk sosial dan ekonomi produktif dan Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
		Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat
		Meningkatnya cadangan pangan
5.	Meningkatkatnya kapasitas aparatur dan pelayanan prima, melaksanakan e-government yang terintegrasi (e-planning, e-budgeting, e-evaluating, dan e-reporting) serta meningkatkan efektivitas dan pencegahan tindak pidana korupsi, menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta aparat pemerintahan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat serta bersih dari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, sehingga tercipta tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
		Meningkatnya disiplin dan kinerja pegawai

Sumber: RKPD Prov. Sultra Tahun 2019

1.3. TANTANGAN DAERAH

1.3.1 Tantangan Ekonomi Daerah

1.3.1.1. Tantangan terhadap pengelolaan potensi sumber daya alam

Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan, serta pertambangan. Dari sektor pertanian, tercatat produksi padi pada tahun 2018 sebanyak 499.007 ton dan produksi kakao dari sektor perkebunan mencapai 122.943 ton. Sementara itu, produksi ikan mencapai 833.828 ton. Di samping sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan, sektor kelautan Sultra juga potensial untuk wisata bahari seperti Taman Nasional Wakatobi yang memiliki potensi sumberdaya alam laut yang bernilai tinggi, baik jenis dan keunikannya, dengan panorama bawah laut yang menakjubkan, dan keindahan Pulau Labengki atau yang lebih dikenal dengan julukan Raja Ampatnya Sulawesi. Dari sektor pertambangan, Sultra juga memiliki potensi alam yang sangat menjanjikan. Nikel Sultra memiliki cadangan yang cukup besar, jumlah cadangan nikel Sultra berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 97 milyar ton dengan luas sebaran nikelnya 480 ribu Ha.

Melihat potensi sumber daya alam yang begitu besar dan cukup menjanjikan, maka sudah seyogyanya kekayaan alam Sultra diolah dengan tepat untuk mensejahterakan penduduk dan menopang perekonomian Sultra, serta demi kelangsungan sumber daya alam Sultra sendiri. Pengelolaan sumber daya alam Sultra memiliki tantangan tersendiri. Selama ini Sultra hanya menjadi tempat menjual bahan baku, sementara negara lain menjadi tempat pengolahan ke bahan jadi, perdagangan, dan distribusi. Hal ini merupakan bentuk eksploitasi sumber daya alam yang sedang terjadi di Sultra. Beberapa wilayah di Sultra berpotensi dikembangkan menjadi kawasan industri dengan keunggulan komoditas di kawasan tersebut. Selain itu, paradigma keliru dalam pengelolaan sumber daya alam, menimbulkan ancaman terhadap kesinambungan daya guna kawasan serta kelestarian lingkungan hidup. Beberapa perubahan fungsi lahan menyebabkan timbulnya dampak negatif, antara lain semakin seringnya frekuensi kejadian banjir, kekeringan, maupun gagal panen. Pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap menjaga daya dukung ekologi alam secara komprehensif dan menyeluruh perlu mendapat perhatian serius dalam rangka meminimalisasi kerusakan lingkungan serta penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya alam.

Pengembangan komoditas unggulan, terutama komoditi pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat ternyata masih dihadapkan oleh berbagai kendala, yaitu:

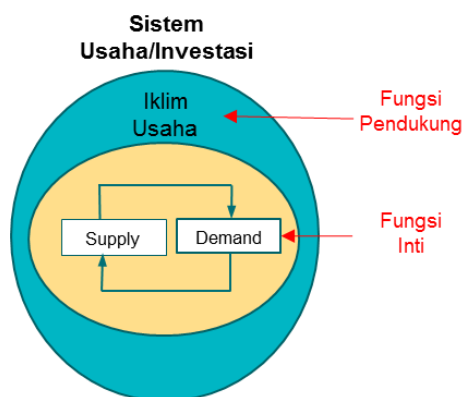
1. Sebagian besar komoditi lokal masih berupa bahan baku yang diperuntukkan bagi perdagangan antar pulau.
2. Minimnya akses pelaku agribisnis maupun agroindustri terhadap informasi pasar internasional.
3. Sulit mendapatkan sumber pendanaan, mengakibatkan minimnya ketersediaan modal yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi.
4. Produk pertanian belum didukung oleh ketersediaan benih berkualitas tinggi dengan jumlah yang memadai.
5. Sebagian besar produk masih bermutu rendah dan tidak tersedia secara kontinyu.
6. Pengembangan usaha belum didukung oleh sarana dan prasarana vital yang memadai.
7. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak *sustainable*, seperti illegal fishing dan illegal logging, sehingga kerusakan yang terjadi, terutama hutan dan terumbu karang semakin tidak terkendali.
8. Penggunaan bahan peledak ikan yang dapat merusak ekosistem laut.
9. Pengelolaan sumber daya alam yang masih cenderung dilakukan secara tradisional dan kebanyakan kebanyakan masih mengandalkan tenaga manusia serta belum didukung oleh penggunaan teknologi canggih.
10. Terbatasnya ragam produk yang dapat dihasilkan oleh masyarakat di pulau-pulau kecil akibat kelangkaan sumber air bersih.
11. Potensi jasa yang ramah lingkungan seperti agrowisata, pemanfaatan energi alternatif, *agroforestry*, dan budi daya lahan kritis belum optimal dikelola.
12. Kepastian hukum kawasan masih banyak yang belum jelas dan tegas.
13. Terbatas power plan untuk pembangunan *smelter*.
14. Eksploitasi sektor tambang rata-rata dikelola oleh investor berkantor di luar Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.3.1.2. Tantangan dalam menciptakan iklim dan potensi investasi yang kondusif

Sultra kaya akan potensi sumber daya alam yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Sultra. Dalam mengelola potensi Sultra tersebut, dibutuhkan investor untuk menanamkan modalnya karena saat ini Sultra belum mampu mengelolanya sendiri, baik dari aspek peralatan modal maupun pembentukan modal. Oleh karena itu, investasi di Sultra perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan, karena investasi bisa menjadi salah satu stimulan dalam memicu dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut NSLIC, Investasi atau sistem usaha terdiri atas dua fungsi yaitu fungsi inti dan fungsi pendukung. Fungsi inti sebagai hal utama dalam sistem usaha/investasi yaitu *supply-demand* yang saling berinteraksi membentuk pasar. Fungsi pendukung ditujukan

untuk memperkuat interaksi *supply-demand* agar dapat mengatasi berbagai tantangan iklim usaha seperti peraturan-perundangan, kelembagaan pendukung, serta infrastruktur baik fisik dan non-fisik.



Fungsi inti diharapkan akan menumbuhkan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara optimal, meluasnya kerja sama pada sistem usaha/produksi dan terbentuknya kluster ekonomi. Dengan memperkuat pada fungsi pendukung yaitu iklim usaha, maka diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Pada fungsi inti menghadapi hambatan antara

lain: terbatasnya akses pada sumber-sumber ekonomi (termasuk keuangan, teknologi, riset, training, dll), sub-sistem ekonomi atau produksi tidak terkait dengan sistem pasar yang lebih luas. Dengan kata lain terbatasnya kerja sama antar sub-sistem usaha dengan sistem produksi lainnya dan terbatasnya kerja sama antar daerah (tidak mencapai pembentukan kluster ekonomi). Pada fungsi pendukung menghadapi hambatan berupa: lemahnya koordinasi antara berbagai tingkatan di pemerintahan, lemahnya kapasitas pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, kerangka kebijakan dan peraturan yang kompleks dan investasi yang rendah dalam pengembangan infrastruktur.

Di Sultra fungsi pendukung dilaksanakan salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang mempermudah izin investasi dan memberikan kenyamanan berinvestasi serta mencabut 100 perda yang tidak sejalan dengan kemudahan investasi. Hal ini terlihat dari realisasi investasi di tahun 2019 sebesar Rp17,1 triliun, melampaui target yang ditetapkan oleh BKPM sebesar Rp15 triliun. Sementara tahun-tahun sebelumnya target investasi belum tercapai. Selain itu, hal lain yang berpengaruh terhadap investasi adalah kondisi keamanan suatu daerah. Kondisi ini dapat salah satunya terlihat dari unjuk rasa. Jumlah unjuk rasa di Kota Kendari tahun 2019 sebanyak 271 unjuk rasa, relatif lebih menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 363 unjuk rasa.

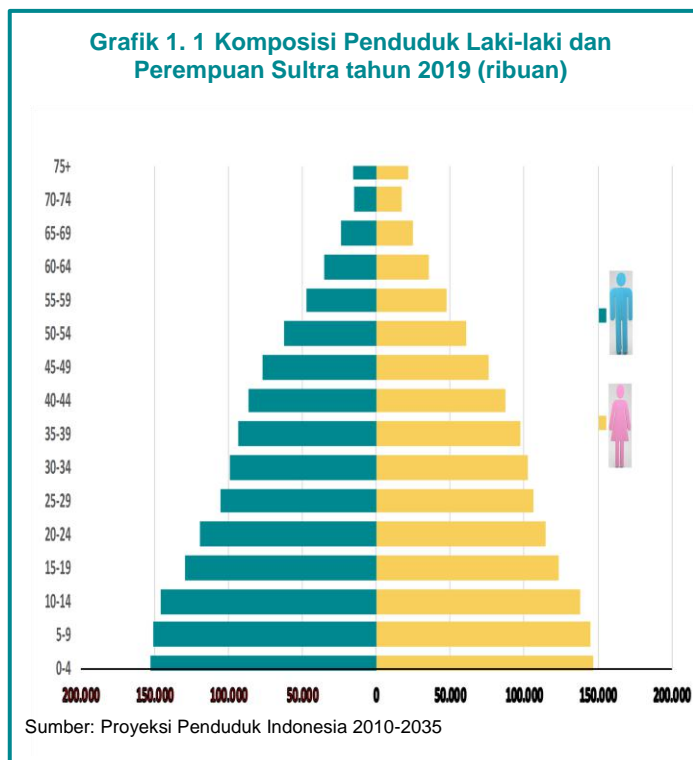
1.3.2 Tantangan Sosial Kependudukan

Bangsa besar adalah bangsa yang menempatkan masalah kependudukan dalam program kerjanya. Saat ini, pemerintahan Presiden Jokowi menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fokus kerja pemerintah, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019 dan dijabarkan dalam RKP tahun 2019. Sasaran pemerintah pusat tersebut juga telah disinkronisasikan dengan prioritas pemerintah daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara, yang tertuang dalam RPJMD 2019 - 2023 dan RKPD tahun 2019 melalui peningkatan kualitas SDM.

Kondisi yang tengah dihadapi Sultra di bidang kependudukan adalah laju pertumbuhan penduduk Sultra yang tumbuh di atas rata-rata nasional. Berdasarkan proyeksi penduduk, laju pertumbuhan penduduk Sultra tahun 2015 - 2020 sebesar 1,97%, sementara Nasional tercatat sebesar 1,19%. Laju pertumbuhan penduduk Sultra sekaligus menjadi laju pertumbuhan tertinggi di regional Sulawesi. Pertumbuhan ekonomi di satu sisi bisa menjadi modal untuk pembangunan jika dibarengi dengan kualitas dan kemampuan daya saing penduduk. Namun pertumbuhan penduduk di Sultra belum diimbangi dengan tingkat penghidupan yang layak. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat kemiskinan di Sultra. Tentu saja kondisi ini harus menjadi fokus pemerintah mengingat jumlah penduduk yang besar akan menjadi permasalahan dalam kaitannya dengan penyediaan pangan, sandang dan papan. Dikaitkan dengan ketersediaan pangan, saat ini pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Sultra dalam PDRB mengalami perlambatan, sementara jumlah penduduk terus mengalami pertumbuhan. Ditinjau dari komposisi penduduk, proyeksi jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2019 sebanyak 1.360.700 jiwa, sementara proyeksi jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.344.000 jiwa. Struktur ini juga bisa menjadi suatu tantangan karena menurut data dari BPS, jumlah penduduk Sultra yang bekerja didominasi oleh kaum perempuan, sementara mayoritas penduduk Sultra bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, atau berprofesi sebagai petani dan nelayan. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi rendah, karena sektor yang menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat di Sultra pertumbuhannya kecil sehingga imbasnya pada nilai tukar petani yang masih di bawah 100.

Sementara itu dari segi usia, Sultra tengah mengalami bonus demografi dimana 63% penduduk berada pada usia produktif (15-64 tahun). Bonus demografi akan menyebabkan ketergantungan penduduk, dimana tingkat penduduk produktif menanggung penduduk nonproduktif menjadi tinggi atau 54,48%. Kondisi ini berarti setiap 100 orang berusia produktif di Sultra menanggung 54 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Dari indikator ini, terlihat bahwa pada tahun 2019 penduduk usia kerja di Sultra dibebani tanggung jawab terhadap penduduk usia muda lebih banyak dari pada usia tua. Dengan demikian pendapatan per kapita penduduk Sultra akan menjadi rendah, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat pun menurun.



Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, pada tahun 2018 Sultra memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.653.654 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 68,9 jiwa per km². Tingkat kepadatan tertinggi berada di Kota Kendari dengan kepadatan 1.237 jiwa per km², disusul Kota Baubau dengan tingkat kepadatan 739,3 jiwa per km². Sementara itu Kabupaten Konawe Utara memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar 12,1 jiwa per km². Jumlah penduduk dan tingkat

kepadatan merupakan indikator dalam penilaian tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap ancaman (*hazard*). Semakin banyak jumlah penduduk dan semakin tinggi kepadatannya, maka tingkat kerentanan wilayah tersebut terhadap ancaman semakin tinggi. Dari aspek jumlah penduduk dan kepadatannya, Kota Kendari dan Kota Baubau mempunyai tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibanding dengan kabupaten/kota lainnya di Sultra. Namun, umumnya setiap ibukota kabupaten/kota di Sultra mempunyai jumlah penduduk yang lebih banyak dan lebih padat dibanding tempat-tempat lainnya. Oleh karena itu, dari aspek jumlah penduduk dan kepadatannya, ibukota kabupaten lebih rentan dibanding dengan tempat-tempat lainnya di kabupaten tersebut.

Dari segi kualitas, kemampuan daya saing suatu wilayah terlihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, kematian dan kelahiran. Angka melek huruf Sultra pada tahun 2019 tercatat sebesar 94,91%, juga masih dibawah angka melek huruf nasional sebesar 95,90%. Begitupun dengan angka harapan hidup dan indeks pembangunan manusia Sultra yang masih di bawah nasional, masing-masing tercatat sebesar 70,72 tahun dan 70,61 tahun. Tingkat pendidikan penduduk Sultra dapat dilihat dari persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak/belum tamat SD/ sederajat sebesar 18,07. Sementara yang tamat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat masing-masing sebesar 19,56 dan 20,53, sedangkan yang tamat SMA/ sederajat dan Diploma masing-masing sebesar 27,50 dan 14,33. Dengan demikian, penduduk Sultra yang berusia 15 tahun ke atas terdapat 37,63% berpendidikan rendah atau tamat sampai dengan SD. Hal ini akan berimbas pada tingginya penduduk Sultra yang bekerja pada sektor-sektor yang tidak

membutuhkan skill atau keterampilan yang tinggi. Jumlah penduduk bekerja yang berpendidikan rendah atau tamatan SD ke bawah sebanyak 442.335 orang atau 36,32%. Berdasarkan data dari Sulawesi Tenggara dalam Angka 2019, penduduk berumur 15 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan SD ke bawah paling banyak bekerja di sektor pertanian seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 3 Penduduk 15 Tahun Ke Atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan di Sultra Tahun 2018

Lapangan Pekerjaan Utama	Tingkat Pendidikan			
	SD ke bawah	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
Pertanian	261.686	82.018	76.977	6.978
Industri Pengolahan	90.493	46.543	72.220	14.315
Jasa	97.904	68.076	193.563	196.715
Total	450.083	196.637	342.760	218.008

Sumber: Sulawesi Tenggara dalam angka 2019

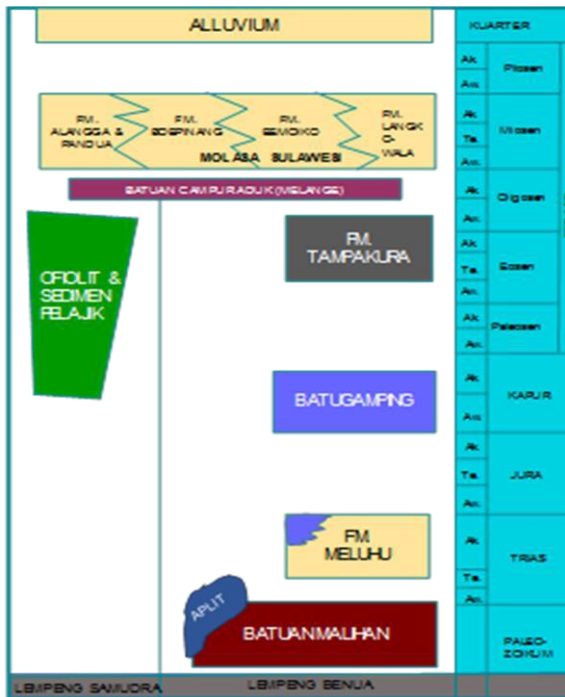
Melihat hal tersebut, maka dampak langsung yang dialami oleh penduduk Sultra adalah penghasilan akan rendah karena upah/gaji untuk sektor pertanian paling rendah dibanding dengan sektor lainnya. Sementara itu data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa pengangguran pada bulan Agustus 2019 didominasi oleh tamatan SMK disusul tamatan Diploma. Meski demikian kondisi pengangguran tingkat SMK dan Diploma mengalami perbaikan dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja tingkat SMK dan Diploma yang terserap oleh pasar kerja Sultra. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran tamatan SMA yang justru mengalami peningkatan. Apabila ditelisik lebih jauh, penyebab pengangguran di level pendidikan tingkat SMA/SMK dan Diploma adalah ketidaksesuaian antara produk pendidikan dengan bidang kebutuhan dalam lapangan kerja, dan rendahnya keterampilan tenaga kerja terhadap tuntutan produktifitas angkatan kerja serta dari tenaga kerja level ini pun cenderung akan memilih-milih pekerjaan. Jika masalah tersebut tidak segera diatasi maka Sultra akan tetap terjat dalam jurang kemiskinan, penduduk yang sudah bekerja tetapi penghasilannya rendah karena mereka bekerja di sektor yang stagnan dan penduduk yang masih menganggur.

1.3.3 Tantangan Geografi Wilayah

Sultra terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan kepulauan, yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil dengan total luas 153.019 km². Secara umum, wilayah Sultra terdiri dari 74,25% atau 110.000 km² perairan. Sedangkan wilayah daratan, mencakup jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan beberapa pulau kecil yang mencapai luas 38.140 km² (25,75%). Sebagai wilayah kepulauan, Sultra memiliki 651 pulau seperti

yang tampak pada **Gambar 1.2**. Kondisi tersebut membutuhkan infrastruktur untuk menghubungkan antar wilayah sesuai dengan kondisi geografisnya. Koneksitas antara pusat pertumbuhan dengan daerah pinggiran *hinterland* sangat penting untuk menyebarkan pertumbuhan ekonomi dari pusat ke pinggiran. Daerah-daerah kepulauan yang merupakan *hinterland* akan semakin cepat berkembang jika efektif terhubung dengan pusat pertumbuhan. Pembangunan jembatan antara daratan dan kepulauan maupun antar kepulauan akan sangat mempermudah arus lalu lintas barang dan manusia yang bernilai ekonomis. Di sisi lain, pemanfaatan sarana transportasi laut, selain terkendala oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas alat angkut milik masyarakat, juga sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan musim. Kondisi ini membutuhkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang secara kuantitas lebih banyak, serta perlu alternatif moda transportasi yang lebih beragam sesuai kondisi daerah.

Gambar 1. 1 Stratigrafi Kepingan Sultra



Sumber: Jurnal Geologi

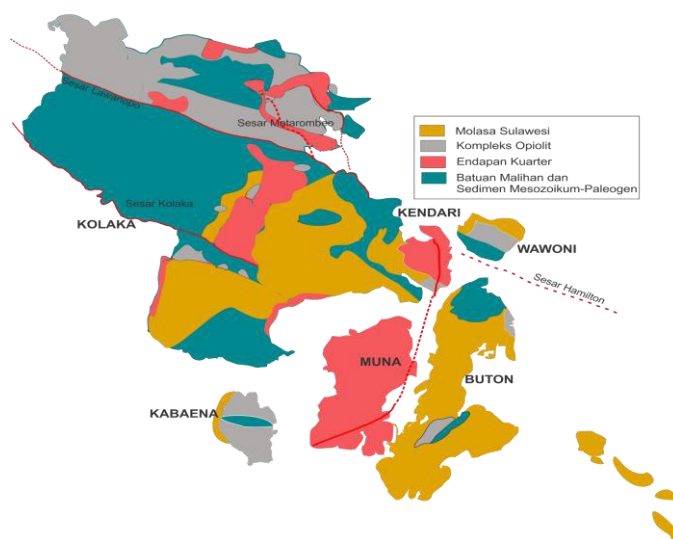
Berdasarkan stratigrafi, posisi Provinsi Sulawesi Tenggara terbentuk akibat tumbukan dua lempeng besar yaitu lempeng benua yang berasal dari Australia dan lempeng samudera yang berasal dari pasifik. Akibat tumbukan kedua lempeng tersebut, maka Sultra terdiri dari tiga batuan utama penyusunnya yaitu *Continental Terrane* (mintakat benua), *Oceanic Terrane* dan *Sulawesi Molasse*. *Continental Terrane* tersusun oleh batuan tertua berupa kompleks batuan malihan yang terdiri dari sekis, kuarsit, sabak dan marmer, batupasir kuarsa, dan serpih merah. Sementara itu, *Oceanic Terrane* terdiri dari kompleks ofiolit dan sedimen pelagic. Kompleks ofiolit didominasi oleh batuan

ultramafik dan mafik yang terdiri dari harzburgit, dunit, werlit, lertzolit, websterit, serpentinit dan piroksinit. Sedangkan untuk batuan mafik terdiri atas gabro, basalt, dolerite, mikrogabro, dan amfibolit. Untuk batuan sedimen pelagic tersusun oleh batugamping laut dalam dan sisipan rijang merah. Molasa Sulawesi yang berada di Sultra terdiri atas sedimen klastik dan sedimen karbonatan. Sedimen klastik dari molasa Sulawesi terdiri atas Formasi Langkowala dan Formasi Boepinang. Sementara sedimen karbonat yang berasosiasi dengan batupasir adalah formasi eomoiko.

Dari kompleks opiolit inilah yang menyebabkan Sultra memiliki cadangan nikel cukup besar. Proses pembentukan nikel di Sultra adalah batuan ultra mafik dari kompleks ofiolit Sultra, akibat perubahan iklim dan aktifitas air tanah yang kaya akan CO_2 maka menghasilkan pelapukan kimia. CO_2 yang berasal dari udara dan tumbuhan yang membusuk menguraikan mineral-mineral yang tidak stabil, seperti olivin dan piroksen yang terdapat pada batuan ultra mafik kompleks ofiolit Sultra. Pelapukan kimia pada batuan ultra mafik kompleks ofiolit Sultra menghasilkan Mg, Fe, Ni yang larut. Kondisi air tanah Sultra yang dangkal dengan banyaknya *shear* atau *joint* menjadi penyebab makin cepatnya proses pelarutan kimia (*leaching process*) yang pada akhirnya membentuk endapan nikel laterit Sultra yang cukup tebal. Di sisi lain, kondisi geologi Sultra juga rawan bencana alam. Bagian dari stuktur geologi ketika terjadi pergerakan lempeng tektonik akan menyebabkan sesar.

Sesar yang masih aktif hingga kini di daerah Sultra adalah Sesar Lawanopo, Sesar Kolaka, Sesar Matarombeo, dan sistem Sesar Konaweha inilah yang beresiko terjadinya longsor. Tumbukan lempeng tektonik juga menghasilkan morfologi daerah Sultra berupa pegunungan, perbukitan dan pedataran. Kondisi ini menyebabkan Sultra beresiko terjadinya longsor dan gempa. Selain itu, kondisi Provinsi Sultra yang memiliki banyak pulau dan pesisir yang juga berpotensi resiko gelombang ekstrim yang cukup besar.

Gambar 1.2. Peta Geologi Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber: Jurnal Geologi Kelautan, 2017

Selain itu, secara geografis Sultra terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara $02^{\circ}45'$ – $06^{\circ}15'$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}45'$ – $124^{\circ}30'$ Bujur Timur. Kondisi ini menyebabkan Sultra termasuk dalam zona campuran iklim monsun dan ekuatorial. Awal musim kemarau ditandai dengan jumlah curah hujan selama satu dasarian lebih kecil dari 50 mm, dan diikuti beberapa dasarian berikutnya secara berturut-turut. Permulaan awal musim bisa terjadi lebih awal (maju), sama, atau lebih lambat (mundur) dari normalnya. Curah hujan di Sultra cukup tinggi, sehingga sering terjadi banjir. Ada dua puncak musim hujan di Sultra, yaitu Februari dan Oktober.

Berdasarkan informasi dari BMKG berupa peta yang disampaikan dalam dokumen “Atlas Proyeksi Iklim Wilayah Sulawesi”, rata-rata di Sultra diproyeksikan naik $0,2^{\circ}\text{C}$

hingga 0,9°C di masa mendatang. Suhu di pantai barat akan naik lebih banyak daripada pantai timur. Suhu udara di Pulau Kabaena juga akan naik lebih tinggi dari Pulau Muna dan Buton. Diproyeksikan pada 2032 - 2040 juga, bahwa di masa mendatang ada kemungkinan musim kemarau menjadi lebih kering terutama di Kabupaten Konawe sebelah utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Muna. Pada musim hujan, akan ada kemungkinan meningkatnya curah hujan di Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Utara. Berkurangnya curah hujan disertai dengan peningkatan suhu udara akan membuat kekeringan yang lebih tinggi. Pada proyeksi Iklim Sulawesi 2032 - 2040, rata-rata curah hujan pada bulan Maret sampai dengan Mei meningkat antara 11 - 30%, khususnya di wilayah Kepulauan Buton dan wilayah Kepulauan Muna, serta sebagian wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Kolaka Timur). Sementara kondisi rata-rata curah hujan pada bulan Juni sampai Agustus berkurang antara 10 - 30% pada wilayah-wilayah tersebut. Keadaan rata-rata curah hujan pada bulan September sampai Desember di sebagian besar wilayah kepulauan dan sebagian wilayah daratan berkurang 10%, meskipun sebagian wilayah lainnya di daratan meningkat 11 - 20%. Kondisi perubahan suhu sebagian besar wilayah kepulauan dan sebagian wilayah daratan meningkat 0,76 - 0,85°C, serta sebagian wilayah daratan lainnya meningkat sebesar 0,1 - 0,75°C. Adanya perubahan iklim yang terjadi di Sultra menyebabkan:

1. Menurunnya produksi pertanian hingga gagal panen yang disebabkan oleh meningkatnya suhu udara, curah hujan ekstrem, dan kekeringan, serta perubahan pola musim dan angin kencang yang dapat merusak tanaman.
2. Menurunnya produksi ikan yang diakibatkan oleh ruaya ikan akibat kenaikan suhu air laut, perubahan pola musim (ENSO), serta rusaknya alat tangkap seperti kapal nelayan akibat diterjang angin kencang. Hal-hal tersebut menyulitkan nelayan untuk menangkap ikan serta membuat biaya produksi penangkapan ikan meningkat.
3. Kenaikan suhu udara dan perubahan pola musim yang dapat menimbulkan perubahan keanekaragaman hayati hingga menurunkan produksi kehutanan. Kekeringan dapat menyebabkan penurunan biomassa dan meningkatnya risiko kebakaran. Sebaliknya, curah hujan yang ekstrem juga dapat menyebabkan pohon tertentu gagal berbunga dan tentunya menurunkan produktivitasnya.
4. Kenaikan suhu udara rata-rata, khususnya pada musim kemarau menyebabkan bencana kekeringan dan risiko kebakaran. Di sisi lain, saat musim penghujan dimana frekuensi hujan ekstrem semakin meningkat, kemungkinan terjadinya banjir dan longsor juga meningkat. Secara historis, telah terjadi beberapa kali bencana banjir di Sultra yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian lainnya.

BAB II



Pembangunan Infrastruktur Jembatan Kuning Bungkutoko

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

BAB II

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

2.1. INDIKATOR EKONOMI MAKRO FUNDAMENTAL

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Sultra dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja positif. Salah satu yang dapat dijadikan indikator adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah dalam periode tertentu (Dornbrusch, 2005). PDRB Sultra menunjukkan pertumbuhan positif yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Sejak tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Sultra berada di kisaran 6% (yoy), capaian ini melebihi pertumbuhan nasional yang stagnan di level 5% (yoy). Tingginya pertumbuhan ekonomi Sultra dikarenakan masih besarnya kapasitas ekonomi Sultra yang dapat dioptimalkan.

Kekhawatiran terhadap dampak meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika dan Tiongkok pada perekonomian ternyata tidak berpengaruh pada perekonomian Sultra. Pertumbuhan ekonomi Sultra tahun 2019 sebesar 6,51% (yoy) meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang tumbuh 6,42% (yoy). Berdasarkan komponen pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh ekspor barang dan jasa (ekspor/impor dalam konsep PDRB/regional merupakan perdagangan yang dilakukan dengan entitas di luar provinsi termasuk luar negeri). Nilai ekspor Sultra tahun 2019 tercatat tumbuh sebesar 44,32%. Pertumbuhan ekspor didorong meningkatnya nilai ekspor besi dan baja, bijih, kerak, dan abu logam, serta buah-buahan. Secara berurutan pertumbuhan ekspor tertinggi dicapai oleh ekspor buah-buahan (460,79%), ekspor bijih, kerak, dan abu logam (90,63%), serta ekspor besi dan baja (72,02%). Namun demikian, ekspor besi dan baja memberikan andil terbesar dalam ekspor Sultra sebesar 55,83% dengan nilai US\$1.318,12 juta. Pertumbuhan nilai ekspor perlu mendapatkan catatan, dimana pendapatan dari ekspor (termasuk perdagangan antar pulau) harus dikompensasi dengan nilai impor yang lebih besar, sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah defisit perdagangan Sultra.

Penyumbang PDRB terbesar menurut pengeluaran selama 3 (tiga) tahun terakhir masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 49,09%, disusul

komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 39,40%, dan ekspor barang dan jasa sebesar 25,62%, serta pengeluaran konsumsi pemerintah 14,74% (Tabel 2.1). Pengeluaran

konsumsi rumah tangga baik dari sisi pertumbuhan maupun distribusi, mengalami penurunan. Hal ini kontras dengan pengeluaran per kapita Sultra yang meningkat, menjadi pertanda bahwa masyarakat Sultra menahan konsumsinya di tahun 2019.

Meskipun pembentukan modal tetap bruto memberikan kontribusi yang besar di tahun 2019, akan tetapi porsinya semakin mengecil seiring laju pertumbuhan sektor yang melambat. Peran pemerintah dalam perekonomian Sultra masih cukup signifikan, namun dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2019, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berkontribusi sebesar 14,74% turun dibandingkan dua tahun sebelumnya yang mencapai 14,80% (2017) dan 14,87% (2018). Penurunan pertumbuhan kontribusi Konsumsi Pemerintah ditengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sultra, bisa menjadi sinyal positif bahwa kondisi perekonomian Sultra berjalan baik dan mengedepankan sektor swasta sebagai penggerak perekonomian. Sebagaimana yang disampaikan Keynes dalam Nelson (2006) pemerintah berperan sebagai katalisator/fasilitator ketika sektor swasta tidak mampu menggerakkan perekonomian sebagaimana mestinya. Ketika sektor swasta sudah mampu menggerakkan perekonomian, maka pemerintah dapat mengurangi perannya.

Di sisi lapangan usaha, perekonomian Sultra bergantung pada 4 (empat) sektor, yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (23,73%), Pertambangan dan Penggalian (21,21%), Konstruksi (13,69%), dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,76%). Namun demikian, kontribusi pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap

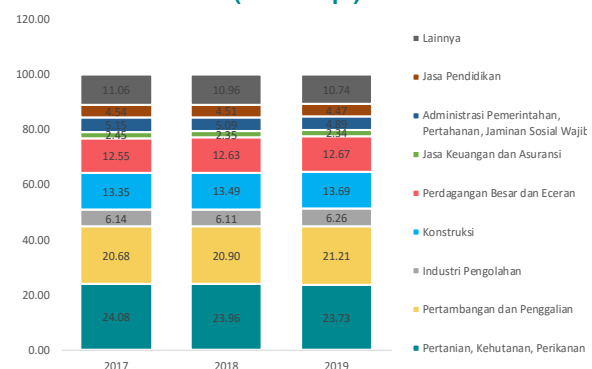
PDRB cenderung mengalami penurunan dari 24,08% di tahun 2017 menjadi 23,73 di tahun 2019. Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2019 juga mengalami perlambatan dari 6,37% (yoy) tahun 2018 menjadi 5,06% (yoy) di tahun

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran (Persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan			Distribusi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,12	6,17	6,06	49,61	49,34	49,09
Pengeluaran Konsumsi LNPR	9,69	8,91	9,85	1,02	1,03	1,06
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,26	4,92	5,96	14,80	14,87	14,74
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,99	5,68	5,30	39,73	39,72	39,40
Perubahan Inventori	-	-	-	1,26	0,15	-0,04
Ekspor Barang dan Jasa	23,15	101,85	44,32	13,45	21,69	26,85
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	29,10	51,54	33,68	19,87	26,80	31,10
PDRB	6,76	6,42	6,51	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Grafik 2.1 PDRB Sultra menurut Lapangan Usaha (triliun Rp.)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

2019. Sementara itu, sektor yang mengalami pertumbuhan yang paling tinggi di tahun 2019 adalah industri pengolahan (9,19%), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (8,24%), perdagangan besar dan eceran (7,73%) dan pertambangan dan penggalian (7,53%). Pertumbuhan Industri Pengolahan didorong oleh kebijakan pemerintah melarang ekspor bijih timah dan pemberian kemudahan pendirian *smelter* untuk pengolahan bijih timah. Perubahan ini menandakan adanya kecenderungan pergeseran perekonomian Sultra dari perekonomian berbasis pertanian menuju perekonomian berbasis manufaktur.

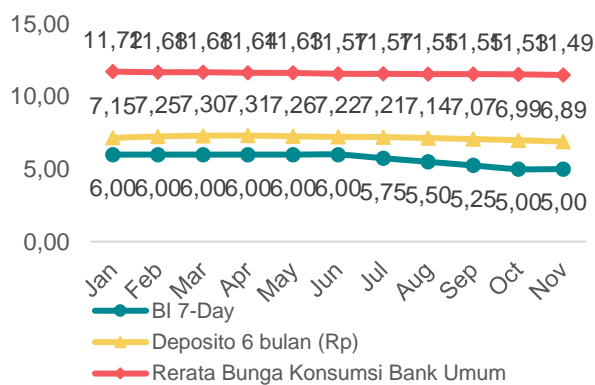
Meningkatnya PDRB Sultra secara agregat, juga meningkatkan pendapatan per kapita masyarakatnya. Pada tahun 2017, pendapatan per kapita masyarakat Sultra mencapai Rp41,27 juta, dan meningkat menjadi Rp47,79 juta. Namun demikian, bila mencermati rasio gini yang cukup tinggi di Sultra sebesar 0,393 pada tahun 2019, peningkatan pendapatan per kapita hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk (orang kaya), sementara sebagian besar penduduk (miskin) memperebutkan sebagian kecil pendapatan. Hal ini menjadi isu yang perlu dicari solusinya secara bersama untuk tetap mencapai pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan pemerataan ekonomi.

2.1.2. Suku Bunga

Ketidakpastian global dan meningkatnya tensi perang dagang mempengaruhi arah kebijakan ekonomi. Kedua hal ini menjadi beberapa pertimbangan dalam penentuan kebijakan moneter, salah satunya terkait suku bunga acuan (BI 7-Day RR) oleh Bank Indonesia. Sampai dengan triwulan II 2019, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga di posisi 6%. Memasuki Bulan Juli, bank sentral mengambil kebijakan

pelonggaran moneter (*quantitative easing*) dengan menurunkan suku bunga 25 basis poin. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tingkat 5%. Kebijakan untuk melakukan relaksasi terus diambil dengan menurunkan kembali suku bunga acuan sebanyak 3 kali, dan mempertahankan suku bunga di level 5%. Kebijakan menurunkan suku bunga acuan diikuti dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 1%. Untuk bank umum, GWM ditetapkan sebesar 5,5% dan bank syariah ditetapkan sebesar 4%. Kebijakan ini bertujuan untuk menambah likuiditas perbankan dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit. Transmisi

Grafik 2. 2 Rata-rata Tingkat Suku Bunga Bank Umum Secara Nasional (%) (per November 2019)



Sumber: OJK

kebijakan penurunan suku bunga acuan berlangsung lambat. Penyesuaian suku bunga yang cukup signifikan dilakukan untuk suku bunga pinjaman, sementara penurunan suku bunga kredit tidak signifikan. Penurunan suku bunga kredit konsumsi secara kumulatif tahun 2019 hanya turun sebesar 23 basis poin dibandingkan penurunan suku bunga deposito berjangka 6 bulan sebesar 26 basis poin (**Grafik 2.2**). Tidak proporsionalnya penurunan suku bunga pinjaman dan simpanan, mengerek *net interest margin* (NIM) lebih tinggi. Bila diawal tahun NIM perbankan sebesar 4.57%, maka per November 2019 menjadi 4.6%.

Net interest margin, merupakan biaya intermediasi perbankan yang dihitung berdasarkan selisih bunga yang dibayarkan debitur dengan bunga yang dibayarkan bank kepada penabung (Brock dan Suarez, 2000). NIM dapat menggambarkan kompetisi pasar dan risiko perbankan (Ho dan Saunders, 1981). Menurut Sidabalok

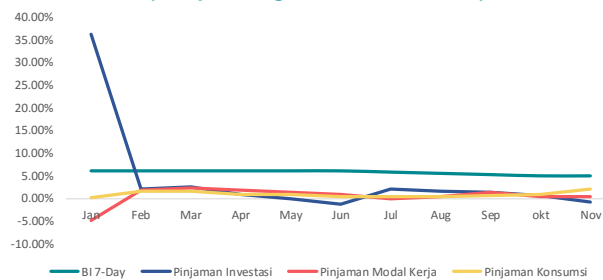
dan Viverita (2011) dari beberapa variabel penentu besarnya NIM (dominasi pasar, biaya operasional, sikap *risk aversion*, dan risiko kredit), dominasi pasar merupakan faktor utama tingginya NIM di Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya NIM sangat dipengaruhi motif keuntungan (laba) yang diinginkan perbankan.

Tingginya NIM berdampak pada tidak efektifnya fungsi intermediasi perbankan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah *outstanding* pinjaman (**Grafik 2.3**) yang cenderung tidak berubah meskipun bank sentral telah melakukan relaksasi bunga acuan. Rerata pertumbuhan *outstanding* pinjaman selama 2019 berkisar 0,52% - 0,77%, diluar pinjaman investasi di awal tahun

yang tumbuh 36.41% karena pengaruh apresiasi nilai rupiah terhadap dollar. Dengan tinggi NIM-nya, maka semakin tidak efisien bank sebagai lembaga intermediasi dan hal ini menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi (Levine, 1997).

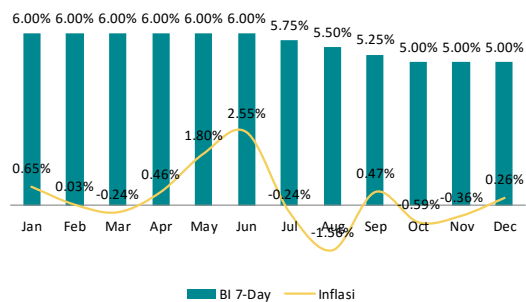
Peningkatan suku bunga acuan tidak berdampak pada inflasi di Sultra (**Grafik 2.4**). Selain karena faktor terukurnya peningkatan suku bunga yang diterapkan, inelastisnya tingkat bunga pinjaman terhadap suku bunga acuan menyebabkan perekonomian tidak mengalami kelebihan likuiditas. Sesuai dengan teori kuantitas uang yang diusung

Grafik 2. 3 Pertumbuhan Outstanding Pinjaman di Sultra (sampai dengan November 2019)



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2. 4 Perkembangan Suku Bunga Acuan dan Inflasi Sultra 2019



Sumber : BPS, Bank Indonesia

kalangan moneteris, jumlah uang beredar akan mempengaruhi harga suatu barang. Apabila jumlah uang di perekonomian meningkat, sementara produksi barang dan jasa tetap, maka harga-harga akan mengalami peningkatan. Pada titik ini peran bank sentral sangat penting dalam mengatur likuiditas pasar, salah satunya melalui kebijakan penentuan besaran tingkat bunga (Mankiw, 2009).

2.1.3. Inflasi

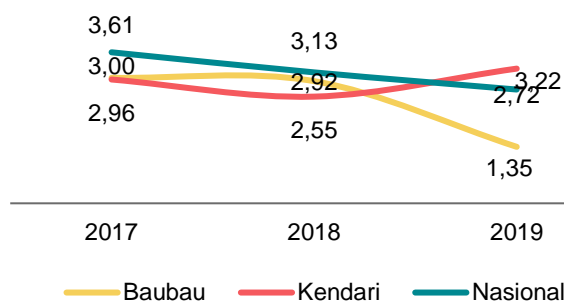
Inflasi adalah peningkatan rata-rata harga barang secara umum (Mankiw, 2009). Terdapat 2 (dua) kota yang menjadi representasi inflasi di Sultra, yakni Kota Kendari dan Kota Baubau. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan ukuran ekonomi kedua daerah yang menjadi penggerak utama perekonomian Sultra. Pada tahun 2019, tingkat inflasi di kedua kota dapat

dijaga di bawah sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah yakni sebesar 3,5% dengan deviasi sebesar 1% (PMK Nomor 124/PMK.010/2017). Inflasi di Kota Kendari tercatat sebesar 3,22% (yoy), sementara inflasi Kota Baubau sebesar 1,35% (yoy). Inflasi Kota Baubau tahun 2019 yang lebih rendah dibanding inflasi Kota Kendari, merupakan capaian tersendiri mengingat 2 tahun sebelumnya tingkat inflasi Kota Baubau selalu lebih tinggi dibanding inflasi Kota Kendari (**Grafik 2.5**).

Sebagai ibukota sekaligus kota terbesar di Sultra, inflasi Kota Kendari perlu mendapatkan perhatian khusus karena dampaknya yang dapat menyebar ke daerah lain di Sultra. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dapat disebabkan dua hal, yaitu dorongan biaya produksi (*cost push inflation*), dan adanya peningkatan permintaan (*demand pull inflation*) yang tidak diimbangi penambahan supply barang (Mishkin, 2012). Pada sisi penawaran, lonjakan harga dipengaruhi oleh terganggunya pasokan akibat kondisi alam (*cost push inflation*) sementara di sisi permintaan, peringatan hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru menyebabkan permintaan terhadap beberapa jenis barang meningkat yang tidak diimbangi tambahan pasokan. Kedua hal ini menyebabkan harga-harga barang mengalami kenaikan.

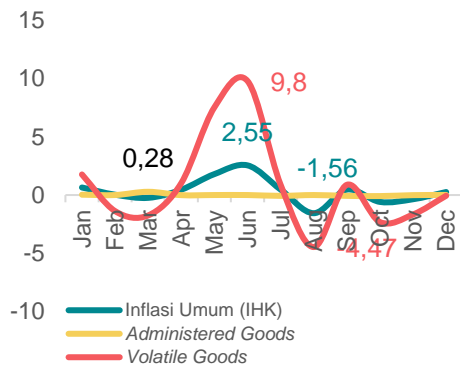
Sepanjang tahun 2019, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 2,55%, yang diikuti dengan deflasi yang cukup dalam di bulan Agustus sebesar 1,56%. Berdasarkan kelompok barang pembentuk inflasi, komponen *volatile goods*, terutama bahan makanan menjadi penggerak utama inflasi. Fluktuasi harga komponen *volatile goods* diawali dengan deflasi 1,75% atau terjadi penurunan indeks dari 138,07 pada Februari

Grafik 2.5 Perkembangan Inflasi Sultra dan Nasional (%)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Grafik 2. 6 Inflasi Kota Kendari Tahun 2019 berdasarkan Komponen Pembentuk (%;mtm)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (diolah)

berikutnya, Pemerintah menjaga harga dalam kondisi stabil dan akumulasi pergerakan harga *administered goods* sebesar 0,0058% (**Grafik 2.6**).

Inflasi bulan Juni 2019 didominasi pengeluaran bahan makanan dengan andil sebesar 2,52% dengan tingkat inflasi sebesar 9,80%, disusul komoditas makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (0,60%), sandang (0,52%), dan kesehatan (0,40%), sedangkan komponen pengeluaran lainnya cenderung stabil. Bila didedah lebih dalam, perayaan Idul Fitri menyumbang inflasi khususnya pada pengeluaran untuk pembelian sandang anak yang mencapai 0,83%, serta barang pribadi dan sandang lainnya sebesar 0,72%. Momen tahun ajaran baru juga berdampak pada peningkatan inflasi dengan andil sebesar 0,005%. Peningkatan harga hanya terjadi untuk subkelompok perlengkapan/peralatan pendidikan dengan inflasi sebesar 0,36%, sedangkan subkelompok pendidikan lainnya tidak mengalami perubahan. Sementara itu, efek tahun ajaran baru ditunjukkan dengan meningkatnya harga perlengkapan/peralatan pendidikan sebesar 0,36%. Selain terkait peningkatan permintaan, inflasi yang terjadi pada momen perayaan hari besar keagamaan maupun tahun ajaran baru juga disebabkan adanya ekspektasi inflasi yang lebih bersifat *forward looking* (Dornbusch & Fischer, 2005)

Dominannya kelompok bahan makanan menyumbang inflasi Kota Kendari disebabkan curah hujan yang tinggi dan angin kencang di bulan Juni. Gelombang tinggi yang melanda perairan di sekitar Kendari (Laut Baubau, Wakatobi, Menuui-Kendari, Laut Banda Teluk Tolo, dan perairan Kepulauan Banggai) mencapai 1,5 meter sampai 2,5 meter memicu peningkatan harga ikan segar mencapai 19,08% (mtm). Dampak ikutan dari kondisi ini adalah meningkatnya harga ikan diawetkan yang mencapai 13,08% (mtm). Kondisi cuaca juga turut mempengaruhi harga sayur-sayuran di Kota Kendari yang mengalami peningkatan drastis mencapai 24,71% (mtm). Hal ini

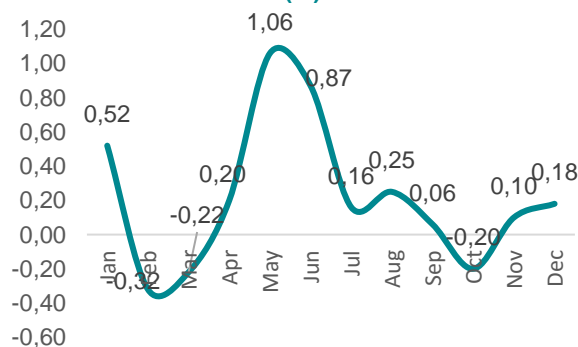
2019 menjadi 135,66 pada Maret 2019. Harga-harga pada komponen *volatile goods* perlahan bergerak naik dan mencapai puncaknya pada akhir triwulan ke-2 sebesar 9,8%. Pada periode berikutnya, pengeluaran *volatile goods* mengalami deflasi terdalam sepanjang 2019 yakni sebesar 4,47%. Komponen *administered goods* sepanjang 2019 relatif stabil. Meskipun pada awal tahun harga BBM mengalami kenaikan yang menyebabkan terjadi inflasi sebesar 0,28%. Pada periode

disebabkan intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan 7 (tujuh) kabupaten/kota di Sultra mengalami bencana banjir, termasuk sentra holtikultura di Sultra.

Beberapa sub komponen bahan makanan mengalami deflasi pada periode tersebut, namun belum cukup kuat menahan tekanan inflasi subkelompok bahan makanan lainnya. Produk daging dan hasil-hasilnya pada bulan Juni 2019 mengalami penurunan harga sebesar 2,2% (mtm). Selain komoditas daging, bahan makanan yang juga mengalami deflasi adalah bumbu-bumbuan sebesar 0,98% (mtm) dan komoditas lemak dan minyak sebesar 0,11% (mtm). Turunnya harga produk daging, bumbu, dan komoditas lemak dan minyak memberikan sinyal positif bahwa pemerintah cukup siap mengantisipasi meningkatnya permintaan bahan makanan menjelang hari raya idul fitri.

Perubahan harga tidak saja terjadi di perkotaan seperti yang digambarkan tingkat inflasi, akan tetapi juga di pedesaan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan harga, diperlukan indikator tambahan berupa indeks yang dibayar petani (Ib). Indeks harga yang dibayar petani merupakan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi (www.sirusa.bps.go.id). Dari pengertian ini, indeks yang dibayar petani memberikan dua manfaat. Pertama, memberikan gambaran inflasi khususnya inflasi yang terjadi di daerah pedesaan. Kedua, dapat menjadi petunjuk/sinyal bagi penyebab inflasi yang didorong oleh peningkatan biaya.

Grafik 2. 7 Perkembangan Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Peningkatan indeks pada bulan Mei disumbang dari peningkatan di subsektor perikanan budidaya (1,55%), perikanan (1,44%) dan perikanan tangkap sebesar 1,39%.

Tabel 2. 2 IHK dan Inflasi Kota Kendari Sub Kelompok Bahan Makanan bulan Juni 2019 (2012=100,00)

No	Kelompok/Sub Kelompok	IHK	Inflasi
Bahan Makanan			
1	Padi-padian, Umbi-umbian dan hasil lainnya	131,88	0,30
2	Daging dan hasil-hasilnya	124,66	-2,20
3	Ikan Segar	187,40	19,08
4	Ikan Diawetkan	194,21	13,08
5	Telur, Susu, dan Hasil-hasilnya	136,14	0,21
6	Sayur-sayuran	206,43	24,71
7	Kacang-kacangan	110,91	3,90
8	Buah-buahan	144,82	1,42
9	Bumbu-bumbuan	176,80	-0,98
10	Lemak dan Minyak	129,82	-0,11
11	Bahan Makanan Lainnya	128,39	0,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Penurunan indeks yang tajam pada bulan Februari didorong turunnya harga-harga yang harus dibayar oleh petani/nelayan (masyarakat desa) di semua subsektor.

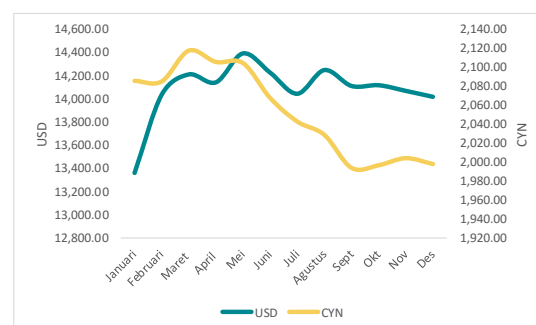
Selain indeks yang dibayar petani, indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan perubahan harga adalah perubahan pada Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) yang menggambarkan perubahan nilai konsumsi rumah tangga wilayah perdesaan. Pada bulan Desember 2019, inflasi perdesaan di Sultra mencapai 0,19 dengan peningkatan pengeluaran terbesar untuk komoditas sandang sebesar 0,36 disusul produk makanan jadi sebesar 0,32, dan pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi sebesar 0,31. Secara nasional terdapat 19 (sembilan belas) provinsi yang mengalami inflasi perdesaan dan 14 (empat belas) provinsi lain mengalami deflasi perdesaan. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 1,06%, disusul oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,81%, dan Provinsi Bangka Belitung sebesar 0,74%. Sementara itu, provinsi yang mengalami deflasi terdalam adalah Provinsi Gorontalo sebesar 3,30%, Provinsi Sulawesi Utara 3,29%, dan Provinsi Aceh sebesar 0,60%.

Fluktuasi harga yang digambarkan dari indeks yang dibayar petani memiliki kemiripan dengan pola inflasi perkotaan. Yang berbeda dari keduanya adalah terkait waktu. Hal ini menunjukkan benang merah antara perubahan indeks yang dibayar petani dengan inflasi. Sebagai salah satu masukan/input dalam proses produksi, peningkatan indeks yang dibayar petani mendorong harga barang yang diproduksi di pedesaan seperti sayur sayuran, ikan, serta produk pertanian dan peternakan lainnya juga mengalami kenaikan. Dengan andil yang sangat besar, perubahan harga faktor produksi bahan makanan, mendorong peningkatan biaya produksi yang menyebabkan terjadinya inflasi (*cost push inflation*).

2.1.4. Nilai Tukar

Nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing sepanjang tahun 2019 sangat berfluktuasi. Nilai tukar Rupiah (IDR) terhadap Dolar Amerika (USD) bertahan di sekitar Rp14.000,- per 1 USD. Di awal tahun, rupiah terdepresiasi cukup dalam dari Rp13.358,- per 1 USD pada Januari menjadi Rp14.211,- per 1 USD pada Maret. Tekanan terhadap rupiah terus berlangsung dan mencapai puncaknya pada bulan Mei 2019, dengan kurs Rp14.392,- untuk 1 USD. Kondisi ini terus bertahan di kisaran Rp14.000,- sampai dengan penutupan perdagangan akhir

Grafik 2. 8 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Beberapa Mata Uang Asing (Kurs Tengah BI)



Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Sultra

tahun. Depresiasi yang dalam pada bulan Mei 2019, disebabkan kekhawatiran pasar terhadap aksi demo yang berlangsung ricuh.

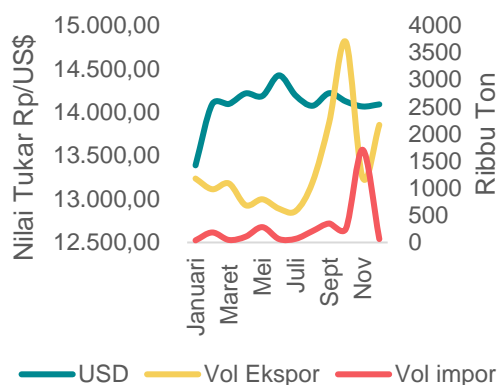
Berbeda dengan Dollar Amerika, nilai tukar Rupiah terhadap China Yuan (CYN) mengalami penguatan sepanjang 2019. Bila di bulan Januari CYN diperdagangkan sebesar Rp2.806,- per China Yuan, maka di perdagangan akhir tahun 2019 kurs Rupiah terhadap China Yuan ditutup di level Rp1.997,56 untuk rata-rata perdagangan Desember. Pelemahan mata uang Yuan bersifat global, tidak saja terhadap mata uang Rupiah. Hal ini disebabkan kebijakan devaluasi mata uang oleh pemerintah Tiongkok sebagai bagian strategi menghadapi perang dagang dengan Amerika.

Dampak fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap sejumlah mata uang asing terutama terhadap dolar Amerika, menyebabkan cadangan devisa negara mengalami penurunan khususnya pada bulan Mei. Pada bulan Mei cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US\$120,3 miliar turun sebesar US\$4.2 miliar dibanding posisi Maret 2019.

Namun demikian, dengan kondisi nilai tukar yang relatif stabil dikisaran Rp14.000,- sampai dengan akhir tahun, cadangan devisa meningkat hingga mencapai US\$129,18 miliar di Desember 2019. Jumlah cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor, dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor (www.bi.go.id).

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang asing tidak terlalu berpengaruh terhadap transaksi perdagangan Sultra. Penguatan nilai mata uang dolar terhadap rupiah tidak berdampak pada meningkatnya volume ekspor Sultra (**Grafik 2.9**). Hal ini mengingat size transaksi perdagangan antara Sultra dan Amerika Serikat relatif kecil. Dampak perubahan nilai tukar lebih dirasakan dampaknya apabila terjadi perubahan nilai tukar rupiah terhadap yuan (**Grafik 2.10**). Sebagai mitra dagang utama Sultra, nilai ekspor ke Tiongkok mencapai 90%. Komoditas utama yang menjadi primadona ekspor Sultra adalah besi dan baja, bijih, kerak, dan abu logam, serta ikan dan udang.

Grafik 2.9 Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Vol Perdagangan



Sumber: BPS, BI Sulawesi Tenggara

Disamping terkait nilai tukar, faktor yang mempengaruhi kinerja perdagangan Sultra adalah meningkatnya permintaan barang, fluktuasi harga komoditas, dan faktor *seasonal*. Sebagai daerah penghasil ferronikel terbesar di Indonesia, meningkatnya permintaan ferronikel oleh Tiongkok menyebabkan nilai ekspor Sultra mengalami peningkatan sebesar 108.89% . Namun capaian ini terkompensasi dengan menurunnya kinerja ekspor di bulan November sebesar 50.34%. Di sisi impor, fluktuasi nilai tukar juga tidak berpengaruh signifikan terhadap volume impor Sultra. Peningkatan nilai impor lebih banyak disebabkan faktor *seasonal* yakni adanya pergantian tahun dan perayaan hari besar keagamaan.

2.2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

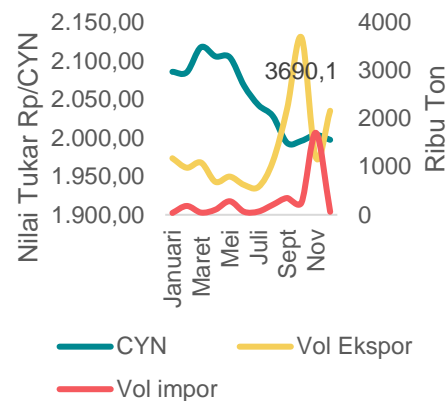
Pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang baik bila disertai dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemerataan pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Ketimpangan.

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut United Nation Development Program (UNDP), pembangunan manusia merupakan sebuah proses perluasan pilihan masyarakat. Terdapat tiga pilihan paling penting yang perlu diambil manusia, yakni berkaitan dengan pilihan memiliki umur panjang dan hidup sehat, memiliki pendidikan, dan menikmati hidup layak. Untuk mengukur sejauh mana tingkat pembangunan manusia, UNDP mengembangkan sebuah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau The Human Development Index (HDI) yang merangkum sejumlah indikator kinerja sosial kedalam sebuah indeks komposit yang terdiri atas tiga dimensi, *longevity* (*proxy* dari kesehatan dan gizi), pendidikan, dan standar hidup layak (Nafziger, 2006).

Tren IPM Sultra mengalami peningkatan dari 65,99 di tahun 2010 menjadi 71,20 di tahun 2019 (**Tabel 2.3**). IPM Sultra pada tahun 2019 meningkat 0,59 poin dari tahun 2018 yang sebesar 70,61. IPM Sultra mendekati capaian IPM Nasional yang sebesar 71,92. Di wilayah Sulawesi, IPM Sultra berada di peringkat ketiga di bawah Provinsi

Grafik 2. 10 Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Vol Perdagangan



Sumber: BPS, BI Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, secara nasional IPM Sultra tahun 2019 berada di peringkat 19 dimana posisi ini berlangsung sejak tahun 2013. Sebelum tahun 2013, Sultra berada di peringkat 16. Hal ini berarti, meskipun terjadi peningkatan IPM akan tetapi peningkatannya di bawah provinsi lain di Indonesia.

Secara rata-rata, IPM kabupaten/kota di Sultra memiliki nilai IPM di bawah 70 dengan IPM tertinggi berada di Kota Kendari (82,86) disusul Kota Baubau (75,21) IPM terendah berada di Kabupaten Buton Tengah (64,06). Tingginya IPM Kota Kendari dan Kota Baubau disokong oleh tingginya Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah, dan pengeluaran per kapita. Angka harapan hidup di Sultra setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 AHH Sultra sebesar 70,97 meningkat dari tahun 2018 sebesar 70,72. Hal ini berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2019, memiliki harapan untuk memiliki umur yang lebih panjang 3 bulan. Angka harapan hidup tertinggi anak-anak yang lahir tahun 2019 di Sultra berada di Kota Kendari 73,52 tahun, diikuti Kota Baubau 70,95 tahun. Sementara itu, daerah dengan AHH terendah adalah di Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan (67,50 tahun).

Di sisi pendidikan, dari dua dimensi yang diukur, keduanya mengalami peningkatan (**Tabel 2.3**). Harapan Lama Sekolah bagi anak yang lahir ditahun 2019 meningkat 0,02 tahun dari 13,53 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah mengalami peningkatan. Dimensi lain berupa rata-rata lama sekolah (RLS) naik 0,22 dari 8,69 tahun menjadi 8,99 tahun. Kedua indikator ini menandakan fasilitas pendidikan penduduk di Sultra semakin baik karena dapat memberikan akses yang lebih lama bagi penduduknya untuk meningkatkan pengetahuannya. RLS tingkat kabupaten/kota paling tinggi dicapai di Kota Kendari dengan lama waktu sekolah 11,94 (kelas XI) dengan harapan lama sekolah 16,28 tahun, dan disusul Kota Baubau 10,37 (kelas X) dengan harapan lama sekolah 14,81 tahun. Capaian kedua kota ini mendekati target pemerintah dalam program wajib belajar 12 tahun, namun kondisi berbeda terjadi di kabupaten lainnya. RLS terendah di Sultra berada di Kabupaten Muna Barat dengan lama waktu sekolah hanya 6,77 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP, sementara RLS kabupaten lainnya berkisar 7 sampai dengan 9 tahun.

Pada dimensi pengeluaran per kapita, penduduk Kota Kendari di tahun 2019 merupakan penduduk dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih besar dengan rata-rata per kapita yang disesuaikan sebesar Rp14,4 juta meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,17 juta. Peningkatan yang sama juga dialami di seluruh kabupaten/kota di Sultra. Sebagai indikator daya beli, peningkatan pengeluaran per kapita menggambarkan bahwa kesejahteraan penduduk Sultra semakin meningkat.

Tabel 2. 1 Perkembangan IPM, AHH, HLS, RLS, dan PPP Sultra

Tahun	IPM	AHH	HLS	RLS	PPP
2014	67.55	70.28	12.78	8.02	8,555
2015	68.75	70.44	13.07	8.18	8,697
2016	69.31	70.46	13.24	8.32	8,871
2017	69.86	70.47	13.36	8.46	9,094
2018	70.61	70.72	13.53	8.69	9,262
2019	71.20	70.97	13.55	8.91	9,436

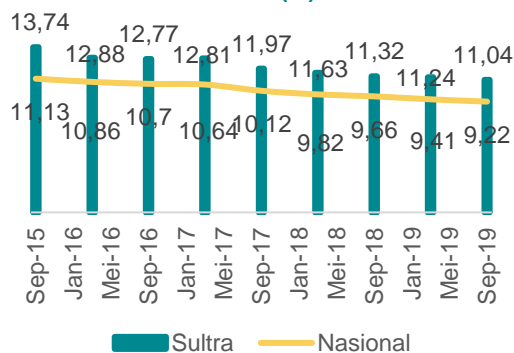
AHH, HLS, dan RLS dalam satuan tahun, PPP dalam ribu rupiah

Sumber: BPS Sultra

2.2.2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan lingkup Sultra dari tahun ke tahun mengalami penurunan sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan secara nasional. Penurunan angka kemiskinan Sultra dalam lima tahun sejak tahun 2015 rata-rata 1,70%, angka ini tidak berbeda jauh dengan rata-rata penurunan angka kemiskinan nasional sebesar 1,73%. Per September 2019, jumlah penduduk miskin sebanyak 299.970 jiwa atau sekitar 11,04% dari total penduduk Sultra (**Grafik 2.11**). Secara nasional, persentase penduduk miskin di Sultra

Grafik 2. 11 Persentase Penduduk Miskin Sultra (%)



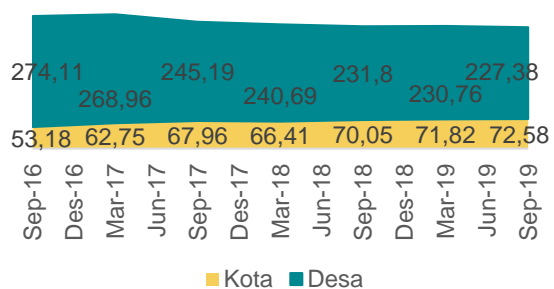
Sumber: BPS Sultra

Sultra, sementara sisanya sebesar 72.58 ribu jiwa (24.20%) berada di perkotaan (**Grafik 2.12**). Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan cenderung bertambah banyak, sedangkan jumlah penduduk miskin di desa justru semakin berkurang. Kondisi ini sejalan dengan tingkat pengangguran perkotaan yang semakin

lebih besar dibanding penduduk miskin nasional yang berjumlah 9,22% atau sebesar 24,8 juta jiwa. Penduduk miskin Sultra menyumbang 1,2% dari penduduk miskin di Indonesia.

Berdasarkan sebarannya, penduduk miskin mayoritas berada di wilayah pedesaan yakni sebesar 227,38 ribu jiwa atau 75,80% dari total penduduk miskin di

Grafik 2. 12 Perkembangan Angka Kemiskinan Sultra Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal (ribu jiwa)



Sumber: BPS Sultra

bertambah sementara di sisi lain, pengangguran di pedesaan mengalami penurunan.

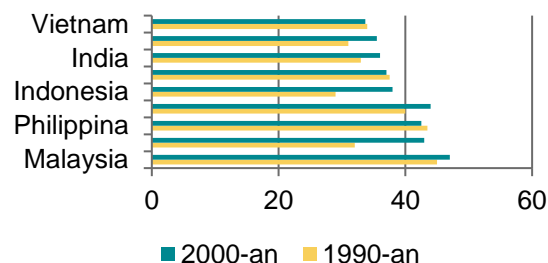
Meskipun angka kemiskinan pedesaan mengalami penurunan, namun dari sisi kedalaman (P_1) maupun keparahannya (P_2) kemiskinan di pedesaan mengalami peningkatan. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan pedesaan Sultra lebih tinggi dibanding perkotaan. Pada September 2019, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2,736 meningkat dari sebelumnya 2,605 di September 2018. Kondisi ini menggambarkan semakin banyaknya kebutuhan dasar yang tidak dapat dipenuhi oleh orang miskin. Hal ini semakin kompleks, mengingat tingkat pengeluaran di antara orang miskin semakin melebar/senjang (indeks keparahan September 2019 sebesar 0,594). Situasi ini menandakan bahwa penduduk miskin yang tersisa adalah penduduk miskin yang tingkat kemiskinannya sangat parah. Hal ini berimplikasi pada usaha pengentasan kemiskinan yang membutuhkan usaha yang lebih maksimal.

2.2.3. Tingkat Ketimpangan (*Rasio Gini*)

Tingkat ketimpangan di Indonesia pada tahun 2000-an berada di kisaran angka 0,31, perlahan melonjak menjadi 0,38 di tahun 2010. Kecepatan peningkatan angka ketimpangan di Indonesia, menurut Bank Dunia merupakan salah satu yang tercepat di negara-negara kawasan Asia Timur (**Grafik 2.13**). Data Maret 2015 menunjukkan ketimpangan pendapatan berada pada angka 0,41 meningkat 0,11 poin dalam waktu dua dekade (World Bank, 2016). Pada September 2019, rasio gini nasional mengalami perbaikan menjadi sebesar 0,380. Angka ini menurun 0,002 dibanding data per Maret 2019 yang sebesar 0,382. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingginya ketimpangan didominasi ketimpangan yang terjadi di DI Yogyakarta (0,428), Gorontalo (0,410), Jawa Barat (0,398), Sulawesi Tenggara (0,393), DKI Jakarta (0,391) dan Papua (0,391).

Ketimpangan ekonomi Sultra berada di atas ketimpangan nasional dalam beberapa tahun kebelakang. Pada September 2015, rasio gini Sultra berada pada level 0,381, per Maret 2018 rasio gini Sultra melebar di level 0,409. Angka ini merupakan level tertinggi sepanjang 2015 - 2019. Perkembangan rasio gini pada tahun 2019 (0,393) cenderung mengalami perbaikan, namun masih berada di atas rasio gini September 2015 (**Grafik 2.14**). Berdasarkan data rasio gini 2018 (data per kabupaten 2019 belum terbit), tingkat ketimpangan tertinggi berada di Kabupaten Buton Tengah sebesar 0,508, disusul Kota Baubau 0,452. Tingkat

Grafik 2. 13 Perkembangan Ketimpangan di Asia Timur 1990-an dan 2000-an



Sumber: Kanbur, et. al (2014) dalam World Bank (2016)

ketimpangan terendah terjadi di Kabupaten Buton Selatan sebesar 0,322 dan Kabupaten Kolaka Utara sebesar 0,328.

Ketimpangan ekonomi menggambarkan tidak meratanya distribusi pendapatan antar masyarakat. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah perbedaan kepemilikan faktor produksi. Kepemilikan faktor produksi terkait dengan “nasib” dan akses terhadap faktor-faktor yang mendukung pemerataan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan aksesibilitas keuangan. Ketimpangan menjadi tidak adil apabila disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali individu (Bank Dunia, 2015). Kondisi keluarga, lingkungan, sumber daya alam adalah faktor yang berada di luar kendali manusia. Menurut Rawls (1971) dalam Todaro (2015), seseorang tidak dapat memilih untuk dilahirkan di keluarga mana, seandainya seseorang dapat memilih, maka mereka akan memilih lahir dari keluarga yang mampu.

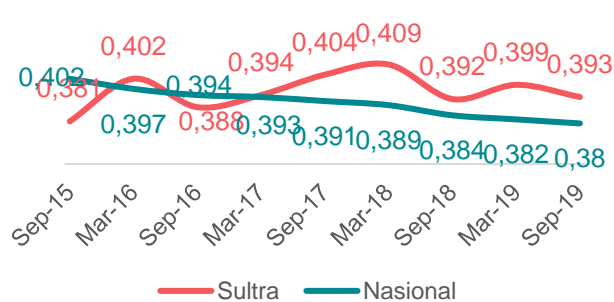
Tingkat ketimpangan yang tinggi berhubungan erat dengan pergeseran basis perekonomian. Menurut Kuznet (1995) penyebab umum ketimpangan adalah konsentrasi tabungan kelompok kaya dan pergeseran sektor perekonomian dari pertanian ke industri. Transformasi struktur perekonomian dari basis pertanian menjadi basis industri, akan meningkatkan pendapatan nasional di fase awal disertai dengan peningkatan ketimpangan. Sebagian pihak lain melihat hubungan pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi sebagai *trade-off* (Okun, 1975) dan menganggap ketimpangan merupakan *opportunity cost* yang harus ditanggung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Krongkaew dan Kakwani, 2003).

Merujuk pada komposisi PDRB Sultra berdasarkan lapangan usaha, tampaknya terdapat kesamaan dengan beberapa pendapat yang melihat adanya hubungan ketimpangan dan pergeseran basis perekonomian.

Pertumbuhan dan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan terhadap PDRB mengalami penurunan, sementara sektor Pertambangan dan Penggalan serta Industri Pengolahan meningkat. Ini merupakan salah satu indikator adanya pergeseran basis perekonomian. Pada titik ini, pemerintah daerah perlu mengantisipasi lebih jauh dampak pergeseran basis perekonomian melalui perencanaan pembangunan yang berkesinambungan bersamaan dengan usaha penyediaan akses/fasilitas yang sama bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan produktifitasnya.

Grafik 2. 14 Perkembangan Rasio Gini Sultra



Sumber: BPS Sultra

2.2.4. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Saat ini penduduk Sultra diperkirakan mencapai 2,6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 60% merupakan penduduk produktif. Per Agustus 2019 terdapat 1,8 juta jiwa yang tergolong ke dalam penduduk usia kerja. Jumlah angkatan kerja Sultra sebanyak 1,26 juta jiwa, bertambah 15.063 orang (1,215). Sebanyak 1,21 juta angkatan kerja telah memperoleh pekerjaan, sementara sisanya sebanyak 3,6% menganggur (**Tabel 2.4**). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2019 meningkat 0,33% bila dibandingkan Agustus 2018 yang sebesar 3,26%. Penambahan jumlah pengangguran lebih sedikit (4.568 orang) dibanding penambahan penduduk yang bekerja (10.495 orang). Pada bulan Agustus 2019, sebanyak 62,62% penduduk bekerja di sektor informal, naik 0,37% dibanding Agustus 2018. Dari sisi jam kerja, per Agustus 2019, 37,05% penduduk bekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam seminggu) yang mencakup 8,55% setengah penganggur, dan 28,50% bekerja paruh waktu.

Berdasarkan tempat tinggal, pengangguran terbanyak di Sultra berada di daerah perkotaan. Pada tahun 2019, jumlah pengangguran perkotaan sebanyak 5,07% dari angkatan kerja perkotaan, sementara di pedesaan hanya sebesar 1,85%. Angka kemiskinan di perkotaan cenderung mengalami peningkatan, sementara di pedesaan justru mengalami penurunan. Berdasarkan kabupaten/kota, TPT tertinggi berada di Kota Kendari tahun 2018 (data 2019 belum terbit) sebanyak 6,04, disusul Kota Baubau. Hal ini mengkonfirmasi data TPT berdasarkan tempat tinggal yang lebih banyak berada di perkotaan. Beberapa faktor bisa menjadi penyebab hal ini, salah satunya terkait kesenjangan kemampuan yang dimiliki pencari kerja dengan kriteria lowongan kerja yang ada. Sebagaimana survei Bank Dunia (2015) terdapat kesenjangan antara skill yang dimiliki oleh pencari kerja dengan pemberi kerja. Selain kemampuan dasar, kemampuan bahasa asing dan komputer menjadi kompetensi yang perlu ditingkatkan oleh pencari kerja.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja, yakni sebanyak 37,1%. Sektor lain yang juga

Tabel 2.4. Kondisi Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Aug-19	Feb-19	Aug-18	Feb-18	Aug-17	Feb-17
Penduduk Usia Kerja	1,828,884	1,810,345	1,788,875	1,768,949	1,747,544	1,726,913
Angkatan Kerja	1,263,275	1,296,494	1,248,212	1,286,623	1,200,605	1,261,448
Bekerja	1,217,983	1,258,102	1,207,488	1,250,729	1,160,974	1,221,884
Pengangguran	45,292	38,392	40,724	35,894	39,631	39,564
Bukan Angkatan Kerja	565,609	513,851	540,663	482,326	546,939	465,465
Sekolah	158,091	167,054	165,099	158,693	162,205	148,879
Mengurus Rumah Tangga	351,655	298,083	318,807	281,595	331,001	265,906
Lainnya	55,863	48,714	56,757	42,038	53,733	50,680
TPAK (%)	69,07	71,62	69,78	72,73	68,7	73,05
TPT (%)	3,59	2,96	3,26	2,79	3,30	3,14

Sumber: BPS

menampung cukup banyak tenaga kerja adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor sebanyak 17,12%. Sementara itu, sektor yang mengalami pertumbuhan pesat di 2019 yakni Industri Pengolahan, hanya menyerap tenaga kerja sebesar 9,74%. Pada Februari tahun 2019 sektor yang memiliki pertumbuhan kontribusi daya serap pegawai paling tinggi adalah sektor Pengadaan

Listrik, dan Gas dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang yakni sebesar 11%. Serapan Industri Pengolahan semestinya lebih ditingkatkan lagi karena tingginya pertumbuhan sektoral. Hal ini perlu didorong mengingat pertumbuhan kontribusi sektor pertanian (sektor yang banyak menyerap tenaga kerja) terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan, sehingga dapat menyebabkan bertambahnya tingkat ketimpangan di Sultra.

Tingkat pengangguran yang tinggi, berkaitan erat dengan tingginya tingkat kriminalitas. Studi yang dilakukan Becker (1968) dalam Ha (2019) menyimpulkan adanya indikasi tingginya pengangguran dengan tingkat kriminalitas. Semakin tinggi tingkat pengangguran semakin tinggi tingkat kriminalitas. Bila mencermati kondisi Sultra, hipotesa tersebut tidak dapat sepenuhnya terbukti. Sebagai contoh, pada tahun 2018 TPT Kota Kendari sejumlah 6,04% dari angkatan kerja tertinggi se-Sultra, dan pada saat yang sama jumlah kejahatan yang dilaporkan juga tertinggi di Sultra sebanyak 981. Namun di daerah lain, seperti Kabupaten Bombana dengan TPT yang hanya sebesar 0,70 (2018) memiliki jumlah kejahatan sebanyak 134, lebih tinggi dibanding Kabupaten Kolaka Timur yang memiliki TPT 2,76%, akan tetapi jumlah kejahatan hanya 38 kasus.

2.3. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL

Visi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah “*Terwujudnya Sulawesi Tenggara Yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermanfaat*”. Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang akan dicapai, yakni (1) meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa; (2) memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan investasi; (3) mendorong birokrasi pemerintah yang modern, tata kelola pemerintah desa yang baik (*good village governance*) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan; dan (4) meningkatkan konektivitas dan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi.

Dari sisi ekonomi, beberapa indikator ekonomi makro dapat menjadi tolok ukur tercapainya visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (**Tabel 2.5**). Pada indikator pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara lebih tinggi (6,51%) dibanding pertumbuhan ekonomi nasional (5,02%). Meskipun capaian pertumbuhan berada di bawah target pertumbuhan ekonomi dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebesar 6,6% - 7,0%, namun capaian ini mendekati target yang ditetapkan. Selain pertumbuhan ekonomi, asumsi/target ekonomi yang ditetapkan mencapai target.

Kemiskinan, gini rasio, konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor komoditas tercapai sesuai target. Sementara itu, indikator pengangguran dan inflasi tidak tercapai.

Pada tahun 2018, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 6,37%, namun pada tahun 2019 pertumbuhan sektor ini hanya sebesar 5,06%. Hal ini patut menjadi perhatian mengingat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki andil terbesar dalam PDRB Sultra dan juga merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Kondisi ini dapat berdampak pada peningkatan ketimpangan bila pertumbuhan yang signifikan di industri pengolahan dan pertambangan tidak diiringi oleh mobilitas tenaga kerja dari bidang agraris menuju industri manufaktur.

Terhambatnya mobilitas sangat erat kaitannya dengan perbedaan kompetensi antar sektor. Pekerjaan di sektor manufaktur membutuhkan pegawai dengan kompetensi yang lebih rendah dibanding kompetensi sektor pertanian. Hal ini dikarenakan industri manufaktur mengandalkan teknologi yang membutuhkan kompetensi yang lebih tinggi. Meskipun rata-rata lama sekolah Sultra mengalami peningkatan, namun justru jumlah pengangguran terbesar adalah penduduk yang menempuh pendidikan menengah atas dan tinggi. Hal ini menjadi indikasi bahwa tingginya pendidikan tidak sejalan dengan tingginya kompetensi, sebagaimana yang disampaikan Stiglitz (1973) bahwa ijazah tidak mencerminkan kompetensi. Kondisi ini perlu diantisipasi Pemerintah Daerah melalui penambahan pelatihan/pendidikan yang memungkinkan kompetensi pencari kerja sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pemberi kerja.

Terkait tingkat inflasi Sultra yang tidak sesuai target, semestinya hal ini dapat disikapi dengan lebih baik. Fluktuasi harga di Sultra dalam 3 (tiga) tahun terakhir, membentuk pola yang sama setiap tahunnya, dimana terjadi inflasi tinggi di bulan Juni dan diikuti deflasi yang dalam pada bulan Agustus. Komoditas dan

penyebab inflasi pun dapat dipetakan terkait dengan terbatasnya ketersediaan bahan pangan akibat kondisi cuaca. Dengan pola dan pemetaan atas penyebab dan produk yang mengalami inflasi, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah antisipasi inflasi.

Beberapa langkah dapat ditempuh pemerintah, antara lain dalam jangka pendek pemerintah perlu menyiapkan pasokan bahan makanan yang memadai menjelang masuknya musim penghujan dan peringatan hari besar keagamaan. Sedangkan dalam jangka menengah, pemerintah perlu merubah pola tanam hortikultura. Sementara itu, dalam jangka panjang perlu melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong

Tabel 2.5 Perbandingan Asumsi KUA Provinsi Sultra dan Realisasi

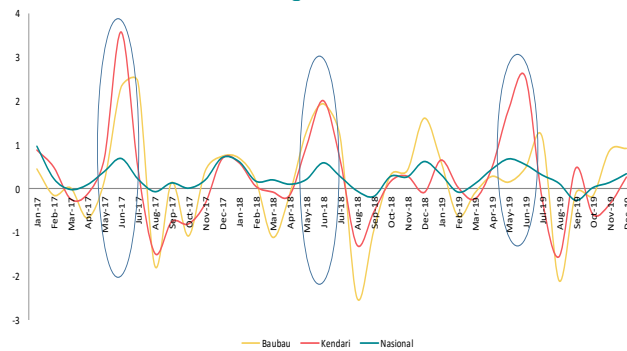
(dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Indikator Ekonomi	Asumsi KUA 2019	2018	2019
Pertumbuhan Ekonomi	6,6% - 7,0%	6,42%	6,51%
Kemiskinan	Turun	11,32%	11,04%
Pengangguran	Turun	3,26	3,59
Gini Rasio	Turun	0,399	0,393
Konsumsi Rumah Tangga	Naik	41,77	44,30
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan:	Naik	20,55	21,59
Investasi	Naik	36,80	38,76
ekspor komoditas	Naik	17,75	25,62
Inflasi	2,1% - 2,5%	2,55%*	3,22%*

Sumber: KUA dan BPS

keanekaragaman pangan tidak bergantung pada produk perikanan tangkap sebagai sumber protein. Dengan pemetaan ini, Pemerintah dapat mengantisipasi lonjakan inflasi pada bulan tersebut dengan menyiapkan pasokan yang cukup dan perlunya edukasi pola konsumsi masyarakat serta perubahan pola tanam.

Grafik 2. 15 Perkembangan Inflasi Sultra dan Nasional



Sumber: BPS Sultra

Salah satu misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat (ekonomi, kesehatan dan pendidikan). Salah satu ukuran yang dapat digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian perlu dikaji sejauh mana alokasi anggaran tersebut berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:

$$IPM = \alpha_0 + \beta_1 EAPBD + \beta_2 IAPBN + \beta_3 KAPBD + \beta_4 KAPBN + \beta_5 KP + \beta_6 PAPBD + \beta_7 PSAPBD + \mu$$

dimana :

- IPM : Indeks Pembangunan Manusia
- EAPBD : Belanja APBD Fungsi Ekonomi
- IAPBN : Belanja Infrastruktur (APBN)
- KAPBD : Belanja APBD Fungsi Kesehatan
- KAPBN : Belanja APBN Fungsi Kesehatan
- KP : Kredit Program (KUR dan UMi)
- PAPBD : Belanja APBD Fungsi Pendidikan
- PAPBN : Belanja APBN Fungsi Pendidikan
- PSAPBD : Belanja APBD Perlindungan Sosial
- μ : residual

Tabel 2.6 Hasil Regresi

	c	EAPBD	IAPBD	KAPBD	KAPBN	KP *	PAPBD	PAPBN	PSAPBD
Koefisien	67	-7.57E-12	4.58E-12	5.86E-12	-7.05E-12	1.31E-01	8.20E-13	3.96E-13	-9.60E-12
t-statistik	176	-1.25268	1.055293	1.561309	-1.05583	2.422184	0.239628	0.226922	-0.46885
p-value	0	0.2171	0.2972	0.1258	0.2969	0.0197	0.8118	0.8216	0.6415
Adj R-Squared	0.983735								

Sumber: Diolah (e-views 9)

Penggunaan data panel memiliki keuntungan dibandingkan penggunaan data *time series* atau *cross section* karena penggabungan data *time series* dan *cross section* (data lebih banyak) akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, penggabungan data dapat mengatasi masalah *omitted-variable*. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, metode yang digunakan adalah metode *fixed effect* (hasil pengujian terlampir) dengan hasil bahwa dari 8 variabel yang digunakan dalam persamaan, hanya

variable kredit program yang berpengaruh terhadap variable IPM ($p\text{-value} = 0,0197$). Salah satu faktor yang dapat menyebabkan hal ini adalah pengaruh belanja pemerintah membutuhkan waktu untuk mempengaruhi besarnya IPM sementara penyaluran kredit dapat secara langsung meningkatkan daya beli. Hasil ini berimplikasi pada:

1. Peningkatan penetrasi kredit program khususnya pada kantong-kantong kemiskinan;
2. Perlunya design program pendidikan dan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Usaha preventif dalam kesehatan harus lebih dikedepankan untuk menjaga agar kualitas hidup lebih baik;
3. Di sisi pendidikan, aksesibilitas terhadap fasilitas sekolah perlu ditingkatkan, bersamaan dengan usaha untuk mengurangi angka putus sekolah melalui pemberian beasiswa, sekolah berasrama (untuk siswa yang jauh dari fasilitas pendidikan) dan edukasi untuk mengurangi pekerja anak.

BAB III



Monev Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jembatan Teluk Kendari

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN TINGKAT REGIONAL

BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN TINGKAT REGIONAL

3.1. APBN TINGKAT PROVINSI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan gambaran kondisi keuangan pemerintah terkait sumber-sumber pendapatan dan alokasi belanja pemerintah untuk satu periode tahun anggaran yang ditetapkan dalam Undang-undang. APBN tahun 2019 mengusung tema Sehat, Adil, dan Mandiri yang diharapkan mampu merespon dinamika *volatilitas* global, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal.

Tabel 3. 1 Pagu dan Realisasi APBN lingkup Sultra (miliar Rp.)

Uraian	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
A. PENDAPATAN NEGARA	2.475,14	2.168,94	87,63	2.432,75	2.870,34	117,99	3.066,71	3.768,94	122,90
<i>PENDAPATAN PERPAJAKAN</i>	2.181,00	1.648,93	75,60	2.010,37	2.273,69	113,10	2.621,32	3.150,93	120,20
<i>PENDAPATAN BUKAN PAJAK</i>	291,30	520,01	178,52	422,38	596,64	141,26	445,39	618,01	138,76
<i>HIBAH</i>	2,84	-	-	-	-	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	22.713,44	21.513,93	94,72	23.536,69	23.023,04	97,82	25.329,49	24.442,17	96,50
<i>BELANJA PEMERINTAH PUSAT *)</i>	6.763,72	6.222,04	91,99	7.502,06	7.118,54	94,89	7.657,58	7.253,21	94,72
<i>TRANSFER</i>	15.949,72	15.291,89	95,88	16.034,63	15.904,50	99,19	17.671,91	17.188,96	97,27
C. SURPLUS DEFISIT	- 20.238,30	- 19.344,99	95,59	- 21.103,94	- 20.152,70	95,49	- 22.262,78	- 20.673,23	92,86

Sumber: Monev PA-DJPb, Simtrada-DJPK, KPPBC Kendari, dan KPP Pratama lingkup Sultra (diolah)

Pendapatan negara lingkup Sultra pada tahun 2019 ditargetkan meningkat jika dibanding tahun lalu. Meningkatnya target pendapatan menunjukkan semangat menuju APBN Mandiri, serta optimisme atas stabilitas ekonomi Sultra di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak. Demikian juga alokasi belanja lingkup Sultra tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya.

Alokasi belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan pada tahun 2019. Belanja Pegawai dan Belanja Modal memberikan kontribusi signifikan atas kenaikan pagu tersebut, sementara pagu Belanja Barang mengalami penurunan. Salah satu penyebab meningkatnya pagu Belanja Pegawai sebesar 10,36% adalah adanya kenaikan gaji pokok aparatur sipil negara sejak awal tahun 2019.

Demikian pula dengan alokasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami peningkatan pada tahun 2019. Peningkatan ini terjadi pada seluruh komponen TKDD, dengan peningkatan tertinggi pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 88,01%, disusul peningkatan Dana Desa (DD) sebesar 14,11%, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 11,52%. Alokasi TKDD mendominasi proporsi alokasi belanja negara lingkup Sultra tahun 2019 sebesar 70,33%, menunjukkan ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.

3.2. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL

Secara nasional, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.957,2 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 triliun atau 78,95%, PNPB sebesar Rp 405 triliun, dan hibah sebesar Rp 6,8 triliun. Sementara itu, total realisasi pendapatan negara lingkup Sultra sebesar Rp3,77 triliun. Realisasi pendapatan negara lingkup Sultra memberikan kontribusi sebesar 0,19% terhadap realisasi pendapatan negara secara nasional.

3.2.1. Penerimaan Perpajakan

Pendapatan pemerintah pusat terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan meliputi semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang digunakan pemerintah pusat untuk membiayai belanja negara dalam rangka pembangunan, mengatasi pengangguran dan pengentasan kemiskinan (fungsi distribusi dan alokasi). Pendapatan dari sektor penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar.

Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Perpajakan lingkup Sultra (miliar Rp.)

JENIS PENERIMAAN PERPAJAKAN	2017			2018			2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
A Pajak Penghasilan	1.171,6	757,4	64,65	1.201,0	943,3	78,54	1.183,6	1.228,1	103,76
B PPN dan PPnBM	895,3	717,8	80,18	728,6	777,8	106,75	913,6	905,5	99,12
C Pajak Bumi dan Bangunan	21,6	34,3	158,63	33,0	59,1	179,12	50,4	76,9	152,41
D Pajak Lainnya	25,5	30,2	118,31	47,8	33,4	69,95	42,9	35,8	83,30
E Pendapatan Cukai	-	0,0	-	1,5	1,1	75,76	2,4	0,7	27,14
F Pendapatan Pajak Internasional	67,0	109,2	163,03	154,2	459,0	297,66	428,3	904,0	211,04
JUMLAH	2.181,0	1.648,9	75,60	2.166,0	2.273,7	104,97	2.621,3	3.150,9	120,20

Sumber: OMSPAN-DJPb, KPPBC Kendari, dan KPP Pratama lingkup Sultra (diolah)

Pada tahun 2019 penerimaan perpajakan pusat di Sultra masih menjadi kontributor utama pendapatan negara dengan realisasi mencapai Rp3,15 triliun, meningkat sebesar

6,27% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2018. Dari total realisasi tersebut, Pajak Dalam Negeri memberikan kontribusi sebesar 71,31% atau senilai Rp2,25 triliun, sedangkan Pajak Perdagangan Internasional memberikan kontribusi sebesar Rp903,97 miliar atau 28,69% dari total penerimaan perpajakan. Realisasi penerimaan pajak dalam negeri tahun 2019 didominasi Pajak Penghasilan (PPh) serta PPN dan PPn BM. PPh memberikan kontribusi terbesar yaitu 54,66%, sementara penerimaan PPN dan PPn BM berkontribusi sebesar 40,30%.

Penerimaan pajak perdagangan Internasional tahun 2019 di Sultra, didominasi penerimaan Bea Keluar. Realisasi penerimaan Bea Keluar sebesar Rp 702,26 miliar atau 77,69% dari total penerimaan. Realisasi tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2018 yang hanya mencapai Rp339,32 miliar. Hal ini menunjukkan meningkatnya nilai ekspor yang dilakukan secara langsung melalui wilayah Sultra. Komoditas utama di tahun 2019, yaitu Produk Pertambangan (Feronikel dan Ore Nikel), Produk Pertanian (Kakao Butter dan Mete), serta Produk Perikanan (Ikan, Udang, Gurita, dan Kepiting).

3.2.1.1. Analisis Penerimaan Perpajakan

a. Analisa *Tax Ratio*

Kinerja perpajakan suatu negara dapat diukur melalui analisis *tax ratio* yang merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan PDB suatu negara. Adapun untuk mengukur kinerja perpajakan di daerah maka jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan PDRB-ADHB. *Tax ratio* lingkup Sultra tahun 2019 sebesar 2,44%, menguat 0,51% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018.

Tabel 3. 3 *Tax Ratio* dan *Tax per Kapita* lingkup Sultra

URAIAN	2017	2018	2019 *)
1. Penerimaan Perpajakan (miliar Rp.)	1.648,93	2.273,69	3.150,93
2. PDRB-ADHB (miliar Rp.)	107.423,45	118.090,93	129.260,13
<i>Tax Ratio (1 : 2)</i>	1,53%	1,93%	2,44%
3. Jumlah Penduduk	2.602.389	2.653.654	2.704.737
<i>Tax per Kapita (1 : 3)</i>	633.622	856.815	1.164.966

Sumber: OMSPAN-DJPb, KPPBC Kendari, KPP lingkup Sultra, dan BPS Sultra (diolah)
*) Jumlah Penduduk Tahun 2019 ptroveki dari laju pertumbuhan penduduk 2010-2018

Capaian tersebut tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama lingkup Sultra, seperti pengawasan atas pembayaran pajak masa atau rutin, optimalisasi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan, serta sosialisasi door to door terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak di wilayah kerjanya. Sementara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kendari terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada pengusaha lingkup Sultra, sehingga mampu meningkatkan ekspor secara

langsung dari wilayah Sultra. Hal ini memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan Pajak Perdagangan Internasional di Sultra.

Sementara itu, di level nasional target *tax ratio* ditetapkan sebesar 11,1% dengan realisasi 10,7% sehingga capaian *tax ratio* lingkup Sultra masih jauh di bawah realisasi *tax ratio* nasional yang mencapai 10,7%. Kendati demikian, penerimaan sektor perpajakan Sultra berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja penerimaan perpajakan wilayah Sultra masih mampu tumbuh, seiring dengan pertumbuhan PDRB Sultra di tengah gejolak ekonomi dunia yang membuat kondisi ekonomi sangat tertekan.

b. Analisa *Tax per Kapita*

Untuk melihat kontribusi masing-masing penduduk terhadap penerimaan perpajakan, maka digunakan rasio antara total penerimaan perpajakan terhadap jumlah populasi daerah. Dalam kurun tiga tahun terakhir, *tax per kapita* lingkup Sultra selalu mengalami peningkatan meskipun nilainya masih cukup kecil. Pada tahun 2019 *tax per kapita* Sultra mencapai Rp1.164.966,-. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Pemerintah perlu menggali dan melakukan ekstensifikasi potensi perpajakan di wilayahnya serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat/wajib pajak agar taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga penerimaan perpajakan dapat lebih optimal.

c. Analisa Penerimaan Perpajakan Versi Kuasa BUN dan Versi Fiskus lingkup Sultra

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kanwil DJPb Provinsi Sultra, terdapat perbedaan data penerimaan perpajakan antara aplikasi OMSPAN-DJPb dengan data KPP Pratama dan KPPBC lingkup Sultra disebabkan adanya perbedaan sudut pandang pencatatan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN mencatat realisasi perpajakan sesuai dengan wilayah penerimaan, sedangkan Direktorat Jenderal Pajak selaku fiskus mencatat realisasi pajak berdasarkan lokasi KPP penerbit NPWP.

Tabel 3. 4 Penerimaan Perpajakan versi SPAN dan Versi KPP lingkup Sultra (miliar Rp.)

JENIS PENERIMAAN PERPAJAKAN	TARGET	2019		KETERANGAN
		REALISASI VERSI KPP	REALISASI VERSI SPAN	
A Pajak Penghasilan	1.183,60	1.273,64	1.228,12	
B PPN dan PPnBM	913,61	917,70	905,55	
C Pajak Bumi dan Bangunan	50,44	75,95	76,87	
D Pajak Lainnya	42,93	36,48	35,76	
E Pendapatan Cukai	2,40	0,69	0,65	
F Pendapatan Pajak Internasional	428,33	905,49	903,97	
JUMLAH	2.621,32	3.209,95	3.150,93	

Sumber: OMSPAN-DJPb, KPPBC Kendari, KPP Pratama lingkup Sultra, dan BPS Sultra (diolah)

3.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Menurut UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan

perpajakan dan hibah, dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada hakekatnya PNBP mempunyai dua fungsi, yaitu *budgetary* dan fungsi *regulatory*. Pendapatan Negara yang bersumber dari PNBP telah mulai diperhitungkan untuk dijadikan andalan dalam memaksimalkan penerimaan negara. Realisasi PNBP Sultra tahun 2019 sebesar Rp618,01 miliar atau 138,76% dari target yang telah ditetapkan.

Grafik 3. 1 Target dan Realisasi PNBP lingkup Sultra (miliar Rp.)



Sumber: OMSPAN-DJPb (diolah)

3.2.2.1. Analisis PNBP

a. Perkembangan PNBP berdasarkan Jenis

Klasifikasi PNBP berdasarkan Jenis dapat dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu: Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, PNBP Lainnya, serta Pendapatan BLU.

Tabel 3. 5 Perkembangan PNBP lingkup Sultra (miliar Rp.)

JENIS PENERIMAAN PNBP	2017			2018			2019		
	ESTIMASI	REALISASI	%	ESTIMASI	REALISASI	%	ESTIMASI	REALISASI	%
A Pendapatan Sumber Daya Alam	-	0,001	-	-	-	-	-	-	-
B Pendapatan PNBP Lainnya	100,98	210,45	208,40	123,23	262,93	213,37	158,05	267,84	169,46
C Pendapatan Bagian Laba Bumn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D Pendapatan Badan Layanan Umum	190,31	309,56	162,66	299,17	333,71	111,54	293,98	350,17	119,11
JUMLAH	291,30	520,01	178,52	422,40	596,64	141,25	452,03	618,01	136,72

Sumber: OMSPAN-DJPb (diolah)

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa penerimaan PNBP Sultra tahun 2019 hanya terdiri dari Jenis PNBP Lainnya dengan kontribusi penerimaan sebesar Rp267,84 miliar atau 43,34%, dan Pendapatan BLU dengan kontribusi mencapai Rp350,17 miliar atau

56,66%. Sedangkan PNBPN SDA dan PNBPN Bagian Laba BUMN merupakan penerimaan PNBPN yang ditatausahakan secara terpusat.

b. Perkembangan PNBPN Fungsional

PNBPN Fungsional merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Tabel berikut menunjukkan perkembangan 6 besar PNBPN fungsional lingkup Sultra.

Tabel 3. 6 Perkembangan PNBPN Fungsional lingkup Sultra (miliar Rp.)

Uraian	Estimasi 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	+/- % Realisasi
PNBPN Perhubungan	89,104	99,857	106,858	7,01
PNBPN Polri	6,441	58,315	60,889	4,41
PNBPN Pendidikan	48,579	38,840	45,510	17,17
PNBPN Kejaksaan dan Peradilan	2,054	11,988	7,766	-35,21
PNBPN Kelautan dan Perikanan	6,810	5,076	4,630	-8,80
PNBPN Kesehatan	2,200	2,672	2,334	-12,67

Sumber: OMSPAN-DJPb (diolah)

Realisasi PNBPN Fungsional di wilayah Sultra didominasi PNBPN Sektor Perhubungan dengan realisasi sebesar Rp106,86 miliar atau berkontribusi 17,29% atas penerimaan PNBPN Sultra tahun 2019 meningkat 7,01% dibandingkan tahun 2018. Kondisi geografis Sultra merupakan wilayah kepulauan sehingga potensi PNBPN Fungsional Perhubungan di Sultra sangat menjanjikan dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu mencermati kondisi penurunan PNBPN Kelautan dan Perikanan jika melihat Sultra mempunyai wilayah perairan yang cukup besar.

Sementara jika kita melihat data target dibandingkan dengan realisasi penerimaan, masih terdapat banyak deviasi. Hal ini disebabkan K/L belum semuanya mencantumkan target PNBPN di lingkungannya sehingga persentase capaiannya menjadi sangat besar, selain itu terdapat pencantuman target PNBPN K/L yang tidak hanya merupakan target PNBPN Fungsional sehingga persentase realisasi PNBPN Fungsionalnya sangat kecil.

c. Analisa PNBPN Ratio

PNBPN Ratio Sultra 3 tahun terakhir selalu fluktuatif, sempat naik dari 0,48% di tahun 2017 menjadi 0,51% di tahun 2018, capaian PNBPN Ratio lingkup Sultra tahun 2019 turun menjadi 0,48%. Penurunan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sultra belum mendongkrak penerimaan PNBPN.

d. Analisa PNBP per Kapita

Selanjutnya untuk melihat kontribusi masing-masing penduduk terhadap PNBP, maka digunakan rasio antara total PNBP terhadap jumlah populasi daerah. Dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, PNBP per kapita lingkup Sultra selalu mengalami peningkatan meskipun nilainya cukup kecil. Pada tahun 2019 PNBP per kapita di Sultra mencapai Rp228.492,- meningkat 1,62% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018.

Tabel 3. 7 PNBP *Ratio* dan PNBP per Kapita lingkup Sultra

	2017	2018	2019 *)
1. Penerimaan PNBP (miliar Rp.)	520,01	596,64	618,01
2. PDRB-ADHB (miliar Rp.)	107.423,45	118.090,93	129.260,13
PNBP <i>Ratio</i> (1 : 2)	0,48%	0,51%	0,48%
3. Jumlah Penduduk	2.602.389	2.653.654	2.704.737
PNBP per Kapita (1 : 3)	199.820	224.839	228.492

Sumber: OMSPAN-DJPb, dan BPS Sultra (diolah)

*) Jumlah Penduduk Tahun 2019 ptroyeki dari laju pertumbuhan penduduk 2010-2018

e. Analisa Dasar Hukum Pengenaan Jenis dan Tarif PNBP

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sultra terhadap dasar hukum pengenaan jenis dan tarif PNBP yang diberlakukan di wilayah Sultra, satker K/L telah menetapkan jenis dan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Uji petik dilakukan terhadap satker-satker berikut:

- 1) Pelabuhan Perikanan Samudera, pungutan tarif PNBP berdasarkan PP Nomor 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 2) Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari, pungutan tarif PNBP berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 1436/KPTS/KU.030/L/10/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PNBP yang berasal dari Pelaksanaan Tindakan Karantina.
- 3) Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, pungutan tarif PNBP berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNBP Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

3.2.3. Penerimaan Hibah

Pada tahun 2019 tidak terdapat penerimaan hibah yang tercatat di wilayah Sultra.

3.3. BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL

Belanja pemerintah pusat adalah bagian dari belanja negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat baik yang dilaksanakan di pusat maupun di

daerah. Secara nasional, realisasi belanja negara mencapai Rp2.310,2 triliun yang terdiri dari belanja K/L Pemerintah Pusat mencapai Rp876,4 triliun, belanja Non K/L sebesar Rp622,6 triliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp811,3 triliun. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat lingkup Sultra tahun 2019 (berdasarkan data aplikasi MEBE tanggal 8 Februari 2020) sebesar

Rp7,25 triliun atau 94,72% dari total pagu. Meskipun angka realisasi meningkat sebesar Rp134,67 miliar atau 1,89%, akan tetapi persentase realisasi menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 94,89%. Realisasi tersebut berkontribusi 0,83% terhadap realisasi belanja K/L Pemerintah Pusat nasional.

Grafik 3. 2 Target dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat lingkup Sultra (miliar Rp.)

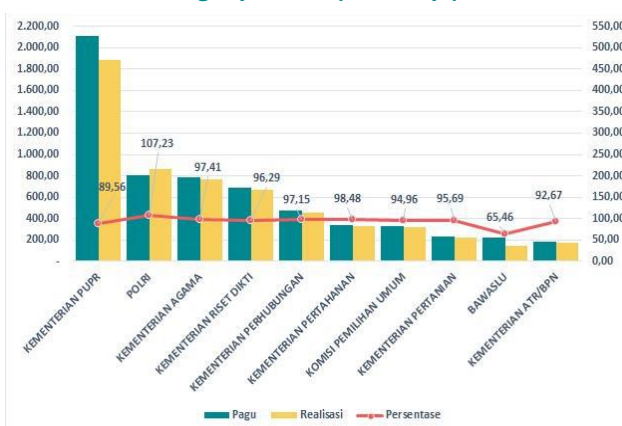


Sumber: OMSPAN-DJPb (diolah)

3.3.1. Perkembangan Pagu Dan Realisasi Berdasarkan Organisasi (Bagian Anggaran/ Kementerian/Lembaga)

Dilihat berdasarkan organisasi, Belanja Pemerintah Pusat di Sultra tahun 2019, terbagi dalam 44 (empat puluh empat) Kementerian/Lembaga. Pagu tahun 2019 mencapai Rp7,66 triliun meningkat 2,07% dibandingkan tahun 2018. Kenaikan pagu tertinggi dialokasikan di Kementerian PUPR Rp237,17 miliar, sementara 20 (dua puluh) K/L lainnya juga mengalami kenaikan pagu, 1 K/L yaitu Kementerian Perencanaan

Grafik 3. 3 Penyerapan 10 K/L Pagu Terbesar lingkup Sultra (miliar Rp.)



Sumber: MEBE-DJPb (diolah)

Pembangunan Nasional tidak mengalami perubahan pagu. Sedangkan di sisi lain 21 (dua puluh satu) K/L lainnya mengalami penurunan pagu. Penurunan pagu terbesar dialami oleh Komisi Pemilihan Umum mencapai Rp233,43 miliar seiring dengan berkurangnya tahapan pemilihan umum yang dijalankan. Pagu terbesar tahun 2019 yaitu Kementerian PUPR sebesar Rp2,11 triliun atau mencapai 27,51% pagu, sedangkan pagu terendah adalah Arsip Nasional Republik Indonesia sebesar Rp373,47 juta atau 0,005%.

Sesuai dengan tema Kebijakan Fiskal tahun 2019 yakni “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia”, maka fokus belanja APBN 2019 diarahkan untuk mendukung kebijakan pokok “Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal”. Hal tersebut tercermin pada alokasi belanja pemerintah pusat lingkup Sultra dengan pagu tertinggi Kementerian PUPR sebesar Rp2,11 triliun, disusul Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp807,77 miliar, Kementerian Agama sebesar Rp791,53 miliar, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp692,41 miliar, serta Kementerian Perhubungan sebesar Rp473,85 miliar.

Kinerja penyerapan anggaran K/L lingkup Sultra mencapai 94,72%, capaian tertinggi dibukukan oleh Kementerian Pariwisata yang realisasinya hampir mencapai 100%. Seluruh K/L penerima anggaran di Sultra menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat positif di atas 90%, meskipun demikian terdapat 4 K/L yang capaiannya masih di bawah 90%, capaian terendah pada Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar 65,46%. Sementara itu masih terdapat 2 (dua) K/L yang belum menyelesaikan proses revisi DIPA pagu minus Belanja Pegawai, sehingga capaian penyerapan anggaran lebih dari 100% yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

3.3.2. Perkembangan Pagu Dan Realisasi Berdasarkan Fungsi

Belanja pemerintah dikelompokkan menjadi 11 fungsi mengacu pada standar OECD tentang *Classification of The Functions of Government (COFOG)*. Adapun tiga fungsi yang mendapat prioritas tinggi dalam APBN di wilayah Sultra adalah Fungsi Ekonomi sebesar Rp2,59 triliun atau 33,85%, Fungsi Pendidikan sebesar Rp1,57 triliun atau 20,53%, serta Fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp1,23 triliun atau 15,55%. Sementara itu, Fungsi Pariwisata dan Budaya memperoleh alokasi terkecil yaitu sebesar Rp1,78 miliar atau 0,02%.

Realisasi tiga fungsi dengan pagu terbesar, yakni Fungsi Ekonomi, Fungsi Pendidikan, serta Fungsi Ketertiban dan Keamanan mencapai 95,27%. Dengan total alokasi sebesar Rp5,35 triliun atau 69,94% dari total alokasi di luar TKDD tahun 2019, kinerja ketiga fungsi tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif dan dapat menopang kinerja pertumbuhan ekonomi Sultra.

Di sisi lain, dalam 3 (tiga) tahun terakhir fungsi pariwisata dan budaya selalu memperoleh alokasi belanja terkecil. Hal ini memberikan gambaran bahwa dengan keterbatasan ruang fiskal, maka sektor pariwisata dan budaya belum menjadi perhatian utama pemerintah lingkup Sultra. Untuk mengembangkan potensi keanekaragaman pariwisata dan budaya di wilayah Sultra sangat perlu alokasi anggaran yang lebih besar.

Saat ini baru Taman Nasional Wakatobi yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, sementara masih banyak obyek-obyek lain yang bisa menjadi tujuan wisata unggulan. Dengan keunggulan dan potensi wisata di Sultra, sektor pariwisata dan budaya seharusnya dapat menjadi tumpuan untuk menggerakkan perekonomian, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja.

Tabel 3. 8 Pagu dan Realisasi per Fungsi lingkup Sultra (miliar Rp.)

NO	FUNGSI	2017			2018			2019		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	PELAYANAN UMUM	453,49	370,35	81,67	590,95	456,72	77,29	797,90	694,28	87,01
2	PERTAHANAN	291,24	219,45	75,35	237,33	235,69	99,31	336,56	331,45	98,48
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	973,60	936,70	96,21	1.039,45	1.005,60	96,74	1.190,99	1.231,16	103,37
4	EKONOMI	2.828,57	2.326,77	82,26	2.793,83	2.577,06	92,24	2.592,25	2.361,19	91,09
5	LINGKUNGAN HIDUP	159,59	134,97	84,57	207,10	172,70	83,39	260,86	246,39	94,45
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	583,41	546,17	93,62	380,31	361,85	95,15	493,22	479,98	97,32
7	KESEHATAN	163,19	113,91	69,80	126,04	115,99	92,03	173,78	164,04	94,40
8	PARIWISATA DAN BUDAYA	2,57	2,50	97,34	1,83	1,83	99,98	1,78	1,78	99,90
9	AGAMA	156,04	146,30	93,75	172,95	154,47	89,32	201,59	197,33	97,89
10	PENDIDIKAN	1.122,17	1.019,36	90,84	1.186,25	1.114,57	93,96	1.572,17	1.509,91	96,04
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	32,21	30,48	94,63	27,68	25,55	92,29	36,49	35,71	97,85
TOTAL		6.766,09	5.846,96	86,42	6.763,72	6.222,03	91,99	7.657,58	7.253,21	94,72

Sumber: MEBE-DJPb (diolah)

3.3.3. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja

Menurut klasifikasi jenis belanja pemerintah, pada tahun 2019 porsi terbesar alokasi anggaran di Sultra adalah Belanja Barang (52) sebesar Rp3,29 triliun atau 43,05%, diikuti Belanja Modal (53) sebesar sebesar Rp2,18 triliun. Komposisi anggaran belanja negara per jenis belanja di Sultra masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang sebesar Rp5,47 triliun atau 71,42% yang sebagian besar bersifat mengikat/wajib, sehingga fleksibilitas fiskal untuk membiayai prioritas pembangunan menjadi terbatas.

Tabel 3. 9 Pagu dan Realisasi per Jenis Belanja lingkup Sultra (miliar Rp.)

NO	JENIS BELANJA	2017			2018			2019		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	BELANJA PEGAWAI	1.904,04	1.795,99	94,33	1.969,00	1.964,80	99,79	2.172,56	2.179,32	100,31
2	BELANJA BARANG	2.723,42	2.455,77	90,17	3.548,30	3.292,40	92,79	3.296,50	3.102,29	94,11
3	BELANJA MODAL	2.120,27	1.955,80	92,24	1.975,06	1.851,66	93,75	2.176,57	1.959,67	90,03
4	BELANJA BANTUAN SOSIAL	15,99	14,48	90,56	9,70	9,68	99,79	11,95	11,92	99,79
TOTAL		6.763,72	6.222,04	91,99	7.502,06	7.118,54	94,89	7.657,58	7.253,21	94,72

Sumber: MEBE-DJPb (diolah)

Dari sisi penyerapan, pada tahun 2019 Belanja Pegawai (51) sampai dengan batas *cut-off* data membukukan presentase realisasi tertinggi yaitu 100,31% atau sebesar Rp2,17 triliun (terdapat K/L yang belum menyelesaikan revisi DIPA pagu minus), kemudian Belanja Bantuan Sosial (57) menyerap 99,79% atau sebesar 11,92 miliar.

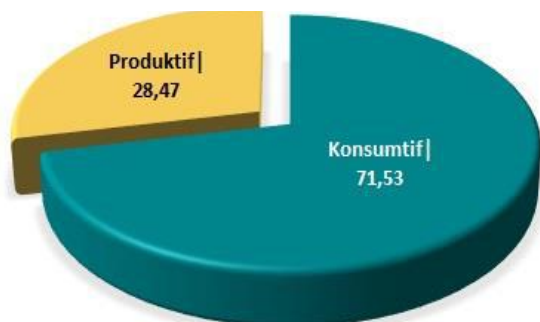
Adapun Belanja Barang (52) di urutan ketiga dengan tingkat penyerapan 94,11% atau mencapai Rp3,10 triliun, dan Belanja Modal (53) membukukan penyerapan terendah yaitu 90,03% atau sebesar Rp1,96 triliun.

3.3.4. Analisis Belanja Pemerintah Pusat

3.3.4.1. Analisis Belanja Sektor Konsumtif dan Sektor Produktif

Belanja Sektor Konsumtif adalah belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah yang sifatnya rutin, habis pakai, dan pengaruhnya bersifat jangka pendek. Efisiensi Belanja Konsumtif untuk keperluan operasional pada Kementerian Negara/Lembaga perlu dilakukan, namun dengan tetap menjaga kualitas tugas dan fungsi pelayanan. Sedangkan Belanja Sektor Produktif

Grafik 3. 4 Perbandingan Belanja Sektor Konsumtif dan Sektor Produktif lingkup



Sumber: MEBE-DJPb (diolah)

adalah pengeluaran pemerintah atau investasi yang digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka memperoleh aset di masa depan, serta diharapkan menimbulkan *multiplier effect* yang besar dan berkelanjutan, baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

Belanja Pemerintah Pusat di Sultra dalam 3 tahun terakhir selalu menunjukkan tren yang fluktuatif. Alokasi belanja modal sempat turun di tahun 2018, lalu naik menjadi Rp2,18 triliun di tahun 2019. Adapun alokasi belanja pegawai dan belanja barang sempat melonjak tajam di tahun 2018, kemudian turun menjadi Rp5,47 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa di Sultra, belanja produktif berupa belanja modal semakin tergerus oleh belanja konsumtif seiring dengan penambahan jumlah pegawai untuk keperluan operasional kelembagaan. Rasio belanja produktif lingkup Sultra tahun 2019 hanya mencapai 28,47%.

Besaran porsi belanja pegawai hampir menyamai porsi belanja modal, seharusnya porsi belanja modal untuk sektor produktif jauh lebih besar dari porsi belanja pegawai. Pun demikian jika melihat dari sisi realisasi, belanja pegawai selalu membukukan capaian lebih tinggi dibandingkan belanja modal. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak, mengingat belanja modal memberikan *multiplier effect* secara langsung kepada masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain, perlu adanya penghematan dan pengalihan dari belanja sektor konsumtif untuk keperluan belanja pegawai ke belanja modal untuk sektor produktif.

3.3.4.2. Analisis Sasaran/Obyek Belanja Pemerintah Pusat

Berdasarkan uji petik terhadap 50 kontrak terbesar yang dibiayai dari APBN lingkup Sultra, diperoleh data bahwa sebagian besar proyek di Sultra dikerjakan oleh rekanan yang berdomisili di Sultra, sebanyak 36% proyek dikerjakan oleh rekanan dari luar Sultra. Hal tersebut menunjukkan keberpihakan satker untuk memberdayakan rekanan lokal dalam membangun dan memelihara infrastruktur daerah. Di sisi lain, rekanan lokal terbukti mampu bersaing untuk mengerjakan proyek-proyek di wilayah Sultra. Kondisi tersebut membuat kucuran dana APBN dapat berputar di Sultra dan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi angka kemiskinan di Sultra.

Grafik 3.5 Perbandingan Domisili Rekanan 50 Kontrak Terbesar lingkup Sultra



Sumber: OMSPAN-DJPb

3.3.4.3. Rasio Belanja Pemerintah Pusat terhadap Populasi

Tabel 3.10 Rasio Belanja Pemerintah terhadap Populasi dan PDRB lingkup Sultra

URAIAN	2017	2018	2019 *)
1. Belanja Pemerintah Pusat (miliar Rp.)	6.222,04	7.118,54	7.253,21
2. PDRB-ADHB (miliar Rp.)	107.423,45	118.090,93	129.260,13
Rasio Belanja - PDRB (1 : 2)	5,79%	6,03%	5,61%
3. Jumlah Penduduk	2.602.389	2.653.654	2.704.737
Rasio Belanja - Populasi (1 : 3)	2.390.895	2.682.543	2.681.668

Sumber: OMSPAN-DJPb, dan BPS Sultra (diolah)

*) Jumlah Penduduk Tahun 2019 proyeksi dari laju pertumbuhan penduduk 2010-2018

Rasio belanja pemerintah pusat terhadap populasi di wilayah Sultra adalah dengan membandingkan antara total belanja pemerintah pusat dengan jumlah populasi. **Tabel 3.10** menunjukkan bahwa rasio belanja Pemerintah Pusat lingkup

Sultra terhadap populasi dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif, sempat naik dari angka Rp2.930.895,- menjadi Rp2.682.543 pada tahun 2018, kemudian sedikit menurun pada tahun 2019. Untuk mendukung pemerintah lingkup Sultra dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan fiskal, maka pada tahun 2019 pemerintah melalui belanja pemerintah pusat membelanjakan Rp2.681.668,- untuk setiap 1 orang penduduk di Sultra, menurun 0,03% jika dibandingkan tahun 2018.

3.3.4.4. Sensitivitas Belanja Pemerintah Pusat terhadap PDRB

Belanja pemerintah pusat di Sultra sangat memegang peran penting mengingat kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sultra sangat terbatas. Tren belanja pemerintah pusat dan PDRB dalam 3 (tiga) tahun terakhir sangat fluktuatif, akan tetapi menunjukkan bahwa realisasi Belanja Pemerintah Pusat berhasil mendorong kenaikan PDRB Sultra. Pada tahun 2019, belanja pemerintah pusat berkontribusi 5,61% terhadap PDRB, menurun dibandingkan tahun 2018 (**tabel 3.10**).

Pola realisasi belanja pemerintah pusat yang biasanya masih sangat kecil pada triwulan I, berkorelasi dengan penurunan PDRB pada kuartal dimaksud. Walaupun demikian, komponen pengeluaran lain seperti konsumsi rumah tangga cenderung lebih terpengaruh oleh perayaan hari-hari besar keagamaan atau budaya, sehingga pola pada komponen pengeluaran Rumah Tangga tidak sama dengan pola pengeluaran Belanja Pemerintah Pusat.

3.4. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Sebagai pelaksanaan dari kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah mengalokasikan dana TKDD yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Anggaran TKDD menjadi salah satu instrumen untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Anggaran TKDD selain memperhatikan kebutuhan pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kinerja pelaksanaan, dinamika yang berkembang dimasyarakat, dan tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tahun anggaran berdasarkan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional.

Guna memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan mendukung pencapaian Nawacita yang ketiga, yaitu *membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI*, maka penganggaran TKDD telah dan akan terus diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.11 memperlihatkan alokasi dana TKDD tahun 2019 lingkup Sultra mencapai Rp17,67 triliun, meningkat sebesar Rp1,64 triliun atau 10,21% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan alokasi TKDD Sultra tahun 2019 sejalan dengan kebijakan penguatan alokasi TKDD secara proporsional dan sejalan dengan anggaran K/L, penguatan pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU), penguatan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK), penguatan pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID), penguatan

pengelolaan Dana Desa, dan dukungan pendanaan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan. Penyaluran TKDD dilaksanakan melalui KPPN lingkup Sultra sebesar Rp3,86 triliun (DAK Fisik dan Dana Desa), dan yang lain disalurkan melalui KPPN Jakarta II sebesar Rp13,81 triliun.

Tabel 3. 11 Transfer ke Daerah dan Dana Desa lingkup Sultra (miliar Rp.)

Uraian	2017			2018			2019		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil	927,52	398,66	42,98	589,23	588,17	99,82	1.107,82	851,07	76,82
Dana Alokasi Umum	9.747,38	9.747,38	100,00	9.821,73	9.821,73	100,00	10.325,51	10.317,08	99,92
Dana Alokasi Khusus Fisik *)	1.894,63	1.827,95	96,48	2.071,00	2.005,77	96,85	2.243,48	2.140,49	95,41
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Insentif Daerah	149,56	149,56	100,00	201,75	193,50	95,91	221,61	216,75	97,80
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	1.748,60	1.693,18	96,83	1.936,67	1.885,66	97,37	2.159,68	2.071,75	95,93
Dana Desa *)	1.482,03	1.475,16	99,54	1.414,25	1.409,66	99,68	1.613,82	1.591,83	98,64
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	15.949,72	15.291,89	95,88	16.034,63	15.904,50	99,19	17.671,91	17.188,96	97,27

Sumber: OMSPAN-DJPb, dan BPS Sultra (diolah)

Realisasi TKDD Sultra tahun 2019 sebesar Rp17,19 triliun atau mencapai 97,27% dari keseluruhan alokasi TKDD, menurun jika dibandingkan persentase realisasi tahun 2018 yang mencapai 99,19%. Penurunan ini merupakan dampak rendahnya realisasi DBH yang hanya mencapai 76,82% akibat terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 pada pertengahan bulan Desember 2019. Hal ini mengakibatkan belum semua pemda menerima kurang salur DBH sesuai alokasi terbaru. Realisasi TKDD Sultra berkontribusi 2,12% terhadap realisasi TKDD nasional.

a. Analisis Ruang Fiskal

Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion Paper, 2005) berpendapat bahwa ruang fiskal merupakan ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. Ruang fiskal merupakan hasil dari pendapatan dikurangi dana alokasi *earmarked* (DAK) dan belanja wajib (belanja pegawai dan belanja barang yang mengikat). Mencerminkan ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemda tanpa mengganggu solvabilitas fiskal (membiayai belanja wajib).

$$\text{Ruang Fiskal} = (\text{Total Pendapatan} - \text{DAK}) - \text{Belanja Pegawai Tak Langsung}$$

Total Pendapatan = Rp19.534.261.092.794

DAK = Rp4.212.234.449.000

Belanja Tidak Langsung = Rp10.076.048.025.765, Ruang Fiskal = Rp 5.245.978.618.029

Pada Tahun 2019, ruang fiskal Sultra sebesar Rp 5.245,98 miliar atau 26,86% dari total pendapatan Sultra, ini menunjukkan bahwa Sultra memiliki ruang fiskal yang sempit karena sebagian besar anggaran di Sultra digunakan untuk belanja rutin dan

belanja yang sudah ditentukan penggunaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah Provinsi Sultra diharapkan dapat efektif dan efisien dalam menggunakan anggarannya sehingga dapat tercipta ruang fiskal yang lebih besar.

b. Analisis Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah.

$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan APBD}}$	PAD = Rp1.882.010.971.540 Total Pendapatan APBD = Rp19.534.261.092.794
$\text{Rasio Dana Transfer} = \frac{\text{Total Dana Transfer}}{\text{Total Pendapatan APBD}}$	Rasio Transfer = 87,99%
Σ Dana Transfer = Rp17.188.964.358.643	Σ Total Pendapatan APBD = Rp19.534.261.092.794

Kemandirian Sultra dalam 3 (tiga) tahun terakhir masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Pada tahun 2019, rasio PAD Sultra hanya mencapai 9,63%, sementara rasio PAD pada tahun 2018 dan 2017 berturut-turut sebesar 9,23% dan 8,53%. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Sultra agar lebih mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk menutup belanjanya. Sebaliknya rasio Dana Transfer sebesar 87,99%. Hal ini menunjukkan bahwa Sultra memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.

c. Analisis Komparatif TKDD terhadap Indikator Makroekonomi

Tabel 3.12 menunjukkan realisasi TKDD lingkup Sultra dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, hal ini memberikan pengaruh positif terhadap beberapa capaian Indikator makroekonomi di wilayah Sultra. Indikator yang berhubungan positif dengan meningkatnya realisasi TKDD adalah PDRB, Tingkat Kemiskinan, dan IPM. Dalam periode 3 tahun terakhir, PDRB Sultra terus meningkat dan angka PDRB-ADHB mencapai Rp129,26 triliun pada tahun 2019. Sementara itu, Tingkat Kemiskinan selalu mengalami menurun dan pada tahun 2019 Tingkat

Kemiskinan Sultra sebesar 11,04%. Sedangkan IPM Sultra terus membaik dan mencapai indeks 71,20 pada tahun 2019.

Tabel 3. 12 Komparasi TKDD dengan Indikator Makroekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara

URAIAN	2017	2018	2019
TKDD (miliar Rp.)	15.291,89	15.904,50	17.188,96
1. Pertumbuhan Ekonomi	6,76	6,42	6,51
2. PDRB-ADHB (miliar Rp.)	107.423,45	118.090,93	129.260,13
3. Tingkat Pengangguran	3,30	3,26	3,59
4. Tingkat Kemiskinan	11,97	11,32	11,04
5. Gini Ratio	0,392	0,399	0,393
6. IPM	69,86	70,61	71,20

Sumber: OMSPAN-DJPb, dan BPS Sultra (diolah)

Beberapa indikator lainnya mengalami pengaruh yang fluktuatif atas realisasi TKDD. Pertumbuhan Ekonomi Sultra sempat melemah 0,34 poin di tahun 2018, lalu meningkat lagi seiring dengan meningkatnya realisasi TKDD pada tahun 2019 menjadi 6,51. Sementara itu, Gini Ratio sempat melebar 0,007 poin pada tahun 2018, lalu membaik kembali menjadi 0,393 seiring meningkatnya realisasi TKDD di tahun 2019. Sedangkan Tingkat Pengangguran sempat membaik seiring dengan meningkatnya realisasi TKDD pada tahun 2018, akan tetapi kembali bertambah menjadi 3,59% meski realisasi TKDD tetap meningkat pada tahun 2019.

Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya realisasi TKDD pada tahun 2019 menjadi salah satu komponen membaiknya indikator-indikator makroekonomi Sultra, kecuali Tingkat Pengangguran yang tidak terkena dampak positif peningkatan realisasi TKDD. Perlu upaya pemerintah agar mengalokasikan TKDD untuk penyediaan lapangan kerja melalui proyek padat karya dan pengembangan kompetensi penduduk usia kerja. Meningkatnya Tingkat Pengangguran salah satunya disebabkan kesenjangan kemampuan yang dimiliki pencari kerja dengan kriteria lowongan kerja yang ada. Selain kemampuan dasar, kemampuan bahasa asing, dan komputer menjadi kompetensi yang perlu ditingkatkan oleh pencari kerja.

3.4.1. Dana Transfer Umum

3.4.1.1. Dana Alokasi Umum

Alokasi DAU tahun 2019 lingkup Sultra mencapai Rp10,33 triliun, meningkat sebesar Rp503,77 miliar atau 5,13% jika dibandingkan dengan tahun 2018 (**lampiran 1**). Peningkatan alokasi DAU Sultra tahun 2019 sejalan dengan kebijakan penguatan pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU), dan dukungan pendanaan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan. Penyaluran DAU dilaksanakan melalui KPPN Jakarta II. Alokasi tertinggi pada Provinsi Sultra sebesar Rp1,62 triliun atau 15,67%, sedangkan alokasi terendah pada

Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp334,58 miliar atau 3,24% dari seluruh alokasi lingkup Sultra.

Realisasi DAU Sultra tahun 2019 sebesar Rp10,32 triliun atau mencapai 99,92% dari keseluruhan alokasi DAU, menurun jika dibandingkan persentase realisasi tahun 2018 yang mencapai 100%. Penurunan ini merupakan dampak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah pada awal bulan November 2019. Realisasi 3 pmda tidak mencapai 100%, yaitu Kabupaten Buton Selatan sebesar 99,52%, Kabupaten Buton Tengah sebesar 99,51%, dan Kabupaten Wakatobi 99,02%.

3.4.1.2. Dana Bagi Hasil

Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* dan penyaluran dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue* atau penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Terdiri dari DBH Pajak Penghasilan, DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH Cukai Hasil Tembakau, dan DBH Sumber Daya Alam.

Sebagaimana terlihat pada **lampiran 1**, alokasi DBH tahun 2019 lingkup Sultra mencapai Rp1,11 triliun, meningkat sebesar Rp518,59 miliar atau 88,01% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan alokasi DBH Sultra tahun 2019 sejalan dengan kebijakan penguatan pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU). Penyaluran DBH dilaksanakan melalui KPPN Jakarta II. Alokasi tertinggi pada Kabupaten Kolaka sebesar Rp218,75 miliar atau 20,27%, sedangkan alokasi terendah pada Kabupaten Muna Barat sebesar Rp23,87 miliar atau 2,14% dari seluruh alokasi lingkup Sultra.

Realisasi DBH Sultra tahun 2019 sebesar Rp851,07 miliar atau hanya mencapai 76,82% dari keseluruhan alokasi DBH, menurun jika dibandingkan persentase realisasi tahun 2018 yang mencapai 99,82%. Penurunan ini merupakan dampak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 pada pertengahan bulan Desember 2019. Hal ini mengakibatkan belum semua pmda menerima kurang salur DBH sesuai alokasi terbaru. Persentase realisasi tertinggi pada Kabupaten Bombana sebesar 83,13%, sedangkan realisasi terendah pada Kabupaten Konawe sebesar 68,05%.

3.4.2. Dana Transfer Khusus

3.4.2.1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Alokasi DAK Fisik tahun 2019 di Sultra mencapai Rp2,24 triliun, meningkat sebesar Rp172,48 miliar atau 8,33% jika dibandingkan dengan tahun 2018 (**Lampiran I**). Peningkatan alokasi DAK Fisik Sultra tahun 2019 sejalan dengan kebijakan penguatan alokasi TKDD secara proporsional dan sejalan dengan anggaran K/L, dan penguatan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK). Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan melalui KPPN lingkup Sultra sesuai wilayah kerja masing-masing. Alokasi tertinggi pada Provinsi Sultra sebesar Rp335,20 miliar atau 14,94%, sedangkan alokasi terendah pada Kabupaten Buton Tengah sebesar Rp51,83 miliar atau 2,31% dari seluruh alokasi lingkup Sultra.

Realisasi DAK Fisik Sultra tahun 2019 sebesar Rp2,14 triliun atau mencapai 95,41% dari keseluruhan alokasi DAK Fisik, menurun jika dibandingkan persentase realisasi tahun 2018 yang mencapai 94,68%. Hal ini disebabkan adanya kegiatan yang batal salur atau tidak salur karena tidak memenuhi persyaratan penyaluran, nilai kontrak bidang yang sangat kecil dibandingkan pagu bidang tersebut sehingga terdapat sisa yang tidak dapat disalurkan, serta adanya bidang yang tidak ada rencana kegiatannya sehingga tidak dapat disalurkan. Persentase realisasi tertinggi pada Kabupaten Muna Barat sebesar 99,09%, sedangkan realisasi terendah pada Kabupaten Buton sebesar 88,84%.

Sementara jika dilihat penyaluran per bidang, sejalan dengan fokus APBN 2019 yang diarahkan untuk mendukung kebijakan pokok *“Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal”*, maka alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan mendapat alokasi tertinggi sebesar Rp678,52 miliar atau 30,24%, disusul Bidang Kesehatan sebesar Rp560,24 miliar atau 24,97%, dan Bidang Jalan sebesar Rp481,27 miliar atau 21,45%. Sedangkan sebesar Rp523,44 miliar atau 23,33% dialokasikan untuk 11 bidang lainnya.

3.4.2.2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Alokasi DAK Non Fisik tahun 2019 di Sultra mencapai Rp2,16 triliun, meningkat sebesar 11,51% jika dibandingkan dengan tahun 2018 (**lampiran 1**). Peningkatan alokasi DAK Non Fisik Sultra tahun 2019 sejalan dengan kebijakan penguatan alokasi TKDD secara proporsional dan sejalan dengan anggaran K/L, dan penguatan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) serta adanya penambahan jenis DAK Non Fisik pada Tahun 2019, yakni Dana Pelayanan Kepariwisata, Dana BOP

Pendidikan Kesetaraan, serta Dana BOP Museum dan Taman Budaya. Penyaluran DAK Non Fisik dilaksanakan melalui KPPN Jakarta II. Alokasi tertinggi pada Provinsi Sultra sebesar Rp920,57 miliar atau 43,28%, sedangkan alokasi terendah pada Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp21,67 miliar atau 1,04% dari seluruh alokasi lingkup Sultra.

Realisasi DAK Non Fisik Sultra tahun 2019 sebesar Rp2,07 triliun atau mencapai 95,93% dari keseluruhan alokasi DAK Non Fisik, menurun jika dibandingkan persentase realisasi tahun 2018 yang mencapai 97,37%. Persentase realisasi tertinggi pada Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 99,36%, sedangkan realisasi terendah pada Kota Baubau sebesar 89,97%.

3.4.3. Dana Desa

Alokasi Dana Desa tahun 2019 lingkup Sultra mencapai Rp1,61 triliun, meningkat 14,11% dibandingkan dengan tahun 2018 (**Data pada lampiran 1**). Peningkatan alokasi Dana Desa lingkup Sultra tahun 2019 sejalan dengan kebijakan penguatan pengelolaan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan melalui KPPN lingkup Sultra sesuai wilayah kerja masing-masing. Alokasi tertinggi pada Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp251,21 miliar atau 15,78%, sedangkan alokasi terendah pada Kabupaten Buton Selatan sebesar Rp59,79 miliar atau 3,76% dari seluruh alokasi lingkup Sultra.

Realisasi Dana Desa lingkup Sultra tahun 2019 sebesar Rp1,59 triliun atau mencapai 98,64% dari keseluruhan alokasi Dana Desa, menurun jika dibandingkan persentase realisasi tahun 2018 yang mencapai 99,68%. Penurunan ini disebabkan adanya sisa Dana Desa di RKUD tahun 2018 yang menjadi pengurang penyaluran Dana Desa tahun 2019 dan jumlahnya lebih besar jika dibanding sisa dana di RKUD pada tahun 2017 yang menjadi pengurang penyaluran Dana Desa tahun 2018, serta adanya 56 desa di Kabupaten Konawe yang belum disalurkan Dana Desa tahap III karena menunggu penjelasan status desa dari Kemendagri. Realisasi 3 pemda tidak mencapai 100%, yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 99,55%, Kabupaten Wakatobi sebesar 99,49%, dan Kabupaten Konawe sebesar 90,42%.

3.4.4. Dana Insentif Daerah

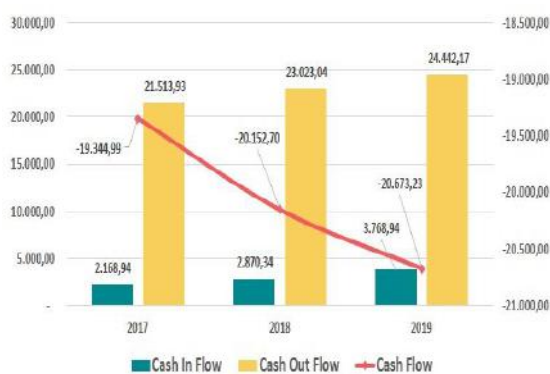
Alokasi DID tahun 2019 lingkup Sultra mencapai Rp221,61 miliar, meningkat sebesar Rp19,86 miliar atau 11,51% dibandingkan dengan tahun 2018 (**Data Lampiran 1**). Peningkatan alokasi DID lingkup Sultra tahun 2019 sejalan dengan kebijakan penguatan pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID). Penyaluran DID dilaksanakan melalui KPPN Jakarta II. Alokasi tertinggi pada Kabupaten Konawe sebesar Rp32,86 miliar atau 15,14%, sedangkan alokasi terendah pada Kabupaten Buton sebesar Rp9,73 miliar atau 2,24% dari seluruh alokasi lingkup Sultra.

Realisasi DID lingkup Sultra tahun 2019 sebesar Rp216,75 miliar atau mencapai 97,80% dari keseluruhan alokasi DID, meningkat jika dibandingkan persentase realisasi tahun 2018 yang mencapai 95,91%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja Sultra yang salah satunya terlihat dari jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyusunan laporan keuangan pemda (sebagai salah satu syarat penerima DID). Jumlah pemda yang memperoleh penghargaan WTP tahun 2018 sebanyak 17 dari 18 pemda, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebanyak 15 pemda. Realisasi terendah pada Kabupaten Buton hanya mencapai 50%.

3.5. ANALISIS CASH FLOW APBN TINGKAT REGIONAL

Cash Flow pemerintah pusat menggambarkan kondisi arus kas masuk (*cash in flow*) dan arus kas keluar (*cash out flow*) yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada suatu daerah dan periode waktu tertentu. Arus kas masuk pemerintah pusat adalah semua penerimaan yang diterima oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah provinsi tertentu sedangkan arus kas keluar adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi tertentu.

Grafik 3. 6 Perkembangan Cash Flow Belanja Negara lingkup Sultra (miliar Rp.)



Sumber: SIMTRADA-DJPK (diolah)

Kondisi *cash flow* pemerintah pusat lingkup Sultra dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami *defisit cash flow*. Adapun defisit tahun 2019 di Sultra mencapai Rp20,67 triliun, meningkat 2,58% atau Rp520,53 miliar jika dibandingkan periode tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan dari sektor Perpajakan dan PNBPN di Sultra belum dapat mengimbangi peningkatan belanja dan transfer ke daerah, sehingga kenaikan defisit selalu terjadi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, ketergantungan sumber pendanaan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi dan masih menerima subsidi silang dari daerah lain. Sumber pendapatan sektor Perpajakan dan PNBPN di Sultra perlu lebih di optimalkan, dan di sisi lain perlu adanya penghematan terhadap belanja konsumtif dan belanja operasional K/L.

3.6. PENGELOLAAN BLU PUSAT

3.6.1. Profil dan Layanan Satker BLU Pusat

Sultra saat ini memiliki 2 entitas BLU, yaitu Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari yang ditetapkan sebagai BLU penuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/2010 tanggal 26 Januari 2010 (Rumpun Pendidikan-Layanan Pendidikan PTN), sementara Rumah Sakit Umum (RSU) Bhayangkara Kendari ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.05/2016 tanggal 13 Januari 2016 (Rumpun Kesehatan-Layanan Kesehatan).

Universitas Halu Oleo berdiri sejak tanggal 19 Agustus 1981. UHO merupakan perguruan tinggi negeri ke-42 di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1981. Saat ini UHO telah memiliki 106 program studi yang tersebar pada 16 fakultas, 1 program pendidikan vokasi, dan 1 program pascasarjana. Sebanyak 75,47% prodi telah terakreditasi A dan B dari BAN PT, sementara 26 program studi (termasuk prodi baru) masih berakreditasi C.

RSU Bhayangkara Kendari berdiri pada tahun 1981, dan pada tanggal 25 Oktober 1989 secara resmi melayani masyarakat umum dan ABRI. RSU Bhayangkara Kendari saat ini memiliki sarana dan prasarana antara lain berupa total bangunan rumah sakit seluas 1.540 m². Fasilitas ruang perawatan RSU Bhayangkara Kendari terdiri dari antara lain: 12 poli rawat jalan, 86 kamar rawat inap, Ruang ICU 3 kamar, Ruang PICU 3 kamar, Tempat Tidur IGD 6 buah, Tempat Tidur Bayi 4 buah, Kamar Bersalin 3 kamar, Kamar Operasi 2 kamar, dan Ruang Isolasi 2 kamar.

3.6.2. Perkembangan BLU Pusat

Perkembangan aset UHO Kendari dan Rumkit Bhayangkara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Aset UHO dan RS Bhayangkara Kendari (miliar Rp.)

Uraian	UHO			RS BHAYANGKARA		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Aset Lancar	90,16	107,38	103,14	11,07	10,41	14,47
Aset Tetap	2.320,68	2.322,44	2.358,75	17,16	39,00	60,84
Aset Lainnya	2,53	2,41	2,23	0,06	0,18	0,52
Kewajiban	8,17	1,50	0,65	1,16	0,09	0,05
Ekuitas	2.405,21	2.430,74	2.463,10	27,13	49,50	75,78

Sumber: LK 2019 Unaudited (diolah)

Tabel berikut menunjukkan Ekuitas UHO Kendari dalam 3 (tiga) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2019 nilai ekuitas UHO Kendari sebesar Rp2,46 triliun meningkat 1,33% jika dibandingkan periode tahun 2018. Sementara nilai aset tetap periode 2019 meningkat 1,56% dibandingkan periode 2018 menjadi sebesar Rp2,36

triliun. Penambahan aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Gedung dan Bangunan

memberikan kontribusi yang signifikan, meskipun di sisi lain nilai akumulasi penyusutan juga meningkat.

Ekuitas RSUD Bhayangkara Kendari dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2019 nilai ekuitas RSUD Bhayangkara Kendari sebesar Rp75,78 triliun meningkat 53,08% jika dibandingkan periode tahun 2018. Sementara nilai aset tetap periode 2019 meningkat 56,01% dibandingkan periode tahun 2018. Penambahan aset Peralatan dan Mesin menjadi faktor utama peningkatan yang cukup signifikan, meskipun di sisi lain nilai penyusutan juga mengalami peningkatan (**tabel 3.13**).

3.6.3. Analisis Tingkat Kemandirian BLU

Salah satu tujuan diberikannya status BLU adalah untuk mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*). Kemandirian tersebut dapat dilihat dari berkurangnya porsi alokasi pagu rupiah murni (RM).

Untuk melihat kemandirian UHO Kendari sebagai satker BLU, berikut disajikan data yang menunjukkan bahwa porsi alokasi pagu rupiah murni (RM) dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Porsi RM tahun 2019 sebesar 38,07%, menurun jika

Tabel 3. 14 Pagu RM dan PNBPN UHO dan RS Bhayangkara Kendari (miliar Rp.)

Uraian	UHO			RS BHAYANGKARA		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pagu PNBPN	243,99	271,57	361,00	25,56	28,59	30,05
Pagu RM	205,88	220,35	221,88	4,21	4,40	4,28
Total Pagu	449,87	491,92	582,88	29,77	32,99	34,33
% Pagu RM	45,76%	44,79%	38,07%	14,15%	13,32%	12,47%

Sumber: OMSPAN-DJPb (diolah)

dibandingkan tahun 2018 dan rerata sebesar 42,87% dalam 3 tahun terakhir.

Sementara itu, perkembangan porsi RM RSUD Bhayangkara Kendari menunjukkan tingkat kemandirian BLU tersebut dalam 3 tahun terakhir sangat baik. Hal ini tercermin dari porsi RM tahun 2019 yang sebesar 12,47%,

menurun jika dibandingkan tahun 2018 dan rerata sebesar 13,31% dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

3.6.1. Potensi Satker PNBPN menjadi BLU

Tidak semua satker yang memiliki PNBPN dapat berubah menjadi satker BLU, karena harus memenuhi terlebih dahulu syarat-syarat administratif, substantif dan teknis. Berikut disajikan data 10 satker dengan pagu PNBPN terbesar di Sultra, dan mempunyai pendapatan PNBPN Fungsional yang dibukukan pada satker berkenaan sebagaimana **tabel 3.15**. Jika dilihat dari porsi PNBPN terhadap total pagu, maka satker Universitas Sembilan Belas November Kolaka dan Politeknik Kesehatan Kendari merupakan Satker PNBPN di Sultra yang potensial untuk dikembangkan menjadi BLU. Selain porsi PNBPN yang tinggi, kedua satker tersebut mempunyai PNBPN Fungsional yang cukup signifikan jumlahnya.

Tabel 3. 15 Pagu RM dan PNBPN 10 besar pagu PNBPN Satker lingkup Sultra (miliar Rp.)

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	Layanan	2018			2019			PNBP Fungsional
				PAGU RM	PAGU PNBPN	% PAGU PNBPN	PAGU RM	PAGU PNBPN	% PAGU PNBPN	
1	288436	Bandara Udara Halu Oleo Kendari	Barang/Jasa Lainnya	79,93	20,64	20,52	89,00	26,39	22,87	4,69
2	400908	Universitas Sembilan Belas November Kolaka	Pendidikan	20,30	22,63	52,72	27,76	22,12	44,35	20,45
3	307665	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari	Pendidikan	47,22	10,86	18,70	51,09	14,36	21,94	14,68
4	632352	Politeknik Kesehatan Kendari	Pendidikan	44,26	11,68	20,89	29,94	12,43	29,33	10,39
5	287516	Distrik Navigasi Kendari	Barang/Jasa Lainnya	71,36	-	-	46,08	11,81	20,41	0,31
6	537695	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Barang/Jasa Lainnya	16,77	4,70	21,88	17,35	4,31	19,89	3,70
7	414004	Bandara Udara Beto Ambari di Buton	Barang/Jasa Lainnya	24,93	3,18	11,32	32,38	3,36	9,41	2,44
8	413508	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kolaka	Barang/Jasa Lainnya	8,83	0,91	9,32	6,78	2,16	24,18	8,61
9	416001	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari	Barang/Jasa Lainnya	22,45	1,55	6,45	12,86	1,89	12,82	2,33
10	413494	Unit Penyelenggara Pelabuhan Baubau	Barang/Jasa Lainnya	48,69	5,66	10,42	19,73	1,88	8,72	16,05

Sumber: MEBE-DJPb (diolah)

3.7. PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT

3.7.1. Penerusan Pinjaman

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman yang dilaksanakan bulan Januari 2020, penerusan pinjaman pada Kabupaten Konawe telah lunas dan saat ini menunggu Surat Penutupan Perjanjian Penerusan Pinjaman. Penerusan Pinjaman berdasar SLA-1110/DP3/1999 tersebut

Tabel 3. 16 Data SLA lingkup Sultra

No.	Nama SLA	Penerima SLA	Outstanding	Status	Keterangan
1	SLA-1110/DP3/1999	PEMKAB. KENDARI	0,00	Lunas	Menunggu penutupan penerusan pinjaman

Sumber: SLIM-DJPb (diolah)

berjumlah Rp711,99 juta yang penarikannya dilakukan sampai dengan periode 31 Desember 2001. Atas pinjaman tersebut, Kabupaten Konawe melakukan pembayaran dengan total pembayaran pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya mencapai Rp1,49 miliar sampai dengan Maret 2017.

3.7.2. Kredit program

Kredit Program adalah kredit/pembiayaan usaha yang disalurkan oleh lembaga keuangan, badan layanan umum atau koperasi simpan pinjam yang memperoleh fasilitas dari pemerintah untuk pembiayaan UMKM. Salah satu jenis Kredit Program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan kredit pembiayaan modal kerja dengan suku bunga rendah (karena disubsidi Pemerintah) yang diharapkan dapat dijadikan alat untuk menstimulasi para pelaku usaha pemula ataupun pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, sejak tahun 2017 pemerintah meluncurkan skema baru pembiayaan yaitu Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang

menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui KUR.

Sebagaimana terlihat pada **lampiran 2**, penyaluran KUR dan UMi lingkup Sultra tahun 2019 (*data SIKP per tanggal 20 Januari 2020*) mencapai Rp1,94 triliun yang disalurkan kepada 56.740 debitur. Adapun debitur terbanyak berada di Kab. Muna sebanyak 8.999 debitur atau 15,86% dengan nilai penyaluran mencapai Rp234,06 miliar. Sedangkan nilai penyaluran KUR terbesar di Kota Kendari sebesar Rp373,46 miliar atau 19,21%. Hal ini disebabkan banyaknya debitur KUR Kecil yang mendominasi penyaluran di Kota Kendari.

Data pada **lampiran 2** juga menunjukkan penyaluran KUR masih didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai mencapai Rp1,1 triliun atau 56,81% dan disalurkan kepada 28.774 debitur atau 50,71% dari total penyaluran di Sultra. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran KUR oleh perbankan masih mempertimbangkan sektor tersebut merupakan sektor dengan tingkat resiko gagal bayar yang kecil. Akan tetapi, perlu menjadi perhatian seluruh stakeholder KUR karena belum sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menargetkan penyaluran minimal 60% pada sektor Produksi.

Penyaluran UMi seluruhnya ditujukan untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan debitur terbanyak berada di Kab. Konawe sebanyak 1.313 debitur atau 45,94% dan nilai penyaluran mencapai Rp4,42 miliar atau 41,36%. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) mendominasi penyaluran UMi di Sultra dengan debitur mencapai 2.324 debitur atau 81,32% dengan nilai sebesar Rp7,03 miliar atau 65,72%.

Sementara jika melihat data penyaluran berdasarkan skema seperti terlihat pada **lampiran 2**, maka debitur KUR Mikro mendominasi penyaluran di Sultra sebanyak 46.109 debitur atau 81,26% dengan total penyaluran Rp942,26 miliar. Sedangkan jumlah penyaluran terbesar untuk KUR Kecil mencapai Rp990,24 miliar atau 50,94%.

Berdasarkan hasil Monitoring Kredit Program yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Prov. Sultra, penyaluran KUR di Sultra telah mampu meningkatkan usaha pelaku UMKM penerima KUR. Hal ini terlihat dari peningkatan omzet dan keuntungan yang diperoleh serta adanya penciptaan lapangan kerja. Sebanyak 82,54% responden menyatakan omzet usaha mereka meningkat yang tentunya berpengaruh kepada peningkatan untung usaha yang diperoleh responden sehingga sebanyak 77,78% responden menyatakan adanya peningkatan keuntungan setelah menerima KUR. Sementara itu 34,92% responden menyatakan adanya penambahan tenaga kerja.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Sultra. Namun, UMKM sering kali masih terdapat kendala berupa kurangnya informasi maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan, sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang investasi mereka. Hal ini juga terbukti pada hasil monitoring tersebut di atas, bahwa

60,32% debitur mendapatkan informasi terkait KUR dari Saudara/Teman/Tetangga, 36,51% lainnya mendapatkan informasi dari bank penyalur karena merupakan nasabah bank tersebut, sedang 1,59% memperoleh informasi dari iklan di media massa dan lainnya dengan mencari sendiri. Peran pemerintah belum dirasakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang KUR dan UMi. Menjadi tantangan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan publikasi/sosialisasi, dan membuka akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan, salah satunya dapat dilakukan dengan mendata profil pelaku usaha, dan meng-*upload* data pelaku UMKM potensial menerima KUR ke dalam aplikasi SIKP.

3.8. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS BELANJA WAJIB (*MANDATORY SPENDING*) DAN BELANJA INFRASTRUKTUR PUSAT DI DAERAH

3.8.1. *Mandatory Spending* di Daerah

Sesuai amanat undang-undang tentang pendidikan dan kesehatan bahwa pemerintah harus mengalokasikan belanja wajib (*mandatory spending*) di bidang pendidikan 20% dan kesehatan 5%. Total alokasi belanja wajib di Sultra mencapai Rp1,75 triliun atau 22,80%. Pagu belanja pegawai sebesar Rp1,51 triliun atau 19,71%, sementara belanja barang Rp2,51 triliun atau 32,78%, sehingga dari total pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp7,66 triliun belanja tidak wajib yang merupakan ruang fiskal Pemerintah Pusat di Sultra hanya sebesar 24,70%.

3.8.1.1. Belanja Sektor Pendidikan

Pagu Fungsi Pendidikan tahun 2019 lingkup Sultra sebesar Rp1,57 triliun atau 20,53%. Rasio belanja pendidikan terhadap total pagu APBN tahun 2019 meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 17,54%. Kenaikan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan melalui kucuran dana APBN, baik melalui belanja pemerintah pusat maupun melalui dana transfer. Realisasi fungsi pendidikan sebesar Rp1,51 triliun atau meningkat 35,47% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Hal ini untuk mendukung program strategis pemerintah di bidang pendidikan yaitu pemerataan layanan pendidikan berkualitas.

Adapun output pada program pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas meliputi bidik misi PTKI bagi ±459 orang mahasiswa, program Indonesia Pintar untuk 1.070 santri, penerima BOS bagi ± 61 ribu, tunjangan profesi bagi 1.171 guru, dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan sebanyak 430 ruang.

3.8.1.2. Belanja Sektor Kesehatan

Pagu Fungsi Kesehatan lingkup Sultra tahun 2019 sebesar Rp173,78 miliar atau 2,27%. Rasio belanja kesehatan terhadap total pagu APBN tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 1,86%. Kenaikan ini menunjukkan komitmen

pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat melalui kucuran dana APBN, baik melalui belanja pemerintah pusat maupun melalui dana transfer. Realisasi Fungsi Kesehatan mencapai 94,40% atau sebesar Rp164,04 miliar meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2018.

Dana tersebut diperuntukkan untuk program strategis pemerintah di bidang kesehatan yaitu peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat yang tersebar di output peningkatan surveilans gizi sebanyak 17 layanan, penyediaan alat laboratorium sebanyak 30 unit dan pemenuhan ketersediaan alokon di 358 faskes.

3.8.2. Belanja Infrastruktur

Berdasarkan tantangan geografi wilayah yang telah diuraikan sebelumnya pada bab I bahwa wilayah Sultra terdiri dari 74,25% atau 110.000 km² perairan dan memiliki banyak pulau. Kondisi tersebut tentu membutuhkan Kondisi tersebut membutuhkan infrastruktur untuk menghubungkan antar wilayah sesuai dengan kondisi geografisnya. Pembangunan konektivitas antara daratan dan kepulauan maupun antar kepulauan akan sangat mempermudah arus lalu lintas barang dan manusia yang bernilai ekonomis dengan demikian kesenjangan antar wilayah bisa dikurangi. Selain itu, pembangunan infrastruktur di bidang konektivitas di Sultra juga bertujuan untuk mempermudah akses menuju ke kawasan wisata, mengingat Sultra memiliki potensi di bidang pariwisata terutama wisata bahari.

Pembangunan infrastruktur di Sultra tidak hanya untuk konektivitas saja, tetapi juga dalam rangka peningkatan layanan dasar bagi masyarakat Sultra. Adapun output pembangunan infrastruktur di Sultra adalah sebagai berikut:

1. Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan, Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional, dan Dukungan Jalan Daerah
2. Pembangunan Jembatan, Penggantian Jembatan dan Preservasi Jembatan (penggantian jembatan di 2 lokasi di Sungai Rahabangga dan Sungai Asera)
3. Bendungan Baru Yang Dibangun (Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe) dan bendungan dalam tahap pelaksanaan (Pembangunan Bendungan Ladongi)
4. Infrastruktur Irigasi
5. Infrastruktur yang terkait pembangunan dan pengelolaan dermaga penyeberangan (Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa, pelabuhan penyeberangan Tomia dan Binongko)
6. Infrastruktur terkait Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara (Kapasitas Bandar Udara dan layanan Bandar Udara di Bandar Udara Halu Oleo Kendari, Bandar Udara Beto Ambari Baubau, Kantor UPBU Matahora, Kantor UPBU Sangia Ni Bandera, dan Bandar Udara Sugimanuru Muna)

Pembangunan infrastruktur di Sultra telah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Sultra. Berdasarkan hasil analisis regresi linear diperoleh bahwa :

1. R Square = 18,7% yang menandakan bahwa besar penyerapan tenaga kerja hanya dapat dijelaskan oleh belanja infrastruktur (belanja Modal akun 53) sebesar 18,7% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,433 ^a	,187	,162	,59838	2,690

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal

b. Dependent Variable: InY

2. F hitung =7,375, menunjukkan bahwa belanja infrastruktur di Sultra (belanja modal akun 53) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Sultra dengan probabilitas $0,011 < 0,05$

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,641	1	2,641	7,375	,011 ^b
	Residual	11,458	32	,358		
	Total	14,099	33			

a. Dependent Variable: InY

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal

3. Konstan a =10,856 sedang nilai trust/belanja modal=1,564E-012 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis $Y=10,856+1,564E-012X$ mencerminkan bahwa setiap peningkatan belanja modal rata-rata sebesar Rp1 triliun tenaga kerja akan terserap rata-rata sebesar 1,54 orang.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,856	,109		99,152	,000
	Belanja Modal	1,564E-012	,000	,433	2,716	,011

a. Dependent Variable: InY

BAB IV



Gerakan Pengendalian Penggerek Batang pada Tanaman Padi Sawah

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

4.1 APBD TINGKAT PROVINSI

Wilayah Sultra terbagi atas 18 Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 15 Pemerintah Kabupaten, 2 Pemerintah Kota dan 1 Pemerintah Provinsi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh Pemerintah Daerah lingkup Sultra secara agregat tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sesuai **tabel 4.1**

Tabel 4. 1 Profil APBD Sulawesi Tenggara

Uraian	2017			2018			2019		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
A.PENDAPATAN	17.319,74	16.694,56	96,39	18.891,45	18.430,87	97,56	20.855,38	19.534,26	93,67
PAD	1.244,91	1.424,04	114,39	2.044,73	1.701,09	83,19	2.277,89	1.882,01	82,62
Dana Transfer	15.802,12	14.799,50	93,66	16.042,11	16.285,95	101,52	17.631,36	17.095,96	96,96
LLPD yang Sah	272,71	477,55	175,11	804,61	443,83	55,16	946,13	556,29	58,80
B.BELANJA	20.713,69	17.059,72	82,36	19.072,13	18.096,50	94,88	22.026,11	19.413,62	88,14
Belanja Tidak Langsung	12.706,06	9.207,60	72,47	10.340,91	10.004,69	96,75	10.855,07	10.076,05	92,82
Belanja Langsung	8.007,63	7.852,10	98,06	8.731,22	8.091,81	92,68	11.171,04	9.337,57	83,59
C.SURPLUS(DEFISIT) A-B	-3.393,95	-365,16	10,76	-180,68	334,37	-185,06	-1.170,72	120,64	-10,30
D.PEMBIAYAAN	1.303,33	617,57	47,38	779,16	477,24	61,25	1.208,25	687,07	56,86
Penerimaan Pembiayaan	1.531,52	846,32	55,26	1.025,79	714,15	69,62	1.602,27	1.059,57	66,13
Pengeluaran Pembiayaan	228,19	228,75	100,25	246,64	236,91	96,05	394,02	372,5	94,54

Sumber: LKPD Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

APBD seluruh Pemerintah Daerah lingkup Sultra secara agregat terdiri dari unsur pendapatan daerah sebesar Rp18,43 triliun pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp19,53 triliun di tahun 2019, belanja daerah sebesar Rp18,09 triliun tahun 2018 dan meningkat menjadi Rp19,41 triliun pada tahun 2019, kemudian pembiayaan daerah yang meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp687,07 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp477,24 miliar.

Pendapatan Daerah dalam APBD 2019 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana Perimbangan yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat tahun 2019 mendominasi sumber pendapatan daerah, yaitu sebesar Rp17,09 triliun atau mencapai 87,51%. Jika dibandingkan dengan posisi tahun 2018 proporsi transfer daerah terhadap pendapatan turun menjadi sebesar 88,36%. Hal ini menandakan tingkat kemandirian keuangan lingkup Sultra sudah sedikit mengalami perbaikan. Sementara itu, penerimaan daerah berupa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2019 mencapai Rp556,29 miliar.

4.2 PENDAPATAN DAERAH

Sebagaimana telah diuraikan bahwa realisasi pendapatan pada tahun 2019 sebesar Rp19,53 triliun meningkat 5,98% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp18,43 triliun. Meningkatnya realisasi pendapatan tersebut didorong oleh meningkatnya realisasi pajak daerah yang

sangat signifikan meningkat dari Rp865,27 miliar di 2018 menjadi Rp1,14 triliun di tahun 2019. Komposisi pendapatan masih ditopang oleh peranan Pemerintah Pusat melalui Transfer/Perimbangan. Pendapatan transfer berkontribusi 87,51% dari total pendapatan daerah. Sementara itu kontribusi PAD terhadap total pendapatan terus meningkat, meskipun masih dalam jumlah yang relatif kecil dari 9,22% pada tahun 2018 menjadi 9,63% di tahun 2019. Pemerintah Pusat masih merupakan *stakeholder* utama dalam proses pembangunan. Inovasi dan kreatifitas Pemda dalam menggali PAD perlu diintensifkan. Pemda memiliki wewenang menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Secara umum, rendahnya PAD disebabkan Pemda kurang optimal dalam menggali dan menemukan keunggulan/potensi asli daerah. Selain itu, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah kemudian lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. Peningkatan PAD merupakan salah satu modal dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan public (*public service function*) dan fungsi pelaksanaan pembangunan (*development function*). PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemda untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun

Tabel 4. 2 Jenis Pendapatan APBD Sulawesi Tenggara

Pendapatan	2017			2018			2019		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	1.244,919	1.424,04	114,39	2.044,73	1.701,09	83,19	2.277,89	1.882,01	82,62
Pajak Daerah	600,40	745,27	124,13	678,72	865,27	127,49	1.048,41	1.138,77	108,61
Retribusi Daerah	188,25	82,49	43,82	342,67	144,95	42,30	237,11	120,38	50,34
HKD yang Dipisahkan	79,98	118,73	148,45	121,19	146,49	120,88	146,62	154,74	105,53
Lain-Lain PAD yang Sah	376,28	477,55	126,91	902,15	544,38	60,34	845,75	468,12	55,34
Dana Transfer/Perimbangan	15.802,12	14.799,51	93,66	16.042,11	16.285,95	101,52	17.631,36	17.095,96	96,96
DBH	649,98	311,64	47,95	427,37	582,39	144,07	807,87	766,36	94,86
DAU	9.192,27	9.447,66	102,78	9.821,73	10.012,73	101,94	10.282,66	10.264,28	99,82
DAK	3.555,71	3.279,09	92,22	4.004,91	3.668,73	91,61	3.615,44	3.328,70	92,06
Dana Penyesuaian	2.176,76	1.352,65	62,14	1.616,00	1.433,56	88,71	2.405,49	2.367,04	98,40
Transfer Dari Prov/Kota/Kab	227,400	408,47	179,63	172,1	588,54	365,59	519,90	369,58	71,08
LLPD	272,71	471,02	53,94	804,61	443,83	55,16	946,13	556,29	58,79
Hibah	30,16	37,67	124,90	189,28	184,05	97,24	497,66	336,46	67,60
Lain-lain	225,55	172,66	76,55	242,55	433,35	178,66	448,47	219,83	49,01
Total Pendapatan	17.319,75	16.694,57	96,39	18.891,45	18.430,87	97,56	20.855,38	19.534,26	93,66

Sumber: LKPD Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara (diolah)

proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan pemda.

4.2.1 Dana Transfer/Perimbangan

Dana Transfer/Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Sesuai **tabel 4.2** tercatat alokasi Dana transfer/perimbangan di Sultra meningkat dari Rp16,04 triliun di 2018 menjadi Rp17,63 triliun di 2019 atau tumbuh sebesar 9,91%. Sejalan dengan alokasi, realisasi dana transfer tumbuh sebesar 4,97% dari Rp16,28 triliun di 2018 menjadi Rp17,09 triliun di 2019. Peningkatan jumlah pagu dan realisasinya hampir pada semua komponen dan transfer, hanya Dana Alokasi Khusus yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio Dana Transfer/Perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah mencapai 87,51%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal lingkup Sultra masih rendah dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. APBD Pemerintah Daerah di sultra saat ini masih sangat tergantung dengan Dana Perimbangan, seharusnya dapat dikurangi bila saja Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan menggali PAD masing-masing daerah dengan baik.

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kepada pemerintah daerah melalui dana perimbangan merupakan konsekuensi dari kebijakan penyerahan kewenangan/urusan pemerintah pusat kepada daerah yang sesuai dengan prinsip *money follows function*. Prinsip otonomi daerah mengharuskan pemerintah pusat setiap tahunnya mengalokasikan dana transfer kepada pemerintah daerah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan APBN, jumlah dana yang ditransfer ke daerah selalu meningkat setiap tahunnya. Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat dalam APBD diklasifikasikan menjadi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang totalnya untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai Rp16,28 triliun pada tahun 2018 dan Rp17,09 triliun pada tahun 2019.

Perkembangan dana Transfer ke Daerah dari sebelum pelaksanaan desentralisasi sampai dengan tahun 2019 jika dilihat dari proporsi antara besaran PAD dan Transfer ke Daerah, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah relatif masih tergantung kepada pemerintah pusat. Kondisi ini perlu diperbaiki segera dengan cara mengoptimalkan potensi PAD sehingga dapat mendorong kemandirian masing-masing daerah. Upaya dalam optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada UU No. 28 Tahun 2009 yang mengatur bahwa perluasan pajak daerah dan retribusi agar mengedepankan aspek ekstensifikasi atau perluasan

objek pajak, penambahan jenis-jenis pajak baru secara limitatif, serta optimalisasi tarif pajak daerah yang akan dipungut berdasarkan diskresi masing-masing daerah.

Di sisi lain, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,96% dari tahun sebelumnya. Meskipun angka ini tidak terlalu signifikan, namun upaya pemerintah daerah untuk berusaha mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat menunjukkan adanya kemajuan dan untuk selanjutnya agar terus ditingkatkan upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga porsi dana perimbangan dalam APBD dapat terus mengecil dan kemandirian daerah dapat segera terealisasi.

4.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2019 terdapat peningkatan realisasi PAD Pemerintah Daerah di wilayah Sultra sebesar 10,63% dibanding tahun 2018 atau secara agregat mencapai Rp180,92 miliar. Peningkatan PAD pada tahun 2019 ini disumbang oleh peningkatan pajak daerah yang sangat signifikan yang mencapai hingga 108% dari target yang telah ditetapkan sekaligus merupakan contributor utama PAD. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Sultra sepanjang tahun 2019 dan pelaksanaan tata kelola pajak daerah yang semakin baik dan akuntabel dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Berdasarkan komposisi Pendapatan Daerah secara keseluruhan, maka rasio pajak daerah terhadap PDRB (*tax ratio*) di Sultra tahun 2019 hanya sebesar 0,88% walaupun secara nominal pajak daerah telah menjadi penyumbang pendapatan terbesar dalam struktur PAD. *Tax ratio* ini masih sangat kecil bahkan masih di bawah rata-rata rasio pajak pemerintah daerah secara nasional yang sebesar 2,6%. Bila dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, rasio pajak daerah Pemerintah di Sultra tahun 2019 mengalami kenaikan dari sebesar 0,69% pada tahun 2018 menjadi 0,88%. Kondisi ini menunjukkan semakin banyak potensi-potensi pajak daerah yang digali dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Obyek-obyek pajak baru yang muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Sultra sudah mulai digarap dengan baik. Selain itu, Sultra juga memiliki banyak destinasi wisata berkelas dunia seperti Taman Nasional Wakatobi ataupun Pulau Labengki. Dengan potensi pariwisata yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten/Kota seharusnya menjadikan Sultra memiliki basis pajak daerah yang cukup kuat, khususnya yang terkait dengan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan lainnya.

Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya agar bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah ini untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih baik melalui penetapan regulasi, kebijakan dan langkah-langkah strategis yang tepat agar potensi-potensi yang ada dapat dioptimalkan. Penerimaan pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah harus dapat ditingkatkan terus-

menerus untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap Dana Perimbangan.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Sebagai pendorong utama akselerasi pendapatan adalah pertumbuhan yang sangat signifikan dari lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2018 realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp443,83 miliar meningkat menjadi Rp556,29 miliar pada tahun 2019. Struktur Lain-lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dengan realisasi sebesar Rp336,46 miliar pada tahun 2019 dan Pendapatan lainnya sebesar Rp219,83 miliar.

4.3 BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah lingkup Sultra pada tahun 2019 mencapai Rp19,41 triliun meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp18,09 triliun. Peningkatan realisasi belanja hampir pada semua belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah Dana Transfer dari Pusat ke Daerah (DAU, DAK, Dana Penyeimbang, Dana Kontingensi, DBH, dll). Tujuan analisis Belanja Daerah antara lain adalah untuk mengetahui kontribusi pengeluaran daerah terhadap pengeluaran pemerintah secara nasional. Analisis Belanja Daerah dapat dilakukan berdasarkan klasifikasi belanja daerah seperti klasifikasi urusan, klasifikasi fungsi dan sebagainya.

4.3.1 Rincian Belanja Daerah Berdasarkan klasifikasi urusan

Belanja daerah dalam APBD digunakan untuk membiayai Urusan Wajib yang merupakan urusan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, serta urusan pilihan adalah urusan yang sesuai kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, titik beratnya diletakkan pada desentralisasi di sisi pengeluaran (*expenditure assignment*) yang ditandai dengan adanya pembagian urusan pada berbagai tingkat pemerintahan.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah seperti Kelautan dan Perikanan,

Pertanian, Kehutanan dan sebagainya. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Lampiran 3 menunjukkan profil 33 urusan pemerintah daerah lingkup Sultra tahun 2017 sampai dengan 2019. Adapun alokasi anggaran terbesar dalam APBD Pemerintah Daerah di Sultra tahun 2019 pada urusan wajib adalah untuk mendanai Administrasi Pemerintahan sebesar Rp7,47 triliun (34,42%), Pendidikan sebesar Rp4,73 triliun (21,81%), Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3,38 triliun (15,58%), dan Kesehatan sebesar Rp2,77 triliun (12,76%). Sedangkan untuk urusan pilihan alokasi anggaran terbesar adalah pada Urusan Pertanian sebesar Rp574,64 miliar (2,52%). Pemberian alokasi anggaran pada masing-masing urusan ini menunjukkan komitmen dan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, dunia usaha serta *stakeholder* lainnya. Alokasi anggaran urusan wajib paling besar adalah pada pendidikan. Alokasi anggaran yang besar pada urusan pendidikan menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Alokasi anggaran pendidikan ini ditujukan untuk meningkatkan rata-rata usia sekolah anak di Sultra, meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesempatan belajar baik berupa peningkatan jumlah sekolah, guru maupun murid dari tahun ke tahun.

Alokasi anggaran pendidikan oleh pemerintah tersebut dialokasikan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan non formal dan Program Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan serta Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Selain urusan pendidikan, urusan wajib lainnya yang mendapat prioritas adalah urusan kesehatan. Urusan kesehatan mendapat alokasi anggaran Rp2,77 triliun pada tahun 2019 meningkat sebesar 18,09% jika dibandingkan alokasi pada tahun 2018 sebesar Rp2,34 triliun. Alokasi tersebut untuk membiayai program obat dan perbekalan kesehatan, program upaya kesehatan masyarakat, program pengawasan obat dan makanan, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program lingkungan sehat, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, program standarisasi pelayanan kesehatan, Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, dan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa. Hal ini berdampak langsung pada tersedianya sarana fisik di bidang kesehatan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas yang tersebar di semua kabupaten/kota juga sangat mendapat perhatian pemerintah daerah melalui program upaya kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan yang dibutuhkan bukan hanya tenaga medis seperti dokter, bidan dan perawat dan tenaga farmasi tapi juga tenaga non medis seperti ahli gizi, teknisi medis, sanitasi dan puskesmas yang tersebar baik di rumah sakit, puskesmas, farmasi, labkesda maupun di dinas.

4.3.2 Rincian Belanja Daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi)

Penyusunan anggaran Belanja Daerah dapat menunjukkan apakah suatu daerah *pro poor, growth, and jobs*. Pada komponen Belanja Daerah juga nampak seberapa besar porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menggambarkan seberapa besar belanja pemerintah daerah yang digunakan dalam upaya untuk menyejahterakan penduduk di suatu daerah, dapat digunakan berbagai indikator seperti rasio belanja pegawai, rasio belanja modal dan sebagainya.

Pada prinsipnya, dalam tataran kebijakan, untuk menuju pelaksanaan Belanja Daerah yang berdampak positif kepada masyarakat perlu diupayakan agar pemerintah daerah mempercepat realisasi belanjanya dan menjalankan kebijakan belanja yang baik, antara lain dengan mendorong agar proses penetapan Perda APBD dapat dilakukan secara tepat waktu, menetapkan anggaran Belanja Modal yang semakin besar dan tepat sasaran, mempertajam penggunaan anggaran Belanja Pegawai, dan sebagainya. Komposisi Jenis Belanja pada APBD lingkup secara agregat dapat dilihat pada tabel 4.3:

Tabel 4. 3 Profil APBD Sulawesi Tenggara Berdasarkan Klasifikasi Jenis Belanja

Jenis Belanja	2018		2019	
	Pagu	Pagu	Realisasi	Porsi (%)
Belanja Tidak Langsung	10.340,90	10.855,07	10.076,05	92,82
Belanja Pegawai	6.764,20	7.195,20	6.608,37	91,84
Belanja Bunga	38,33	22,45	21,09	93,94
Belanja Subsidi	5,05	369,89	70,98	19,19
Belanja Hibah	934,09	670,56	641,99	95,74
Belanja Bantuan Sosial	26,78	31,82	27,30	85,80
Belanja Bagi Hasil	311,15	420,48	373,07	88,72
Belanja Bantuan Keuangan	2.205,20	2.466,71	2.389,73	96,88
Belanja Tidak Terduga	56,10	47,48	14,31	30,14
Belanja Langsung	8.731,22	11.171,04	9.337,57	83,59
Belanja Barang dan Jasa	3.710,09	4.833,63	4.137,60	85,60
Belanja Modal	5.021,13	6.337,41	5.199,97	82,05
Total Belanja	19.072,12	22.026,11	19.413,62	88,14

Sumber: LKPD Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi belanja Pegawai mencapai Rp6,60 triliun atau 91,84%. Mengingat bahwa proporsi belanja pegawai menempati porsi terbesar dalam APBD, perlu dianalisis rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Pada tahun 2019 rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah sebesar 34,03%, Tujuan analisis rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah adalah untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah

penjumlahan dari Belanja Pegawai langsung dan Belanja Pegawai tidak langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

Alokasi Belanja Modal tahun 2019 meningkat menjadi Rp6,33 triliun dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp5,02 triliun. Porsi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi belanja modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Peningkatan rasio belanja pegawai pada tahun 2019 dari tahun sebelumnya, perlu menjadi perhatian pemerintah lingkup Sultra. Hal ini agar pemerintah mempunyai alokasi yang lebih besar untuk belanja modal dan belanja barang, sehingga memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sultra.

4.3.3 Rincian Belanja Daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi)

Mengacu pada standar COFOG dari OECD, belanja Pemerintah Daerah di Sultra dapat dibagi menjadi 9 (Sembilan) fungsi pemerintahan. Secara alokasi terdapat 4 (empat) fungsi pemerintahan yang mendapat porsi APBD besar yakni fungsi Pelayanan Umum (35,37%), Pendidikan (23,27%), Kesehatan (14,70%) dan Perumahan dan Fasilitas Umum (14,00%). Selain kelima fungsi tersebut, fungsi-fungsi yang lain memiliki porsi masing-masing di bawah 10%. Sejalan dengan indikator sebelumnya yaitu alokasi belanja pemerintah daerah berdasarkan urusan, maka belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsinya di Sultra juga terindikasi menitikberatkan pada pelayanan masyarakat, Pendidikan, pembangunan infrastruktur dan kesehatan.

Tabel 4. Profil APBD Sulawesi Tenggara Berdasarkan Klasifikasi Fungsi

Fungsi	2017		2018		2019	
	Pagu	Porsi (%)	Pagu	Porsi (%)	Pagu	Porsi (%)
Pelayanan Umum	6.780,82	35,90	6.927,56	35,90	6.769,80	35,37
Ketertiban dan Keamanan	195,59	1,02	197,57	1,02	252,35	1,31
Ekonomi	1.330,24	7,97	1.538,21	7,97	1.425,94	7,45
Lingkungan Hidup	166,63	1,02	196,06	1,02	169,56	0,88
Perumahan dan Fasilitas umum	2.693,97	15,57	3.003,55	15,57	2.680,10	14,00
Kesehatan	2.099,60	12,43	2.398,06	12,43	2.813,55	14,70
Pariwisata dan Budaya	136,39	1,03	198,71	1,03	300,27	1,56
Pendidikan	3.970,84	23,59	4.552,15	23,59	4.454,23	23,27
Perlindungan Sosial	237,41	1,47	283,28	1,47	270,23	1,41

Sumber: LKPD Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara

4.4 PENGELOLAAN BLU DAERAH

4.4.1 Profil dan jenis layanan satker BLU Daerah

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Badan Layanan Umum dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana pada pasal 68 dan pasal 69 undang-undang tersebut menyatakan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan hal tersebut, maka BLU dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. BLU dapat dibentuk baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. BLU yang dibentuk di daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah (disingkat BLUD).

Sebagai tindak lanjut atas undang-undang nomor 1 tahun 2004 di atas, Menteri Dalam Negeri kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka persyaratan substantif bagi SKPD agar dapat menerapkan pola keuangan BLU di daerah adalah SKPD atau unit berkenaan harus memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan layanan umum, yang berupa antara lain:

1. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;
2. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
3. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan ditetapkan menjadi BLUD harus memenuhi persyaratan teknis antara lain berupa:

1. Kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi Sekretaris Daerah untuk SKPD atau Kepala SKPD untuk Unit Kerja;
2. Kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat.

Sampai dengan tahun 2018, terdapat 13 (tiga belas) unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Sultra yang ditetapkan statusnya menjadi BLUD. Adapun rincian BLUD di masing-masing pemerintah daerah lingkup Sultra sebagaimana lampiran 2. Sultra memiliki 11 (sebelas) BLUD di sektor Kesehatan dan 2 (dua) BLUD di sektor lainnya, yaitu BLUD Harum Kota Kendari yang bergerak di bidang layanan simpan pinjam dan BLUD UPTD KPH Unit XXIV Gularaya yang bergerak di bidang pengelolaan hasil hutan produksi.

4.4.2 Perkembangan pengelolaan aset, PNBP dan RM BLU Daerah

Perkembangan BLUD di Sultra tahun 2019 dapat diukur dari nilai aset dan Pagu operasionalisasi pengelolaan BLUD dalam setahun. Profil aset dan operasionalisasi BLUD di Sultra sebagaimana tabel 4.... Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa aset terbesar BLUD

Tabel 4. 4 Profil Aset dan Pagu satker BLU Daerah di Sulawesi Tenggara

No	Jenis Layanan	Nama BLUD	Nilai Aset	Pagu PNBP	Pagu RM	Jumlah Pagu
1	Kesehatan	RSUD Bahtera Mas Prov Sultra	704,79	124,86	153,33	278,19
2	Kesehatan	RSUD Abunawas Kendari	91,00	40,00	0,20	40,20
3	Kesehatan	RSUD Kab. Konawe	268,61	45,6	45,6	91,20
4	Kesehatan	RSUD Kab. Konawe Selatan	106,00	0	38,48	38,48
5	Kesehatan	RSUD Kab. Konawe Utara	0,108	0,00	19,59	19,59
6	Kesehatan	RSUD Kab. Bombana	97,00	9,00	14,30	23,30
7	Kesehatan	RSUD Kota Baubau	137,07	24,50	43,77	68,27
8	Kesehatan	RSUD Wakatobi	68,17	0	0	0
9	Kesehatan	RSUD HM. Djafar Harun Kolaka Utara	36,52	11,30	28,73	40,03
10	Kesehatan	RSUD Kab. Kolaka	26,60	0	51,74	51,74
11	Kesehatan	RSUD Kab. Muna	188,14	34,82	34,82	69,64
12	Simpan Pinjam	BLUD Harum Kota Kendari	2,99	0	0	0
13	Pengelolaan Hutan Produksi	BLUD UPTD KPH Unit XXIV Gularaya	2,83	0,22	0,72	0,94

Sumber : Data BLUD (diolah)

terdapat pada RSUD Bahteramas Prov. Sultra, yaitu sebesar Rp704,79 miliar, jumlah aset yang besar disebabkan pembangunan gedung dan penambahan peralatan dan mesin yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain tempatnya yang berada di ibu kota provinsi, RSUD Bahteramas kedepannya diharapkan menjadi rumah sakit rujukan yang berstandar internasional di wilayah Sultra. Untuk itu sarana dan prasarana rumah sakit selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun, baik pembangunan gedung maupun peralatan medisnya sebagai penunjang operasional Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Sultra. Selain RSUD Bahteramas Prov. Sultra, peningkatan aset signifikan terjadi pada RSUD Konawe, dimana rumah sakit tersebut dibangun menggunakan dana yang berasal dari kerjasama dengan PT. SMI sebesar Rp231 miliar, dan telah diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tanggal 29 Agustus 2018. Diharapkan pembangunan rumah sakit ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Konawe dan sekitarnya.

Pada tahun 2019 porsi pagu PNBPN semakin meningkat yang disertai dengan penurunan porsi APBD terbesar terjadi pada RSUD Bahteramas Prov. Sultra. Meningkatnya pagu PNBPN ini mengindikasikan ketergantungan pendanaan BLUD terhadap dana APBD semakin berkurang. Sebagian besar pegawai BLUD berstatus PNS yang digaji menurut sistem penggajian ASN. Tata kelola BLUD yang baik dapat dilihat dari pendapatan operasional BLUD yang terus bertambah. Penerimaan BLUD yang semakin besar akan berdampak pada semakin berkurangnya ketergantungan BLUD terhadap APBN/APBD. Keuntungan BLUD yang semakin banyak nantinya diharapkan membantu likuiditas Pemerintah Daerah melalui kontribusi dalam APBD.

4.4.3 Analisis Legal

Dalam pengelolaan BLUD terdapat beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) antara lain Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 653 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 6 tahun 2008. Peraturan-peraturan tersebut telah sinkron dengan peraturan induk pengelolaan BLU baik dari kelembagaan, tata kelola, SDM, maupun pengendalian sebagaimana diatur dalam PP nomor 23/2005 jo PP nomor 74/2012 tentang Pengelolaan BLU dan Permendagri nomor 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

Selain itu dalam pengelolaan BLUD, Pemerintah Daerah dan satuan kerja BLUD juga harus mempedomani peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. PP no. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Permenkeu no.217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Permendagri 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Permendagri 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
6. Keputusan Menteri Kesehatan no. 455 tahun 2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

4.5 SURPLUS/DEFISIT APBD

4.5.1 Rasio surplus/defisit terhadap agregat pendapatan

Rasio ini untuk mengetahui proporsi adanya surplus/defisit anggaran terhadap pendapatan, yang menunjukkan performa fiskal pemerintah daerah dalam menghimpun

pendapatan untuk mengcover belanja, atau penghematan belanja dengan kondisi pendapatan tertentu. Rasio surplus/defisit terhadap pendapatan merupakan hasil perhitungan surplus/defisit dibagi total pendapatan APBD. Surplus APBD lingkup Sultra secara agregat tahun 2019 mencapai Rp120,64 miliar, sedangkan total pendapatan APBD mencapai Rp19,53 triliun sehingga rasio surplus Sultra sebesar 0,61%.

4.5.2 Rasio surplus terhadap realisasi dana transfer

Rasio ini untuk mengetahui proporsi adanya surplus/defisit anggaran terhadap salah satu sumber pendapatan APBD, yaitu realisasi pencairan dana transfer. Hal ini dapat menunjukkan eksese likuiditas Pemda akibat *frontloading* pencairan dana transfer. Hal ini dapat menjadi sinyal bagi Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi timing pencairan dana transfer, terutama pada daerah yang sangat bergantung pada dana transfer namun mengalami eksese likuiditas. Rasio defisit terhadap Dana Transfer diperoleh dengan menghitung surplus dibagi total realisasi dana transfer. Jumlah surplus tahun 2019 mencapai Rp120,64 miliar sedangkan total realisasi dana transfer mencapai Rp17,09 triliun sehingga angka rasio terhadap total realisasi dana transfer sebesar 0,70%.

4.5.3 Rasio surplus/defisit terhadap PDRB

Rasio surplus/defisit terhadap PDRB merupakan Indikator yang menggambarkan kesehatan ekonomi regional, semakin kecil rasionya berarti daerah tersebut mampu memproduksi barang dan jasa yang cukup baik untuk membiaya hutang akibat defisit anggaran pemerintah daerah. Rasio surplus/defisit thd PDRB didapat dengan cara menghitung Surplus atau defisit APBD dibagi PDRB. Nilai surplus APBD Sultra Tahun 2019 sebesar Rp120,64 miliar, sedangkan PDRB-ADHB Sultra sebesar Rp129,26 triliun sehingga diperoleh rasio sebesar 0,09%. Nilai rasio menunjukkan bahwa Sultra mampu memproduksi barang dan jasa yang cukup baik untuk membiayai roda pemerintahan.

4.6 PEMBIAYAAN

Dalam aspek pembiayaan, Pemerintah Daerah cenderung memanfaatkan SiLPA sebagai penerimaan pembiayaan. Tercatat pembiayaan melalui SiLPA pada tahun 2019 sebesar Rp966,53 miliar dan sisanya berupa penerimaan kembali pinjaman sebesar Rp93,04 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan lebih banyak dipergunakan untuk pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp258,57 miliar, sisanya untuk penyertaan modal/investasi sebesar 113,92 miliar.

Tabel 4. 5 Pembiayaan Daerah

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.059.570.722.046,00
1. Penggunaan SiLPA	966.533.250.260,00
2. Pinjaman Dalam Negeri	93.037.471.786,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	372.500.804.345,00
1. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	113.925.912.541,00
2. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	258.574.891.804,00

Sumber: LKPD Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara

Kontribusi dana SiLPA terhadap penerimaan pembiayaan sangat dominan. Pemda belum memanfaatkan secara maksimal ruang penarikan pinjaman daerah yang diberikan oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018 disebutkan bahwa pinjaman daerah bermanfaat untuk membiayai infrastruktur, investasi prasarana dalam rangka pelayanan publik. Kondisi ini disebabkan oleh kinerja PAD yang masih belum stabil menyebabkan pemda enggan melakukan penarikan pinjaman daerah. Pemda masih melihat APBD sebagai instrument untuk menjalan roda birokrasi bukan untuk memberikan stimulus kepada perekonomian daerah. Keengganan menarik pinjaman di satu sisi menunjukkan bahwa Pemda masih belum melihat adanya urgensi untuk mengembangkan daerahnya melalui belanja yang lebih tinggi misalkan untuk pembangunan infrastruktur dan pendirian industrialisasi yang akan mendatangkan manfaat di masa yang akan datang.

4.6.1 Rasio pinjaman daerah atau obligasi daerah terhadap total pembiayaan

Rasio ini untuk mengetahui proporsi pencairan pinjaman yang dilakukan daerah ataupun penerbitan obligasi daerah untuk membiayai defisit APBD. Rasio Pinjaman Daerah dihitung dengan cara Realisasi pinjaman daerah atau obligasi daerah dibagi Total realisasi pembiayaan. Realisasi Pinjaman Daerah atau Obligasi Daerah Sultra sebesar Rp93,03 miliar, sedangkan total realisasi pembiayaan adalah senilai Rp1,05 triliun sehingga diperoleh angka rasio 8,78%. Angka Rasio pinjaman daerah atau obligasi daerah terhadap total pembiayaan lingkup Sultra secara agregat masih kecil. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah dalam pembiayaannya lebih mengandalkan kepada penggunaan SiLPA.

4.6.2 Keseimbangan primer

Rasio ini mencerminkan indikasi likuiditas. Semakin besar surplus keseimbangan primer, maka semakin baik kemampuan untuk membiayai defisit. Keseimbangan primer diperoleh dengan menghitung Total Pendapatan APBD dikurangi Total Belanja APBD tidak termasuk Biaya Bunga. Total Pendapatan APBD lingkup Sultra tahun 2019 sebesar Rp19,53 triliun, sedangkan total belanja senilai Rp19,41 triliun termasuk didalamnya belanja bunga sebesar Rp21,09 miliar sehingga diperoleh nilai keseimbangan primer sebesar Rp120,64 miliar.

Tujuan analisis keseimbangan primer untuk mengukur apakah posisi fiskal pemerintah masih surplus jika pembayaran bunga tidak dihitung sebagai pengeluaran, untuk mengetahui apakah kondisi kesulitan fiskal tahun ini berasal dari akumulasi hutang tahun-tahun yang lalu. Keseimbangan primer Sultra menunjukkan bahwa kondisi fiskal tidak dibebani akumulasi hutang tahun lalu, namun lebih dikarenakan kebijakan ekspansif. Keseimbangan Umum didapat dengan cara menghitung Pendapatan

dikurangi Belanja. Sehingga diperoleh Keseimbangan Umum Sulawesi Tenggara Tahun 2019 pada angka surplus Rp120,64 miliar.

Salah satu tujuan analisis keseimbangan umum adalah untuk mengetahui apakah kebijakan fiskal yang dilakukan bersifat ekspansif atau kontraktif. Jika $P < B =$ Defisit, APBN bersifat ekspansif untuk menggerakkan ekonomi dan mampu mengatasi kondisi resesi ekonomi, namun berpotensi terjadinya default jika tingkat defisit tidak terjaga. Angka defisit dikatakan masih terjaga apabila nilainya kurang dari atau sama dengan 3% PDRB.

4.7 ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Analisis horizontal dan vertikal digunakan untuk menginformasikan dan menilai kinerja pelaksanaan APBD di wilayah Sultra.

a. Analisis Horizontal

Dari tabel 4.7, dapat kita lihat bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mampu menghimpun PAD paling besar yaitu sebesar Rp1,00 triliun, dengan komposisi penerimaan terbesar berasal dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp864,04 miliar, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp59,28 miliar. Hal ini karena Sesuai UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Provinsi dapat memungut pajak daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Jenis-jenis pajak tersebut menyumbang pendapatan pajak terbesar. Sedangkan Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan serta BPHTB.

Untuk tingkat Kabupaten/Kota, Kota Kendari menghimpun Pendapatan terbesar yaitu Rp215,30 miliar yang mana kontribusi PAD-nya berasal dari pajak daerah sebesar Rp119,62 miliar, Lain-lain PAD yang Sah Rp66,37 miliar, Retribusi Rp.23,93 miliar dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp5,38 miliar. Hal ini disebabkan

Tabel 4. 6 Realisasi Pendapatan 2019 Per Kab/Kota/Prov Sultra (dalam miliar)

Prov/Kab/Kota	Transfer	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019				Jumlah PAD	Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan
		Pajak Daerah	Retribusi	HPKDYD	Lain-Lain PAD yg Sah			
Prov.Sultra	2.960,19	864,04	22,13	56,45	59,28	1.001,90	77,91	4.040,00
Kota Kendari	1.044,79	119,62	23,93	5,38	66,37	215,30	54,52	1.314,61
Kab. Konse	1.300,82	20,67	10,41	7,41	5,29	43,78	-	1.344,60
Kab. Konawe	1.006,05	11,94	24,13	4,27	44,78	85,12	201,13	1.292,30
Kab. Konut	853,78	3,14	1,68	3,59	4,35	12,76	19,06	885,60
Kab. Konkep	544,75	2,02	0,18	1,85	13,98	18,03	3,50	566,28
Kab. Bombana	907,91	10,43	2,68	10,26	24,95	48,32	0,35	956,58
Kota BauBau	765,67	25,07	5,46	7,44	47,92	85,89	37,51	889,07
Kab. Buton	702,05	3,83	8,29	5,03	4,20	21,35	0,09	723,49
Kab. Butur	620,85	5,49	2,69	6,43	4,86	19,47	1,45	641,77
Kab. Buteng	582,16	3,51	2,30	1,16	8,50	15,47	17,79	615,42
Kab. Wakatobi	833,90	7,43	1,04	11,98	15,71	36,16	42,59	912,65
Kab. Buse	564,30	1,60	1,62	0,78	11,03	15,03	38,55	617,88
Kab. Kolaka	1.137,79	37,35	6,18	12,02	56,70	112,25	35,71	1.285,75
Kab. Kolaka Utara	806,94	6,41	2,90	12,20	27,90	49,41	16,35	872,70
Kab. Kolaka Timur	676,67	5,43	2,28	3,96	32,94	44,61	-	721,28
Kab. Muna	1.144,77	6,46	1,52	3,36	31,14	42,48	9,78	1.197,03
Kab. Muna Barat	642,57	4,33	0,96	1,17	8,22	14,68	-	657,25
Jumlah	17.095,96	1.138,77	120,38	154,74	468,12	1.882,01	556,29	19.534,26

Sumber: LKPD Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

posisi Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi yang sekaligus juga merupakan pusat perekonomian Sultra. Sedangkan Pendapatan Daerah terkecil adalah Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp12,76 miliar. Hal ini disebabkan kondisi kabupaten tersebut sebagai Daerah Otonomi Baru, sehingga potensi-potensi penerimaan belum bisa optimal dan masih perlu terus dikembangkan.

b. Analisis Vertikal

Realisasi Pendapatan daerah secara agregat mencapai Rp19,53 miliar sedangkan kontribusi PAD hanya sebesar 9,63% atau mencapai Rp1,88 miliar. Hal ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat dan kurangnya kemandirian fiskal daerah. Analisis vertikal dilakukan dengan mengevaluasi kapasitas fiskal daerah. Analisis kapasitas fiskal daerah adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan Keuangan Daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) yang digunakan untuk membiayai tugas pemerintahan daerah setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Dengan kata lain rumus perhitungan Kapasitas Fiskal adalah $PAD + DBH + DAU + LP - BP$ dibagi dengan jumlah penduduk miskin. PAD lingkup Sultra sebesar Rp1,70 triliun, DBH Rp311,64 miliar, DAU Rp10,01 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp443,83 miliar, sedangkan Belanja Pegawai mencapai Rp6,29 triliun, serta jumlah Penduduk Miskin sesuai data BPS sebanyak 299.970 jiwa. Bila mengacu kepada PMK nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, maka Sulawesi Tenggara merupakan daerah dengan indeks kapasitas fiskal 0,284 sehingga termasuk kategori kapasitas fiskal sangat rendah.

4.7.1 Analisis Kapasitas Fiskal Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kemampuan keuangan

Tabel 4. 7 Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota

Kuadran I (Sangat Rendah) (Indeks Kapasitas Fiskal lebih kecil dari 0,509)	Kuadran III (Sedang) (Indeks Kapasitas Fiskal antara 0,720 s.d 1,089)
1. Kab. Buton Selatan (0,311) 2. Kab. Buton (0,324) 3. Kab. Buton Tengah (0,369) 4. Kab. Muna Barat (0,378) 5. Kab. Muna (0,494) 6. Kab. Wakatobi (0,433) 7. Kab. Kolaka Utara (0,415) 8. Kab. Konawe Utara (0,491) 9. Kab. Buton Utara (0,419) 10. Kab. Konawe Kepulauan (0,422) 11. Kab. Kolaka Timur (0,474)	1. Kab. Kolaka (0,774) 2. Kab. Konawe (1,024)
Kuadran II (Rendah) (Indeks Kapasitas Fiskal 0,509 s.d. 0,720)	Kuadran IV (Tinggi) (Indeks Kapasitas Fiskal diatas 1,089 s.d 1,959)
1. Kota Baubau (0,622) 2. Kab. Konawe Selatan (0,637) 3. Kab. Bombana (0,635)	1. Kota Kendari (1,227)
Kuadran V Sangat Tinggi) (Indeks Kapasitas Fiskal diatas DIATAS 1,959)	

Sumber: PMK No 126/PMK.07/ 2019

pemda di Sultra dalam penyelenggaraan pemerintahan umum beragam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, diketahui bahwa indeks kapasitas fiskal daerah dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori.

Berdasarkan tabel 4.8, terlihat bahwa tidak ada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sultra yang mempunyai kapasitas fiskal dengan kategori sangat tinggi. Pemkot Kendari merupakan satu-satunya pemda dengan kapasitas fiskal dengan kategori tinggi. Pemerintah Kab. Kolaka dan Pemerintah Kab. Konawe berada dalam kuadran III dengan kapasitas fiskal kategori sedang. Sedangkan dominan pemda memiliki kategori kapasitas fiskal sangat rendah sebanyak 11 pemda dan dengan kapasitas fiskal kategori rendah sebanyak 3 pemda yaitu Pemkot Baubau, Pemkab Konawe Selatan dan Pemkab Bombana. Kondisi ini selain dipengaruhi faktor jumlah penduduk miskin yang cukup besar namun tidak diimbangi oleh kemampuan fiskal dalam menghasilkan sumber pendapatan. Selain itu, besarnya jumlah belanja pegawai mengurangi kemampuan fiskal daerah dalam membiayai sektor pelayanan umum dan infrastruktur.

4.8 PERKEMBANGAN BELANJA WAJIB DAERAH

4.8.1 Belanja Daerah Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas Pemerintah. Pada sisi fiskal, prioritas tersebut tertuang dalam earmarking anggaran

Tabel 4. 8 Tiga Jenis Urusan Belanja Wajib

Urusan Pemerintahan	2017		2018		2019	
	Pagu	Porsi (%)	Pagu	Porsi (%)	Pagu	Porsi (%)
1.Pendidikan	4.015,40	20,47	4.431,58	22,88	4.734,02	21,81
2.Kesehatan	2.053,61	10,21	2.345,94	12,11	2.770,55	12,76
3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.699,23	13,18	2.798,47	14,45	3.381,32	15,58

Sumber: LKPD Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

sedikitnya 20% sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Concern* Pemda se-Sultra terhadap aturan tersebut tercermin dari pagu belanja urusan Pendidikan yang selalu melebihi target yang ditetapkan (20%), pada tahun 2017 pagu belanja urusan pendidikan sebesar 20,47%, kemudian di 2018 mencapai 22,88% dan di 2019 sebesar 21,81%. Secara nominal dana urusan Pendidikan pada tahun 2017 sebesar Rp4,01 triliun kemudian meningkat menjadi Rp4,43 triliun di 2018 dan meningkat kembali menjadi Rp4,73 triliun pada tahun 2019. Belanja urusan Pendidikan menampakkan hasil, secara bertahap alokasi belanja urusan pendidikan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan masyarakat. Hal ini diindikasikan dari meningkatnya alokasi belanja urusan Pendidikan juga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah menurut Kabupaten/Kota dan tingkat pendidikan di Sultra.

4.8.2 Belanja Daerah Sektor Kesehatan

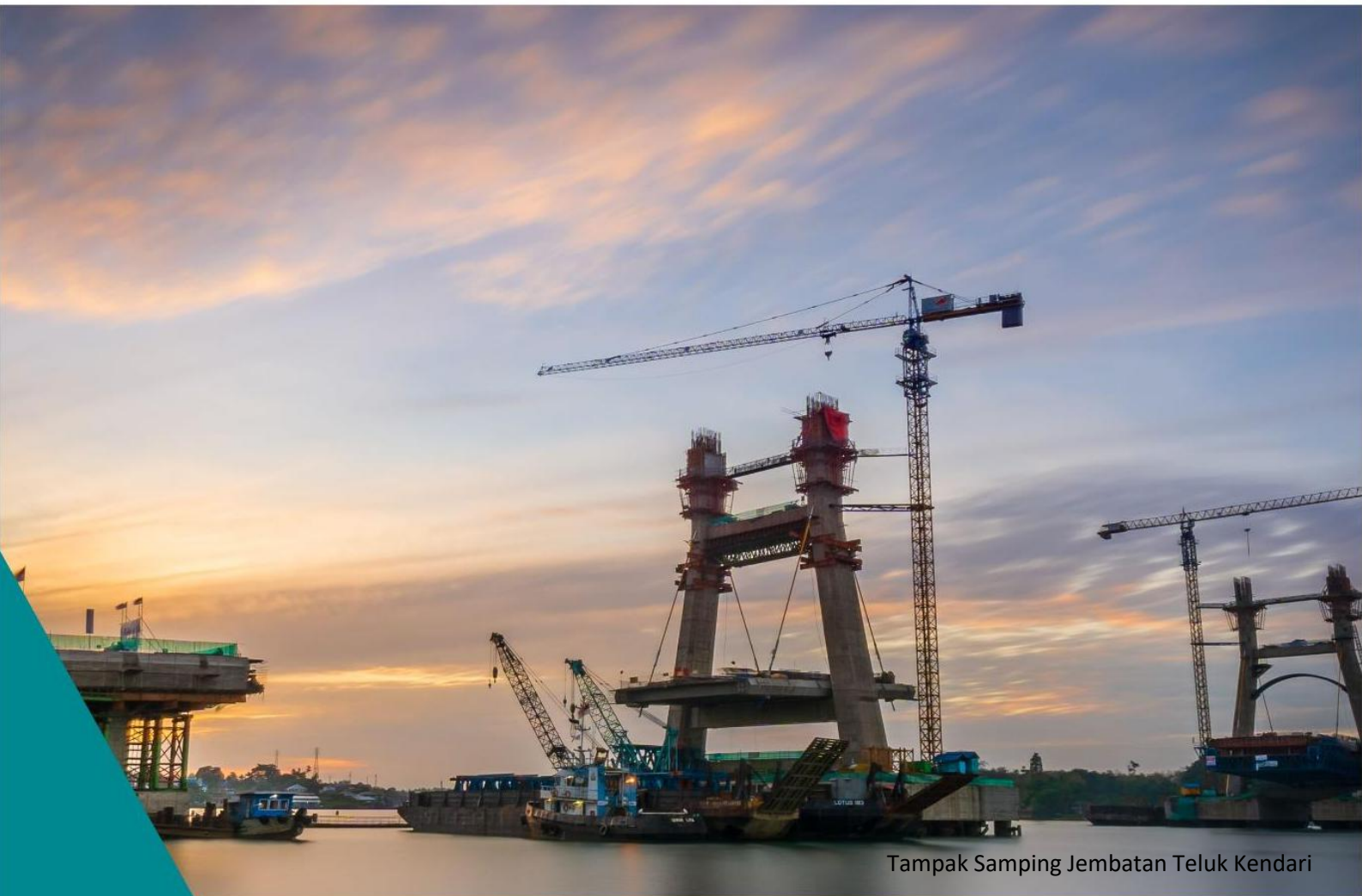
Bidang kesehatan juga merupakan bidang yang menjadi salah satu prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu poin penting dalam UU tersebut adalah penyediaan *earmarking* anggaran untuk kesehatan sebesar 10%, tidak termasuk belanja pegawai. Secara agregat, belanja urusan kesehatan telah memenuhi aturan yang ditetapkan antara lain pada tahun 2017 sebesar Rp2,05 triliun kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp2,34 triliun atau 12,11% dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi Rp2,77 triliun. Meningkatnya alokasi belanja urusan kesehatan menggambarkan komitmen Pemda untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Sultra. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Prov. Sultra, jumlah kematian bayi, dan ibu melahirkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Selain itu jumlah fasilitas kesehatan seperti Klinik Kesehatan, Puskesmas, Posyandu dan Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami peningkatan. Hal ini berarti belanja Pemda di Sultra pada urusan kesehatan dapat dikatakan efektif.

4.8.3 Belanja Infrastruktur Daerah

Pekerjaan umum menjadi hal yang penting, karena bidang ini terkait dengan penyediaan infrastruktur yang menjadi salah satu modal pembangunan. Secara agregat alokasi belanja dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, alokasi belanja pekerjaan umum mencapai Rp2,69 triliun dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp2,79 triliun selanjutnya menjadi Rp3,38 triliun pada tahun 2019. Salah satu tugas dari pekerjaan umum adalah pembangunan infrastruktur jalan. Periode 2018, total panjang jalan di Sultra adalah 11.243,08 kilometer yang terdiri dari jalan provinsi sepanjang 1.009,28 kilometer dan jalan kabupaten/kota sepanjang 10.233,80 kilometer. Pemerintah daerah sendiri memprioritaskan program pengadaan jalan untuk meningkatkan kinerja jaringan dan memantapkan kondisi jalan khususnya jalan provinsi sehingga bisa memperlancar transportasi antar daerah di Sultra.

Selain itu, belanja infrastruktur juga digunakan untuk pembangunan jembatan Bahteramas di Teluk Kendari yang merupakan jembatan terpanjang ketiga di Indonesia dengan panjang 1.380 kilometer. Pembangunan tersebut dibiayai oleh APBN, namun Pemerintah Daerah juga menyediakan dana pendukung yang berasal dari APBD. Pembangunan infrastruktur terbaru di Sultra adalah pembangunan jalan wisata Kendari-Toronipa sepanjang 14 kilometer, diharapkan dengan pembangunan jalan tersebut dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk berwisata di Pantai Toronipa. Selain untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan juga digunakan untuk infrastruktur pertanian, yaitu fokus pada pembangunan irigasi yang diperlukan untuk pengairan.

BAB V



Tampak Samping Jembatan Teluk Kendari

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

BAB V

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Untuk memberikan intervensi dalam perekonomian suatu negara/daerah, pemerintah menjalankan perannya melalui kebijakan fiskal. Pelaksanaan kebijakan fiskal tersebut berupa pelaksanaan belanja yang terencana dalam rangka pelaksanaan program-program prioritas nasional serta program-program penunjang lain, dengan ditunjang sumber daya penerimaan negara yang memadai, demi stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perekonomian dan pelaksanaan kebijakan fiskal di Sultra, komponen pendapatan dan belanja pemerintah terdiri dari komponen APBN dan APBD dalam sistematika keuangan konsolidasi.

Tabel 5. 1. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian lingkup Sultra (miliar Rp.)

Uraian	2019			(+ / -)	2018
	Pusat	Daerah	Konsolidasi		Konsolidasi
Pendapatan Negara	3.768,94	18.666,16	5.513,52	30,93%	4.211,10
Pendapatan Perpajakan	3.150,93	1.135,08	4.286,01	36,54%	3.138,96
Pendapatan Bukan Pajak	618,01	730,23	887,74	-0,04%	888,08
Hibah	-	339,77	339,77	84,61%	184,05
Lain-lain penerimaan daerah yang sah	-	174,83	0,00	0,00%	-
Transfer *)	-	16.286,25	0,00	0,00%	-
Belanja Negara	24.442,17	18.752,58	26.273,17	9,34%	24.029,42
Belanja Pemerintah	7.253,21	16.461,00	23.714,21	3,17%	22.986,12
Transfer *)	17.188,96	2.291,58	2.558,96	145,28%	1.043,30
Surplus/(Defisit)	(20.673,23)	(86,42)	(20.759,66)	4,75%	(19.818,32)
Pembiayaan	-	687,07	687,07	43,97%	477,24
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	1.059,57	1.059,57	48,37%	714,15
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	372,50	372,50	57,23%	236,91
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(20.673,23)	600,65	(20.072,59)	3,78%	(19.341,08)

*) Seluruh Pengeluaran Transfer Pemerintah Pusat dieliminasi oleh Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah

Sumber: LKPK Tk. Wilayah Sultra 2019 Preliminary, dan MEBE-DJPb

*) Realisasi APBN 2019 data MEBE per tanggal 8 Februari 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasi (LKPK) disusun dengan melakukan konsolidasi data/informasi keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan data/informasi keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu. Pendapatan konsolidasian tahun 2019 lingkup Sultra sebesar Rp5,51 triliun meningkat 0,31% dibandingkan dengan tahun 2018. Adapun realisasi belanja konsolidasian sebesar Rp26,27 triliun meningkat 0,09% jika dibandingkan tahun 2018. Peningkatan pendapatan ternyata diikuti juga dengan ekspansi belanja yang cukup signifikan, sehingga menyebabkan defisit Konsolidasian melebar 3,78% dari tahun 2018 menjadi Rp20,07 triliun.

Dari sisi pendapatan, kenaikan realisasi pada tahun 2019 didominasi oleh realisasi Perpajakan baik perpajakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan Hibah sebagai konsekuensi pelaksanaan Pemilu serentak di seluruh Indonesia. Sedangkan dari sisi belanja, peningkatan realisasi berasal dari ekspansi Belanja Transfer yang meningkat rerata 15,21% dengan peningkatan tertinggi pada realisasi DAU sebagai konsekuensi dalam memenuhi kewajiban penganggaran kepada kelurahan dan DAU Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dan DBH akibat adanya Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2019.

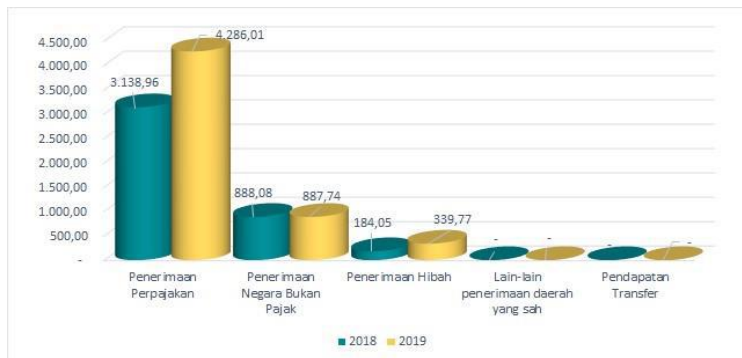
5.2. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Pemerintahan Umum (*General Government Revenue*) atau Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan dilakukan eliminasi atas akun-akun *resiprokal* (berelasi).

5.2.1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pendapatan pemerintah konsolidasian terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBPN, dan hibah. Total realisasi pendapatan konsolidasian pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp5,51 triliun. Dari jumlah tersebut pendapatan dan hibah Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah sebesar Rp3,77 triliun dan Pemerintah Daerah sebesar Rp18,67 triliun yang selanjutnya dilakukan eliminasi terhadap akun *resiprokal* sebesar Rp16,92 triliun. Pendapatan pemerintah pusat selanjutnya akan didistribusikan kepada pemerintah daerah berupa dana transfer maupun belanja pemerintah pusat di

Grafik 5. 1 Perbandingan Pendapatan Konsolidasian lingkup Sultra (miliar Rp.)



Sumber: LKPK Tk. Wilayah Sultra 2019 Preliminary, dan MEBE-DJPb (diolah)

daerah berupa belanja dekon/TP/UB. Pendapatan konsolidasian lingkup Sultra berasal dari pendapatan perpajakan sebesar Rp4,29 triliun, PNBPN sebesar Rp887,74 miliar, dan hibah sebesar Rp339,77 miliar.

Sementara itu, dilihat dari komposisi komponen pendapatan, maka

Pendapatan Perpajakan menjadi kontributor utama dengan menyumbang 77,74% dari total pendapatan konsolidasian Sultra. Sejalan dengan peningkatan realisasi penerimaan

Perpajakan pemerintah pusat, kinerja penerimaan Pajak Daerah turut meningkat senilai Rp269,81 miliar atau mencapai 31,18% dari tahun sebelumnya. Peningkatan pajak daerah merupakan dampak penerapan perekam pajak atau *Tapping Box* di wilayah Sultra yang diinisiasi

Grafik 5. 2 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian lingkup Sultra (miliar Rp.)



Sumber: LKPK Tk. Wilayah Sultra 2019 Preliminary, dan MEBE-DJPb (diolah)

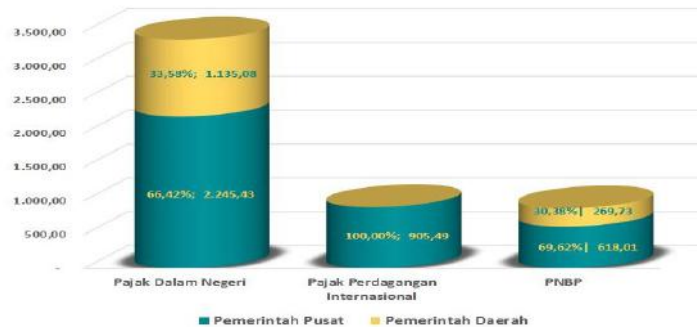
oleh Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan pemerintah daerah. Namun demikian, peningkatan yang terjadi pada kinerja sektor perpajakan tidak diikuti oleh kondisi yang sama pada sektor PNBPN. Pada tahun ini realisasi PNBPN konsolidasian justru sedikit menurun sebesar 0,04% dari Rp888,08 miliar menjadi Rp887,74 miliar.

5.2.2. Analisis Perubahan

Terjadi peningkatan realisasi pendapatan perpajakan konsolidasian Sultra tahun 2019 sebesar 0,37% dibandingkan tahun 2018 dari Rp3,14 triliun menjadi Rp4,29 triliun. Dari komposisi tersebut sebesar Rp2,25 triliun atau 67,71% dari Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri berasal dari penerimaan Pemerintah Pusat, dan 32,29% lainnya dari penerimaan Pemerintah Daerah. Adapun Penerimaan Perpajakan Internasional sebesar Rp905,49 miliar merupakan penerimaan Pemerintah Pusat.

Adapun realisasi PNBPN konsolidasian tahun 2019 menurun tipis 0,04% jika dibandingkan tahun 2018 dari Rp888,08 miliar menjadi Rp887,74 miliar. Penurunan PNBPN ini disebabkan oleh menurunnya PNBPN daerah di wilayah Sultra.

Grafik 5. 3 Perbandingan Komposisi Pendapatan Pusat dan Daerah Konsolidasian lingkup Sultra (miliar Rp.)



Sumber: LKPK Tk. Wilayah Sultra 2019 Preliminary, dan MEBE-DJPb (diolah)

5.2.3. Rasio Pajak (Tax Ratio)

Rasio pajak merupakan perbandingan antara penerimaan pajak suatu daerah terhadap pendapatan suatu output perekonomian atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terkait dengan rasio pajak, PDRB memberi gambaran jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenakan pajak. Selain itu, PDRB juga menjadi suatu tendensi jika kegiatan ekonomi masyarakat berkembang dengan baik, maka akan meningkatkan potensi perpajakan suatu daerah.

5.2.3.1. Tax Ratio Konsolidasian Sultra

Tabel 5. 2 Tax Ratio dan Tax per Kapita Konsolidasian lingkup Sultra

URAIAN	2017	2018	2019 *)
1. Penerimaan Perpajakan Konsolidasian (miliar Rp.)	2.394,20	3.138,96	4.286,01
2. PDRB-ADHB (miliar Rp.)	107.423,45	118.090,93	129.260,13
Tax Ratio (1 : 2)	2,23%	2,66%	3,32%
3. Jumlah Penduduk	2.602.389	2.653.654	2.704.737
Tax per Kapita (1 : 3)	920.000	1.182.882	1.584.631

Sumber: LKPK Tk. Wilayah Sultra 2019 Preliminary, dan BPS Sultra (diolah)

*) Jumlah Penduduk Tahun 2019 diproyeksikan dari laju pertumbuhan penduduk 2010-2018

Kinerja perpajakan suatu negara dapat diukur melalui analisis *tax ratio* yang merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan PDB suatu negara. Adapun untuk mengukur kinerja perpajakan di daerah maka jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan PDRB-ADHB. Pada tahun 2019, target *tax ratio* nasional ditetapkan sebesar 11,1%. Perkembangan *Tax Ratio* Konsolidasian Sultra pada tahun 2019 mencapai 3,32% meningkat 0,66%. Meskipun *tax ratio* Konsolidasian Sultra menguat, akan tetapi capaian tersebut masih jauh di bawah realisasi *tax ratio* nasional

yang mencapai 10,7% (rasio pajak nasional hanya memperhitungkan penerimaan pajak pemerintah pusat). Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja penerimaan perpajakan wilayah Sultra masih mampu tumbuh, seiring dengan pertumbuhan PDRB Sultra di tengah gejolak ekonomi dunia yang membuat kondisi ekonomi sangat tertekan.

Peningkatan rasio pajak ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk optimalisasi penerimaan menunjukkan hasil yang diharapkan. Kegiatan ekonomi Sulawesi Tenggara kembali bergairah khususnya di bidang pertambangan dan penggalian dengan adanya pembangunan smelter. Meski demikian, kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan pajak dari berbagai sektor ekonomi juga perlu lebih optimal. Selain itu, diperlukan upaya ekstra untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak, sebab saat ini faktanya tidak semua wajib pajak betul-betul membayar kewajiban perpajakannya kepada negara.

5.2.3.2. Rasio Pajak per Kapita Konsolidasian Sultra

Pajak perkapita merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan suatu daerah dengan jumlah penduduknya. Pajak perkapita menunjukkan kontribusi setiap penduduk pada pendapatan perpajakan suatu daerah. Pajak per kapita Konsolidasian Sultra tahun 2019 sebesar Rp1.584.631,-. Angka ini meningkat 33,96% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang hanya sebesar Rp1.182.882,-. Angka tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2019 setiap penduduk Sultra memberikan kontribusi sebesar Rp1.182.882,- terhadap penerimaan perpajakan konsolidasian.

5.2.4. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan di suatu daerah dapat diperluas, tidak hanya pada PAD yang diterima pemerintah daerah namun mencakup seluruh penerimaan pemerintah pusat dan daerah di wilayah tersebut. Penerimaan Pusat dan Daerah terdiri: 1) Pendapatan pajak daerah; 2) Retribusi daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) Lain-lain PAD yang sah; dan 5) Penerimaan Perpajakan, PNBPN dan Pendapatan BLU.

PDRB Sultra pada tahun 2019 adalah sebesar Rp129,26 triliun, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Sultra mencapai 6,51%. Pada periode yang sama, realisasi pendapatan pemerintah

Tabel 5. 3 Tax Ratio dan Tax per Kapita Konsolidasian lingkup Sultra

Uraian	2017	2018	2019	
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	2.394,20	3.138,96	4.286,01	36,54%
PNBP	1.198,78	888,08	887,74	-0,04%
Total	3.592,98	4.027,05	5.173,75	28,48%
PDRB/Pert. Ekonomi	107.423,45	118.090,93	129.260,13	9,46%

Sumber: LKPK Tk. Wilayah Sultra 2019 Preliminary, dan BPS Sultra (diolah)

pusat dan pemerintah daerah konsolidasian lingkup Sultra sebesar Rp5,17 triliun atau

naik 28,48%. Hal ini menunjukkan upaya penggalian potensi penerimaan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi telah dilakukan dengan optimal oleh pemerintah. Pertumbuhan yang selaras antara kenaikan PDRB dan penerimaan perpajakan Sultra mengindikasikan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Sultra berkorelasi positif terhadap penerimaan perpajakan konsolidasian

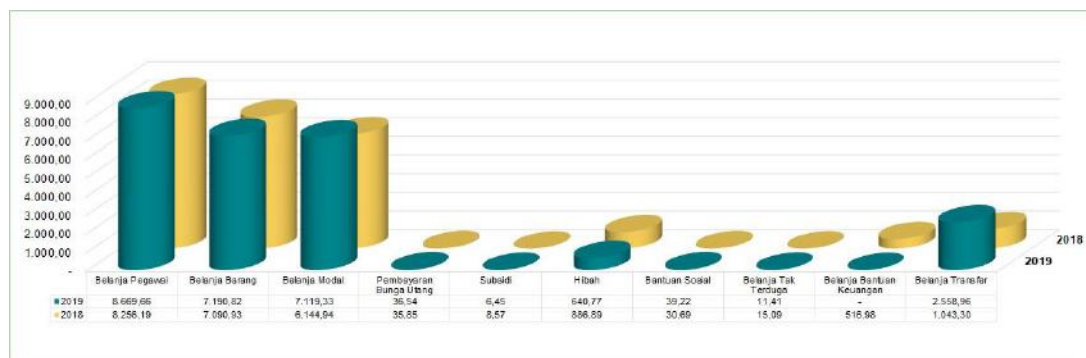
5.3. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun *resiprokal* (berelasi).

5.3.1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Realisasi belanja Konsolidasian lingkup Sultra tahun 2019 mencapai Rp26,27 triliun, yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp8,67 triliun, Belanja Barang Rp7,19 triliun, Belanja Modal sebesar Rp7,11 triliun, Pembayaran Bunga Utang Rp36,54 miliar, Belanja Subsidi Rp6,45 miliar, Belanja Hibah sebesar Rp640,77 miliar, Bantuan Sosial Rp39,22 miliar, Belanja Tak Terduga sebesar Rp11,41 miliar, dan Belanja transfer sebesar Rp2,56 triliun setelah dilakukan eliminasi terhadap akun *resiprokal* sebesar Rp16,92 triliun.

Grafik 5. 4 Belanja Pemerintah Konsolidasian lingkup Sultra (miliar Rp.)

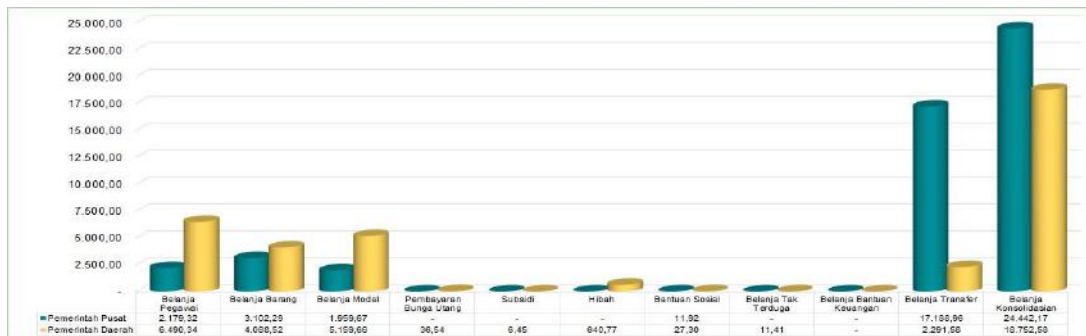


Sumber: LKPK Tk. Wilayah Sultra 2019 Preliminary, dan MEBE-DJPb (diolah)

Grafik 5.5 menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat di Sultra dalam belanja konsolidasian tahun 2019 lebih besar dari realisasi belanja pemerintah daerah. Realisasi belanja konsolidasian sebesar 56,59% atau Rp24,44 triliun bersumber dari belanja pemerintah pusat dan sebesar 43,41% sisanya merupakan belanja pemerintah daerah. Realisasi Belanja Pegawai konsolidasian pemerintah pusat sebesar Rp2,18 triliun (25,14%) dan dominasi belanja pegawai pemerintah daerah sebesar Rp6,49 triliun atau mencapai 74,86%, Belanja Barang konsolidasian dengan komposisi 43,14% dari pemerintah pusat dan 56,86% dari pemerintah daerah, Belanja Modal konsolidasian

pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing 27,53% dan 72,47%, komposisi Belanja Bantuan Sosial 30,39% belanja pemerintah pusat dan 69,61% dari pemerintah daerah, serta Belanja Transfer konsolidasian dengan komposisi 88,24% belanja pemerintah pusat dan 11,76% belanja pemerintah daerah. Sementara Belanja Bunga Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, serta Belanja Tak Terduga dengan komposisi 100 % dari pemerintah daerah. Komposisi belanja konsolidasian menunjukkan kontribusi pemerintah pusat terhadap pertumbuhan ekonomi Sultra dari sisi pengeluaran pemerintah lebih besar daripada kontribusi pemerintah daerah.

Grafik 5. 5 Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Belanja Konsolidasian lingkup Sultra (miliar Rp.)



Sumber: LKPK Tk. Wilayah Sultra 2019 Preliminary, dan MEBE-DJPb (diolah)

5.3.2. Analisis Perubahan

Grafik 5. 6 Perubahan Belanja Konsolidasian lingkup Sultra (miliar Rp.)



Sumber: LKPK Tk. Wilayah Sultra 2019 Preliminary, dan MEBE-DJPb (diolah)

Grafik 5.6 menunjukkan bahwa nilai realisasi belanja konsolidasian tahun 2019 secara mengalami kenaikan 9,34% jika dibandingkan tahun 2018. Kontribusi kenaikan tertinggi adalah realisasi belanja modal konsolidasian yang mencapai 15,86%, dan belanja transfer konsolidasian sebesar 145,28%. Sementara jika dilihat dari komposisi belanja, maka porsi realisasi belanja modal konsolidasian terhadap total belanja konsolidasian meningkat dari 25,57% di tahun 2018 menjadi 27,10% pada tahun 2019. Pun demikian dengan porsi belanja transfer konsolidasian juga mengalami peningkatan dari 4,34% pada tahun 2018 menjadi 9,74% tahun 2019. Sedangkan porsi belanja

pegawai konsolidasian dan belanja barang konsolidasian pada tahun 2019 menurun masing-masing menjadi 33,00% dan 27,37%. Kondisi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, yang antara lain dengan peningkatan porsi anggaran belanja modal terhadap total belanja pemerintah.

5.3.3. Analisis Rasio Belanja Konsolidasian

Penyusunan anggaran Belanja Daerah dapat menunjukkan apakah suatu daerah *pro poor, growth, and jobs*. Pada komponen Belanja Daerah juga nampak seberapa besar porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

5.3.3.1. Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal

Rasio Belanja Operasi Konsolidasian Sultra tahun 2019 mengalami penurunan 3,50% jika dibandingkan dengan tahun 2018 menjadi 60,37%. Penurunan rasio tersebut diharapkan dapat meningkatkan *multiplier effect* belanja pemerintah, karena kondisi ini menggambarkan adanya penambahan porsi belanja produktif. Hal ini terlihat dari porsi realisasi belanja modal konsolidasian terhadap total belanja konsolidasian yang meningkat dari 25,57% di tahun 2018 menjadi 27,10% pada tahun 2019 atau sebesar Rp7,12 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi belanja pemerintah menjadi contributor utama belanja modal konsolidasian yang mencapai 72,47%. Kondisi ini menggambarkan bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi motor utama pelaksanaan pembangunan khususnya program peningkatan infrastruktur di Sultra.

Tabel 5. 4 Rasio Belanja Operasi Konsolidasian lingkup Sultra (miliar Rp.)

Uraian	2018		2019	
	Konsolidasian	Rasio	Konsolidasian	Rasio
Belanja Operasi	15.347,11	63,87%	15.860,48	60,37%
Total Belanja dan Transfer	24.029,42		26.273,17	

Sumber: LKPK Tk. Wilayah Sultra 2019 Preliminary (diolah)

5.3.3.2. Rasio Belanja Konsolidasian per Kapita

Rasio belanja konsolidasian terhadap jumlah penduduk (belanja konsolidasian per kapita) menunjukkan seberapa besar belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Tabel 5.5 Rasio Belanja Operasi Konsolidasian lingkup Sultra (miliar Rp.)

URAIAN	2018	2019 *)
1. Belanja Pemerintah Konsolidasian (miliar Rp.)	24.029,42	26.273,17
2. PDRB-ADHB (miliar Rp.)	118.090,93	129.260,13
Rasio Belanja - PDRB (1 : 2)	20,35%	20,33%
3. Jumlah Penduduk	2.653.654	2.704.737
Rasio Belanja - Populasi (1 : 3)	9.055.220	9.713.761

Sumber: LKPK Tk. Wilayah Sultra 2019 Preliminary, dan BPS Prov. Sultra (diolah)
*) Σ Penduduk Tahun 2019 diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia 2010-2035

yang digunakan untuk mensejahterakan per penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilainya, semakin besar belanja yang dikeluarkan untuk

mensejahterakan 1 (satu) orang penduduk wilayah tersebut, sehingga semakin besar kemungkinan tercapainya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil angka rasionya semakin kecil dana yang disediakan pemda untuk mensejahterakan penduduknya.

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Sultra, rasio belanja konsolidasian Sultra tahun 2019 sebesar Rp9,71 juta per kapita, meningkat sebesar 7,27% atau mencapai Rp658,54 miliar. Hal ini berarti bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Sultra, selama tahun 2019 pemerintah telah membelanjakan sebesar Rp9,71 juta untuk setiap jiwa penduduknya.

5.3.3.3. Rasio Belanja Pemerintah Konsolidasian

Rasio belanja pemerintah konsolidasian terhadap PDRB menunjukkan seberapa besar pengaruh belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan angka PDRB di suatu daerah. Semakin besar nilainya, maka semakin besar peran pemerintah dalam meningkatkan PDRB daerah tersebut. Apabila dibandingkan dengan PDRB Sultra, rasio belanja pemerintah konsolidasian Sultra tahun 2019 mengalami penurunan 0,11% dibandingkan tahun 2018 menjadi sebesar 20,33%.

5.3.3.4. Analisis Belanja APBN – APBD

a. Rasio Dana Kelolaan Non Belanja Pegawai

Untuk mengetahui proporsi sumber dana (non belanja pegawai) yang dikelola oleh pemerintah daerah, maka dapat diperbandingkan dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan belanja non pegawai pada APBD.

Tabel 5.6 Rasio Dana Kelolaan Non Belanja Pegawai (miliar Rp.)

Uraian	Realisasi
Belanja APBN	24.442,17
Belanja APBD (Non Belanja Pegawai)	12.805,25
Rasio Dana Kelolaan Non Belanja Pegawai	190,88%

Sumber : LKPD 2019 . dan Monev PA (data per 15 Februari 2020)

Tabel 5.6 memperlihatkan

bahwa rasio dana kelolaan belanja non pegawai di Sultra tahun 2019 sebesar 200,04%.

b. Rasio Kelolaan Belanja Modal

Untuk mengetahui rasio kelolaan belanja modal maka dibandingkan belanja modal yang bersumber dari APBN dan APBD sebagai motor pertumbuhan regional. Dari tabel di samping terlihat bahwa rasio dana kelolaan belanja modal di Sultra tahun 2019 sebesar 37,69%.

Tabel 5.7 Rasio Kelolaan Belanja Modal (miliar Rp.)

Uraian	Realisasi
Belanja Modal APBN	1.959,67
Belanja Modal APBD	5.199,97
Rasio Dana Kelolaan Belanja Modal APBN-APBD	37,69%

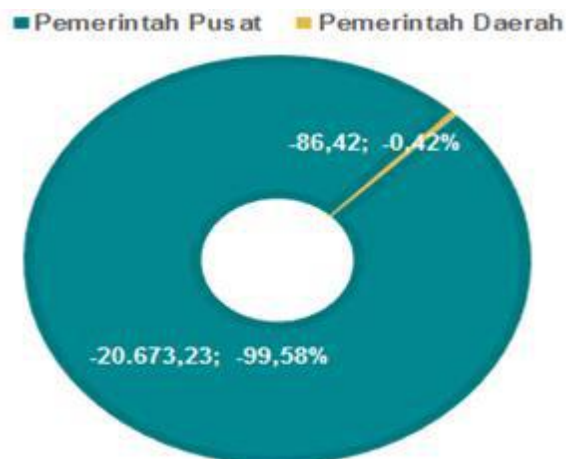
Sumber : LKPD 2019, dan Monev PA (data per 15 Februari 2020)

5.4. SURPLUS/DEFISIT KONSOLIDASIAN

Keseimbangan umum atau Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama. Surplus/defisit dalam LKPK-TW merupakan gabungan surplus defisit APBD ditambah dengan surplus/defisit LKPP Tingkat Wilayah.

Defisit Pemerintah Konsolidasian Sultra tahun 2019 mencapai Rp20,76 triliun, defisit tersebut berasal dari Pemerintah Pusat di wilayah Sultra sebesar Rp20,67 triliun dan defisit Pemerintah Daerah Sultra sebesar Rp84,42miliar. Besarnya defisit pemerintah pusat tersebut karena APBN berperan sebagai fungsi distribusi. Penerimaan perpajakan bagian pemerintah pusat dicatat secara dalam APBN tidak dirinci per daerah. Selanjutnya seluruh penerimaan tersebut didistribusi ke seluruh Pemerintah Daerah dalam bentuk belanja tranfer ke daerah.

Grafik 5.7 Surplus/Defisit Konsolidasian (miliar Rp.)



Sumber : LKPD 2019 , dan Monev PA (data per 15 Februari 2020)

5.5. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGREGAT

Salah satu analisis data GFS adalah analisis kontribusi pemerintah pada PDRB. Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dimaksud berasal dari belanja Pemerintah dan investasi. Nilai belanja pemerintah adalah total nilai dari kompensasi pegawai,

penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap dan manfaat sosial yang dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa. Sedangkan nilai Investasi Pemerintah (dalam Laporan Operasional sama dengan nilai Aset tetap pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto).

Berdasarkan LO pada tabel 5.8 di bawah, nilai belanja Pemerintah tahun 2019 sebesar Rp15,20 triliun dan nilai Investasi Pemerintah sebesar Rp6,99 triliun. Sehingga kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB Sultra pada tahun 2019 sebesar 11,76%, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 9,39%. Sedangkan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Investasi sebesar 5,41%, meningkat jika dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 3,71%.

Tabel 5.8 Laporan Operasional Konsolidasian (miliar Rp.)

AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM	JUMLAH
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH	
1 Pendapatan	32.815,57
11 Pajak	4.285,95
12 Kontribusi Sosial	0
13 Hibah	2.594,40
14 Pendapatan Lainnya	25.935,22
2 Beban	22.013,85
21 Kompensasi Pegawai	8.748,67
22 Penggunaan Barang dan Jasa	6.415,69
23 Konsumsi Aset Tetap	0
24 Bunga	36,54
25 Subsidi	6,45
26 Hibah	6.059,68
27 Manfaat Sosial	39,22
28 Beban Lainnya	707,60
GOB Keseimbangan Operasi Bruto (1-2+23)	10.801,72
NOB Keseimbangan Operasi Netto (1-2)	10.801,72
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN NETTO	
31 Akuisisi Aset Non Keuangan Netto	7.119,21
311 Aset Tetap	6.993,73
312 Perubahan Persediaan	0
313 Barang Berharga	0
314 Aset Non Produksi	125,48
NLB Saldo Peminjaman/Pinjaman (1-2-31)	3.682,51
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN)	
32 Akuisisi Neto Aset Keuangan	3.516,98
321 Dalam Negeri	3.516,98
322 Luar Negeri	0
33 Keterjadian Kewajiban Neto	(27,31)
331 Dalam Negeri	(165,54)
332 Luar Negeri	0

Sumber: LKPD 2019

investasi agar target investasi tercapai sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam struktur pembentuk PDRB Sultra Menurut Pengeluaran tahun 2019, kontribusi PMTB mencapai 39,40%. Dengan demikian kontribusi pemerintah terhadap PDRB dari Investasi yang sebesar 5,41% jika dibanding total kontribusi PMTB hanya sebesar 13,73 %. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di Sultra sebagian besar ditopang oleh sektor swasta. Namun demikian, kontribusi pemerintah dalam investasi ini meningkat jika dibanding tahun lalu yang hanya 11,16%. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk terus memperbaiki, dan menciptakan iklim investasi domestik yang kondusif semaksimal mungkin, dengan tujuan dapat menarik

Sementara itu, jika kita melihat dampak belanja konsolidasian terhadap capaian indikator fiskal di Sultra, **tabel 5.9** menunjukkan bahwa realisasi belanja konsolidasian

Tabel 5.9 Belanja Konsolidasian dan Indikator Makroekonomi

URAIAN	2018	2019
1. Belanja Pemerintah Konsolidasian (miliar Rp.)	24.029,42	26.273,17
1. Pertumbuhan Ekonomi	6,42	6,51
2. PDRB-ADHB (miliar Rp.)	118.090,93	129.260,13
3. Tingkat Pengangguran	3,26	3,59
4. Tingkat Kemiskinan	11,32	11,04
5. Gini Ratio	0,399	0,393
6. IPM	70,61	71,20

Sumber: LKPD 2019, BPS (diolah)

lingkup Sultra dari tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan, dan berpengaruh positif terhadap beberapa capaian Indikator makroekonomi. Indikator yang berhubungan positif dengan meningkatnya realisasi belanja konsolidasian adalah PDRB,

Tingkat Kemiskinan, gini ratio dan IPM. Sejak tahun 2018, PDRB Sultra meningkat dan angka PDRB-ADHB mencapai Rp129,26 triliun pada tahun 2019. Sementara itu, Tingkat Kemiskinan selalu mengalami menurun dan pada tahun 2019 Tingkat Kemiskinan Sultra sebesar 11,04% serta gini ratio yang juga mengalami perbaikan. Demikian pula IPM Sultra terus meningkat dan mencapai indeks 71,20 pada tahun 2019. Beberapa indikator lainnya mengalami pengaruh yang fluktuatif atas realisasi TKDD. Pertumbuhan Ekonomi Sultra sempat melemah 0,34 poin di tahun 2018, lalu meningkat lagi seiring dengan meningkatnya realisasi TKDD pada tahun 2019 menjadi 6,51. Sementara itu, Gini Ratio sempat melebar 0,007 poin pada tahun 2018, lalu membaik kembali menjadi 0,393 seiring meningkatnya realisasi TKDD di tahun 2019. Sedangkan Tingkat Pengangguran sempat membaik seiring dengan meningkatnya realisasi TKDD pada tahun 2018, akan tetapi kembali bertambah menjadi 3,59% meski realisasi TKDD tetap meningkat pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya realisasi TKDD pada tahun 2019 menjadi salah satu komponen membaiknya indikator-indikator fiskal Sultra, kecuali Tingkat Pengangguran yang tidak terkena dampak positif peningkatan realisasi TKDD. Perlu upaya pemerintah agar mengalokasikan TKDD untuk penyediaan lapangan kerja melalui proyek padat karya dan pengembangan kompetensi penduduk usia kerja. Meningkatnya Tingkat Pengangguran salah satunya disebabkan kesenjangan kemampuan yang dimiliki pencari kerja dengan kriteria lowongan kerja yang ada. Selain kemampuan dasar, kemampuan bahasa asing, dan komputer menjadi kompetensi yang perlu ditingkatkan oleh pencari kerja.

BAB VI



Suasana Tempat Pelelangan Ikan Kota Kendari

KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL

BAB VI

KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL

6.1 SEKTOR UNGGULAN DAERAH

Pembangunan daerah merupakan bentuk integrasi dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terpadu, selaras, dan sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Strategi pembangunan daerah melalui pendekatan sektoral lebih menekankan pada pemilihan sektor-sektor ekonomi di tiap-tiap wilayahnya dapat berperan sebagai penggerak ekonomi wilayah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rustiadi *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa kemampuan memacu pertumbuhan suatu wilayah atau daerah sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. Strategi pemilihan sektor-sektor ekonomi/sektor unggulan di Sultra dapat dianalisis dengan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

6.1.1 Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk membentuk model ekonomi basis (sektor basis) sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi sektor unggulan kegiatan ekonomi wilayah yang mendorong pertumbuhan pembangunan daerah. Persamaan LQ (Sjafrizal, 2012) adalah:

$$LQ = \frac{X_{ij}/X_i}{X_j/X_{..}}$$

Keterangan dari hasil analisis LQ sebagai berikut:

LQ	= indeks <i>Location Quotient</i>	X_j	= PDB sektor ke-j di tingkat Nasional
X_{ij}	= PDRB sektor ke-j di Sultra	X_i	= Total PDRB di Sultra
$X_{..}$	= Total PDB di tingkat Nasional		

- a. Jika nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor basis / sektor unggulan, mempunyai pangsa relatif yang lebih besar dibanding sektor lainnya sehingga sektor tersebut mampu memenuhi konsumsi baik di dalam maupun di luar Sultra.
- b. Jika nilai $LQ = 1$, maka sektor tersebut setara dengan sektor daerah atau mempunyai pangsa aktifitas setara dengan pangsa total sehingga sektor tersebut hanya mampu memenuhi konsumsi lokal.
- c. Jika nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor non basis / bukan sektor unggulan, mempunyai pangsa relatif yang lebih kecil sehingga belum mampu memenuhi konsumsi di Sultra.

Dari hasil perhitungan menggunakan analisis LQ diperoleh hasil sebagaimana berikut.

Tabel 6. 1 Keunggulan Komparatif Wilayah Sultra per Sektor

Sektor	LQ Tahun 2019	Rata-rata LQ Tahun 2015-2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,78	1,76
Pertambangan dan Penggalian	2,77	2,55
Industri Pengolahan	0,29	0,28
Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,11	2,25
Konstruksi	1,22	1,25
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,93	0,91
Transportasi dan Pergudangan	1,06	1,09
Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	0,18	0,19
Informasi dan Komunikasi	0,44	0,46
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,52	0,54
Real Estate	0,49	0,51
Jasa Perusahaan	0,11	0,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,40	1,49
Jasa Pendidikan	1,46	1,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,84
Jasa lainnya	0,72	0,81

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan (Tabel 6.1), sektor keunggulan komparatif (*comparative advantage*) wilayah di Sultra pada Tahun 2019 dan secara rata-rata tahun 2015-2019 antara lain: 1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, 2) pertambangan dan penggalian, 3) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, 4) konstruksi, 5) transportasi dan pergudangan, 6) administrasi pemerintahan,

pertahanan, dan jaminan sosial wajib, dan 7) jasa pendidikan. Sektor ini merupakan sektor yang telah terjadi perkembangan di atas rata-rata dengan demikian wilayah Sultra mampu memenuhi konsumsinya dari sektor tersebut dan potensial untuk mengeksport / memenuhi kebutuhan di daerah lain.

6.1.2 Analisis Shift-Share

Analisis Shift Share (*Shift Share Analysis*) bertujuan untuk menganalisa pergeseran kinerja suatu sektor di suatu wilayah untuk dikategorikan berdasarkan sumber-sumber penyebab pergeseran dan mengetahui sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan wilayahnya (Rustiadi *et al.*, 2011). Dari hasil analisis Shift Share diperoleh tiga komponen penyebab pergeseran pertumbuhan antara lain:

1. Komponen *regional share* (RS) yaitu pertumbuhan total wilayah pada dua titik tahun yang menunjukkan dinamika total wilayah.
2. Komponen *proportional shift* (PS) yaitu pertumbuhan total aktivitas/sektor tertentu secara relatif dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam wilayah yang menunjukkan dinamika aktivitas/sektor total dalam wilayah.
3. Komponen *differential shift* (DS) yaitu menjelaskan tingkat kompetitif (*competitiveness*) aktivitas/sektor tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total aktivitas/sektor tersebut dalam wilayah. Komponen ini juga menggambarkan dinamika (keunggulan/ketidakeunggulan) suatu sektor tertentu di sub wilayah tertentu terhadap sektor di sub wilayah lain.

Persamaan umum analisis Shift Share (Rustiadi *et al.*, 2011):

$$SSA = \underbrace{\left(\frac{X_{..}(t_1)}{X_{..}(t_0)} - 1\right)}_{(a)} + \underbrace{\left(\frac{X_{i.}(t_1)}{X_{i.}(t_0)} - \frac{X_{..}(t_1)}{X_{..}(t_0)}\right)}_{(b)} + \underbrace{\left(\frac{X_{ij}(t_1)}{X_{ij}(t_0)} - \frac{X_{i.}(t_1)}{X_{i.}(t_0)}\right)}_{(c)}$$

SSA = *Shift Share Analysis*

a = komponen *Regional Share* (RS)

b = komponen *Proportional Shift* (PS)

c = komponen *Differential Shift* (DS)

$X_{..}$ = nilai total aktivitas/sektor di tingkat Nasional

$X_{i.}$ = nilai aktivitas/sektor ke-i di tingkat Nasional

X_{ij} = nilai aktivitas/sektor ke-i di Sultra

t_1 = titik tahun akhir

t_0 = titik tahun awal

Interpretasi hasil perhitungan komponen *Differential Shift* (DS) sebagai berikut:

- Jika nilai DS < 0, maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat Nasional.
- Jika nilai DS > 0, maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat Nasional.

Berdasarkan hasil analisis SSA pada komponen nilai *differential shift* (DS) positif terdapat 11 sektor yang memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah antara lain: 1) pertanian, kehutanan, dan perikanan, 2) pertambangan dan penggalian, 3) industri pengolahan, 4) pengadaan listrik dan gas, 5) konstruksi, 6) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, 7) transportasi dan pergudangan, 8) penyediaan akomodasi dan makan minum, 9) informasi dan komunikasi, 10) jasa keuangan dan asuransi, dan 11) jasa pendidikan. Disamping itu, analisis

Tabel 6. 2 Keunggulan Kompetitif Wilayah Sultra per Sektor

Sektor	Nilai DS
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,119
Pertambangan dan Penggalian	0,220
Industri Pengolahan	0,161
Pengadaan Listrik dan Gas	0,217
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,034
Konstruksi	0,020
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,179
Transportasi dan Pergudangan	0,056
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,036
Informasi dan Komunikasi	0,030
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,036
Real Estate	-0,068
Jasa Perusahaan	-0,105
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,039
Jasa Pendidikan	0,083
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,033
Jasa lainnya	-0,192

Sumber: BPS (diolah)

SSA dengan komponen nilai DS selain untuk mengidentifikasi potensi keunggulan kompetitif juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan pergeseran struktur ekonomi dan kontribusi dari masing-masing sektor. Sektor yang memiliki kontribusi besar menggambarkan tingginya potensi sektor tersebut dalam perekonomian dan sebaliknya, dengan demikian besaran kontribusi menggambarkan peran sektor dalam perekonomian yaitu semakin besar peran sektor maka dapat dikatakan sektor tersebut sebagai *engine growth* atau mesin pertumbuhan ekonomi daerah (Rustiadi *et al.*, 2011).

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan engine growth di Sultra berdasarkan nilai DS pada **Tabel 6.2**.

6.1.3 Analisis Tipologi Klassen

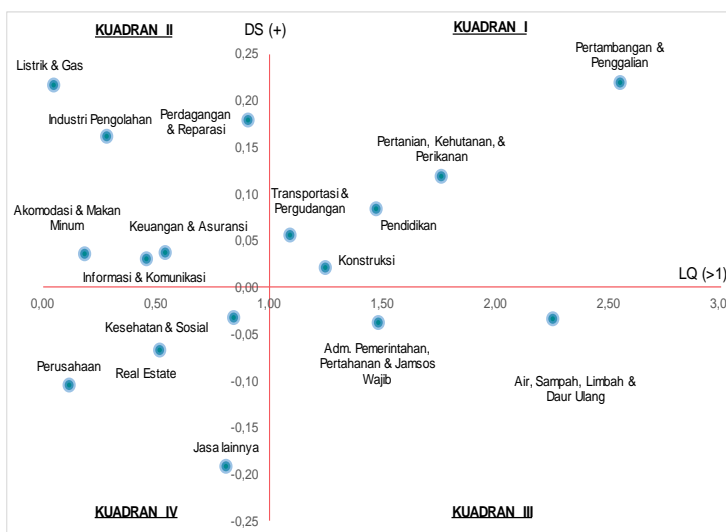
Tujuan analisis Tipologi Klassen menurut Rustiadi *et al.* (2011), untuk mengidentifikasi posisi sektor unggulan wilayah dengan memperhatikan sektor pertumbuhan sektoral (SSA pada nilai *differential shift*) dan pemusatan aktivitas ekonomi (*Location Quotient*) dengan menggunakan Klassen. Penggunaan nilai *Differential Shift* (DS) adalah untuk melihat kompetisi perubahan pertumbuhan dari suatu kegiatan ekonomi wilayah sedangkan penggunaan nilai *Location Quotient* (LQ) adalah untuk melihat pemusatan aktivitas ekonomi terhadap aktivitas ekonomi total wilayah atau sebagai sektor basis ekonomi/sektor komparatif wilayah. Pada bidang datar nilai DS sebagai sumbu vertikal (y) dan nilai LQ sebagai sumbu horizontal (x) diperoleh empat kuadran dengan keterangan kriteria seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 6.3**.

Tabel 6. 3 Kriteria Tipologi Wilayah

Location Quotient (LQ)	Differential Shift (DS)	
	Negatif (-)	Positif (+)
LQ > 1	Kuadran III sektor maju tetapi tertekan	Kuadran I sektor maju dan tumbuh sangat cepat.
LQ < 1	Kuadran IV sektor relatif tertinggal	Kuadran II sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan cepat.

Sumber: Hill dalam Kuncoro (2004)

Gambar 6. 1 Klasifikasi Tipologi Klassen Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Perspektif Nasional



Sumber: BPS (diolah)

Setelah dilakukan perhitungan nilai LQ dan DS maka dapat diperoleh klasifikasi tipologi Klassen sebagaimana berikut:

Pada **Gambar 6.1**, sektor yang berada pada kuadran I dengan nilai DS (+) dan LQ (>1) antara lain: 1) pertambangan dan penggalian, 2) pertanian, kehutanan, dan perikanan, 3) jasa pendidikan, 4) konstruksi, dan 5) transportasi dan

perdagangan. Sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki keunggulan ekonomi wilayah secara komparatif dan kompetitif, memiliki laju pertumbuhan ekonomi cepat dan

maju. Adapun sektor unggulan wilayah secara komparatif dan kompetitif per kabupaten/kota perspektif Sultra tercantum pada **Lampiran 8**. Dapat dilihat bahwa sebagian kabupaten/kota di Sultra memiliki sektor unggulan berupa pertanian, kehutanan, dan perikanan.

1) Pertambangan dan Penggalian

Salah satu sektor unggulan yang menjadi primadona Sultra adalah pertambangan dan penggalian. Jenis bahan tambang yang dihasilkan terdiri dari aspal, nikel, emas, kromit, tembaga, galena, mangan, pasir besi, dan biji besi yang diproduksi oleh 222 perusahaan dan lokasinya tersebar di 14 kabupaten. Jika dilihat dari segi ekspor yaitu sebanyak 3 dari 5 komoditas yang memberikan kontribusi sebesar 99,73% terhadap total ekspor berasal dari sektor

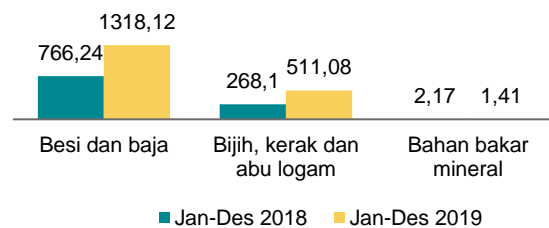
pertambangan dan penggalian yaitu komoditas 1) besi dan baja, 2) bijih, kerak, dan abu logam, dan 3) bahan bakar mineral. Kenaikan ekspor terbesar Sultra jika dilihat pada grafik 6.1 terjadi pada komoditas bijih, kerak, dan abu logam senilai US\$511,08 (90,63

persen). Kebijakan pemerintah terkait moratorium ekspor bijih nikel sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan nilai tambah bijih nikel nampaknya memberikan dampak positif bagi ekspor di Sultra. Pelarangan ekspor nikel ore pada Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara melahirkan pabrik-pabrik pengolahan logam dasar (smelter) dan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Sultra.

2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Secara geografis, Sultra memiliki kondisi wilayah lautan dan daratan yang luas dengan kekayaan alam yang berlimpah sehingga memberikan kontribusi terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selain itu sektor ini mampu menyerap 34,88% tenaga kerja Sultra, berbeda dengan pertambangan dan penggalian yang hanya menyerap 2,24% tenaga kerja Sultra pada bulan Agustus 2019. Komoditas pertanian unggulan Sultra antara lain kopra, kakao, beras, jambu mete, cengkeh, jagung, lada dan kemiri sedangkan komoditas perikanan unggulan Sultra antara lain udang, vaname, gurita, kerapu, dan kepiting. Layanan Klinik Ekspor bagi eksportir merupakan peran dari Bea Cukai Kendari bersama dengan Karantina Pertanian Kendari untuk meningkatkan ekspor dan mengembangkan kawasan produk pertanian berorientasi ekspor.

Grafik 6.1 Nilai Ekspor Komoditas Pertambangan dan Penggalian (dalam Juta US\$)

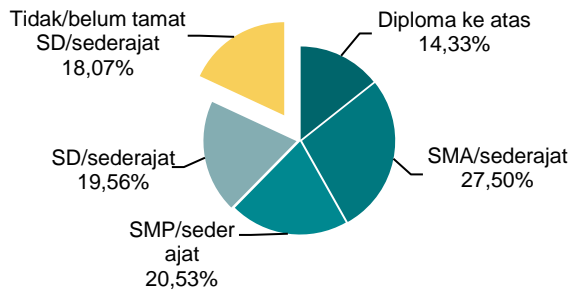


Sumber: BPS (diolah)

3) Jasa Pendidikan

Suatu wilayah yang memiliki tradisi yang kuat dan mementingkan proses pendidikan maka akan memiliki sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya sosial (SDS) yang lebih baik dan lebih maju (Rustiadi *et al.*, 2011). Pemerintah daerah

Grafik 6.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019



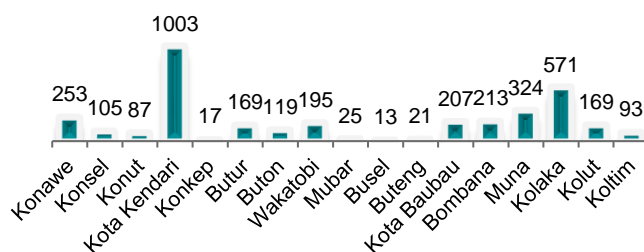
Sumber: BPS (diolah)

pendidikan yang ditamatkan di tahun 2019 (**Grafik 6.2**). Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui Guru Penggerak Sultra (GPS) menjadi fokus utama dengan didukung sarana dan prasarana penunjang pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan Sultra.

4) Konstruksi

Sektor konstruksi menjadi sektor ketiga terbesar yang menyumbang PDRB di tahun 2019 yaitu sebesar 13,69 persen. Sektor konstruksi memiliki peranan yang penting dalam mengakselerasi pembangunan yaitu melalui pembangunan sarana dan prasarana demi menunjang salah satunya perekonomian di Sultra untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini didukung dengan eksistensi

Grafik 6.3 Jumlah Perusahaan Konstruksi Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019



Sumber: BPS (diolah)

Kabupaten Kolaka yaitu sebanyak 571 perusahaan.

Sultra berupaya untuk meningkatkan pendidikan selaras dengan komitmen Presiden untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Sebab pendidikan di Sultra masih tergolong rendah yakni masih terdapat 18,07% penduduk berumur 15 tahun ke atas tidak atau belum tamat SD/ sederajat berdasarkan

perusahaan/usaha

konstruksi yang menyebar di seluruh wilayah Sultra dapat dilihat pada **Grafik 6.3**.

Berdasarkan **Grafik 6.3**, jumlah perusahaan konstruksi terbesar adalah Kota Kendari yaitu sebanyak 1003 perusahaan diikuti dengan

5) Transportasi dan Pergudangan

Topografi Sultra mencakup kepulauan dan daratan yang luas sehingga dibutuhkan penghubung antar wilayah regional, nasional, bahkan internasional melalui moda transportasi baik darat, laut, maupun udara. Konektivitas antar wilayah dapat menjadi pemicu pembangunan (*prime mover*) sektor perekonomian lainnya (*multiplier effect*).

a) Angkutan Laut

Pada tahun 2019, mobilitas penumpang angkutan laut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu secara kumulatif tercatat sebanyak 6.930.920 orang. Jumlah penumpang angkutan laut dapat dilihat pada **Grafik 6.4**.

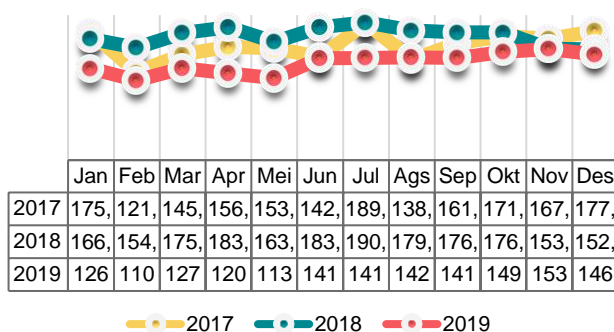
Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan

perkembangan lalu lintas barang yang diangkut dengan angkutan laut (barang/peti kemas) yaitu mengalami penurunan sebesar 41,71 persen pada tahun 2019 terhadap tahun 2018.

b) Angkutan Udara

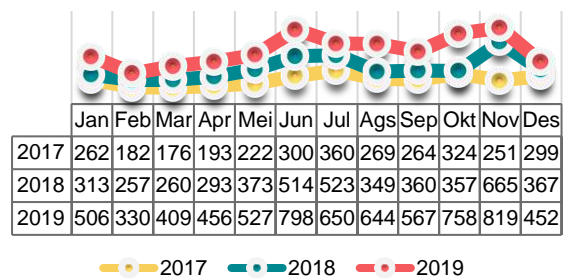
Berbeda dengan kondisi angkutan laut, angkutan udara justru mengalami penurunan baik jumlah penumpang maupun barang yang diangkut. Jumlah penumpang pada tahun 2019 sebanyak 1.608.895 orang turun sebesar 21,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018. Bersamaan dengan

Grafik 6.5 Perkembangan Lalu Lintas Penumpang Angkutan Udara Tahun 2017, 2018, dan 2019 (dalam Ribuan Orang)



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 6.4 Perkembangan Lalu Lintas Penumpang Angkutan Laut Tahun 2017, 2018, dan 2019 (dalam Ribuan Orang)



Sumber: BPS (diolah)

itu jumlah barang yang diangkut mengalami penurunan sebesar 29,03 persen. Kenaikan harga tiket pesawat diduga menjadi faktor penurunan secara signifikan jumlah penumpang dan barang yang diangkut. Pada **Grafik 6.5** dapat dilihat perkembangan lalu lintas penumpang angkutan

udara tahun 2017, 2018, dan 2019. Jumlah penumpang pada tahun 2019 per bulannya lebih rendah dibandingkan tahun 2017 dan 2018.

c) Angkutan Darat

Angkutan darat di Sultra terdiri dari kendaraan bermotor, angkutan umum, dan angkutan bus. Jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih yang terbesar pada tahun 2018 berada di Kota Kendari yaitu sebanyak 11.122 buah (25,45%) untuk kendaraan roda dua dan sebanyak 3.008 buah (44,03%) untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Kondisi pengelolaan transportasi angkutan umum tidak berizin masih dijumpai di Sultra. Menyikapi hal tersebut maka dibentuk tim terpadu yang bertindak sebagai pengawas agar kondisi transportasi darat di Sultra mampu menciptakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan.

6.2 SEKTOR POTENSIAL DAERAH

Sultra memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah didukung dengan wilayah yang terdiri dari daratan dan lautan yang luas. Sumber daya alam yang dimiliki sebagai penyokong sektor perekonomian akan memberikan dampak positif bagi perekonomian rakyatnya apabila dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan sektor perekonomian dilakukan dengan melihat sektor potensial yang didorong dengan strategi perencanaan wilayah yang tepat.

Berdasarkan hasil analisis Tiplologi Klassen (**Gambar 6.1**), di kuadran II dengan nilai DS (-) dan LQ (<1) merupakan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif wilayah. Sektor-sektor yang berada di kuadran II antara lain: 1) pengadaan listrik dan gas, 2) industri pengolahan, 3) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, 4) penyediaan akomodasi dan makan minum, 5) jasa keuangan dan asuransi, dan 6) informasi dan komunikasi. Sektor tersebut memiliki kecenderungan terhambat tetapi berpotensi tinggi (*highly potential*), dan memiliki tingkat daya saing yang tinggi dan masih dapat berkembang dengan cepat. Selanjutnya untuk memperdalam analisis maka dilakukan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP).

6.2.1 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis MRP merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor ekonomi yang potensial berdasarkan pada kriteria pertumbuhan struktur ekonomi wilayah (Basuki dan Gayatri, 2009). Terdapat dua macam rasio pertumbuhan dalam pendekatan analisis MRP, yaitu:

1. Rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs)

RP_s adalah perbandingan antara pertumbuhan pendapatan (PDRB) sektor ke-i di wilayah studi dengan pertumbuhan pendapatan (PDRB) sektor ke-i di wilayah referensi.

$$\text{Rasio pertumbuhan wilayah studi (RP}_s\text{)} = \frac{\Delta E_{ij}/E_{ij}}{\Delta E_{in}/E_{in}}$$

2. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr)

RPr adalah perbandingan rata-rata pertumbuhan pendapatan (PDRB) sektor ke-i di wilayah studi dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan (PDRB) di wilayah referensi.

$$\text{Rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPr)} = \frac{\Delta E_{in}/E_{in}}{\Delta E_n/E_n}$$

Keterangan:

ΔE_{ij} = perubahan PDRB sektor ke-i di Sultra

ΔE_{in} = perubahan PDB sektor ke-i di tingkat Nasional

ΔE_n = perubahan PDB/PDRB

E_{ij} = PDRB sektor ke-i di Sultra pada tahun dasar

E_{in} = PDRB sektor ke-i di tingkat Nasional pada tahun dasar

E_n = total PDRB pada tahun dasar

Pada **Tabel 6.4** dapat dilihat bahwa terdapat enam sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor ekonomi yang potensial yaitu memiliki nilai RPr dan RP_s positif. Sektor tersebut antara lain: 1) pertanian, kehutanan, dan perikanan, 2) pertambangan dan penggalian, 3) industri pengolahan, 4) pengadaan listrik dan gas, 5) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan 6) jasa pendidikan. Dari hasil kedua analisis yaitu Tipologi Klassen dan MRP maka dapat disimpulkan bahwa sektor yang memiliki potensi dikembangkan di

Tabel 6. 4 Hasil Pengukuran Rasio Pertumbuhan Nasional (RPr) dan Rasio Pertumbuhan Sultra (RP_s) Tahun 2015-2019

Sektor	RPr	RP _s
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,76	0,21
Pertambangan dan Penggalian	0,21	2,60
Industri Pengolahan	0,66	0,36
Pengadaan Listrik dan Gas	0,47	0,62
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,58	-0,41
Konstruksi	0,68	-0,19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,41	0,40
Transportasi dan Pergudangan	0,48	-0,07
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,30	-0,15
Informasi dan Komunikasi	0,45	-0,11
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,24	-0,13
Real Estate	0,13	-0,63
Jasa Perusahaan	0,22	-0,34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,08	-0,53
Jasa Pendidikan	0,06	0,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,04	-0,28
Jasa lainnya	0,03	-0,46

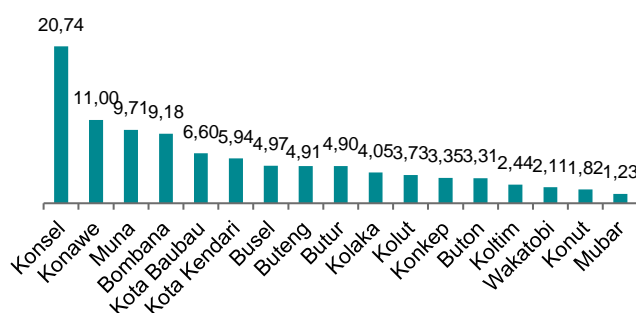
Sumber: BPS (diolah)

Sultra antara lain: 1) industri pengolahan, 2) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan 3) pengadaan listrik dan gas.

1) Industri Pengolahan

Pertumbuhan industri pengolahan didorong seiring meningkatnya produksi industri logam dasar feronikel di Sultra. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong berkembangnya industri pengolahan pangan lokal yang diharapkan bisa menjadi penggerak dalam pengembangan diversifikasi pangan. Adanya nilai tambah pada barang/jasa yang dihasilkan dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi seiring melimpahnya sumber daya alam yang dapat diolah.

Grafik 6. 6 Persentase Jumlah Usaha IMK menurut Kabupaten/Kota



Sumber: BPS (diolah)

Di Sultra Industri Mikro dan Kecil (IMK) pada tahun 2018 mencapai lebih dari 69 ribu usaha. Jumlah usaha IMK tersebut hanya menyumbang 1.64 persen dari jumlah usaha IMK se-Indonesia. Dari 17 kabupaten/kota di Sultra, usaha IMK terkonsentrasi pada Kabupaten Konawe Selatan yaitu sebesar 20,74 persen.

2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil, dan sepeda motor merupakan alternatif lapangan kerja bagi tenaga kerja Sultra, sebab Pemerintah mendukung dengan memberikan subsidi pada pembiayaan kepada masyarakat. KUR dan UMi merupakan program Pemerintah untuk meningkatkan usaha rakyat dengan menyediakan sumber pembiayaan. Dari **Tabel 6.5**, dapat dilihat terjadinya peningkatan yang signifikan tiap tahunnya jumlah debitur di sektor perdagangan besar dan eceran pada pembiayaan KUR Kecil dan UMi. Namun terjadi penurunan jumlah debitur pada KUR Mikro di tahun 2019 dari tahun sebelumnya.

Tabel 6. 5 KUR dan UMi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Lingkup Sultra Tahun 2017-2019

Tahun	Skema	Jumlah Debitur	Jumlah Penyaluran
2017	KUR Kecil	1.970	261.356.882.000
	KUR Mikro	24.134	464.699.450.000
	UMi	157	1.155.500.000
2018	KUR Kecil	3.677	473.548.689.869
	KUR Mikro	24.527	483.602.410.000
	UMi	1.901	7.657.500.000
2019	KUR Kecil	5.112	669.411.479.901
	KUR Mikro	20.805	424.287.580.000
	UMi	2.858	10.697.400.000

Sumber: SIKP (diolah)

3) Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan listrik dan gas sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian berkaitan dengan pembangunan smelter dan memberikan akselerasi munculnya industri di Sultra. Sepanjang tahun 2019, pembangkit listrik baru sukses dioperasikan dengan total kapasitas 130 Megawatt (MW). Pembangkit listrik tersebut antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Baubau dengan kapasitas 30 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Rongi dengan kapasitas 2x0,4 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) IPP Kendari 3 Moramo dengan kapasitas 2x50 MW.

6.3 TANTANGAN FISKAL REGIONAL DALAM MENDORONG POTENSI EKONOMI DAERAH

6.3.1 Tantangan Fiskal Pemerintah Pusat

Dewasa ini kondisi perekonomian di Sultra masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi penopang perekonomian di Sultra dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Kendati demikian banyaknya rakyat yang bekerja di sektor ini justru tidak menunjukkan kesejahteraan rakyatnya. Tingkat kemiskinan di Sultra masih berada di atas Nasional. Segala upaya telah dilakukan Pemerintah dalam mendorong perekonomian rakyatnya. Perhatian terhadap sektor pertanian pun tidak kurang-kurangnya dengan menjalankan berbagai program pendukung sektor ini. Kebijakan fiskal diterapkan dengan mengalokasikan dana untuk pembangunan sektor pertanian diantaranya DAK Fisik, pemberian Kredit Program untuk sektor pertanian, dan dana lainnya. Tantangan Pemerintah bukan lagi sebagai penyalur dana, namun memastikan dana yang disalurkan dimanfaatkan sebaik-baiknya secara efisien dan efektif. Analisis dampak transfer fiskal (*conditional transfer*) dan kredit program terhadap kinerja sektor pertanian dan kemiskinan di Sultra, menggunakan model ekonometrika sistem persamaan simultan dengan model estimasi *Two Stage Least Square (2SLS)*. Sebelum melakukan estimasi model, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi model untuk menentukan metode estimasi parameter yang tepat. Terdapat dua kemungkinan hasil identifikasi model, yaitu *unidentified* dan *identified* (*exactly identified* atau *over identified*). Menurut Juanda (2009), metode 2SLS merupakan suatu prosedur untuk menduga parameter model struktural yang *overidentified*. Model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PDRB_p = a_0 + a_1 DAK_p + a_2 DAK_i + a_3 DAK_j + a_4 KP + a_5 Ke + \mu_1 \dots (1)$$

$$Ke = b_0 + b_1 PDRB_p + b_2 Pop + b_3 Pend + \mu_2 \dots (2)$$

$PDRB_p$ = PDRB adhk sektor pertanian (juta Rupiah)

DAK_p = Dana Alokasi Khusus Fisik bidang Pertanian (juta Rupiah)

DAK_i = Dana Alokasi Khusus Fisik bidang Irigasi (juta Rupiah)

- DAK_j = Dana Alokasi Khusus Fisik bidang Jalan (juta Rupiah)
 KP = Jumlah debitur Kredit Program (jiwa) sektor Pertanian
 Ke = Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)
 Pop = Jumlah populasi (jiwa)
 $Pend$ = Angka Melek Huruf (persen)
 a_i, b_j = Parameter, dimana $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$; $j = 0, 1, 2, 3$.

Berdasarkan model persamaan yang digunakan, dapat diidentifikasi jumlah variabel eksogen dalam model (K) adalah 6, jumlah variabel eksogen (k) dalam persamaan (1) adalah 4 sedangkan persamaan (2) adalah 2, dan jumlah variabel endogen dalam model (m) adalah 2. Sehingga diperoleh nilai $[K-k > m-1]$ yaitu pada persamaan 1 $[6-4 > 2-1]$ maka didapatkan $2 > 1$ sedangkan pada persamaan 2 $[6-2 > 2-1]$ maka didapatkan $4 > 1$. Dari hasil yang diperoleh dari persamaan 1 dan persamaan 2 maka dapat dinyatakan persamaan teridentifikasi secara berlebih (*overidentification*) sehingga analisis yang digunakan adalah *Two Stage Least Square* (2SLS) (Gujarati dan Porter, 2009). Hasil perhitungan menggunakan analisis 2SLS dapat dilihat pada **Tabel 6.6**.

Tabel 6. 6 Hasil Estimasi PDRB Sektor Pertanian dan Kemiskinan

Variabel	Parameter Estimasi	Standar Error	Prob > t	Elastisitas
Persamaan (1) PDRB Sektor Pertanian				
Intercept	266.694,14 5	179.884,05 5	0,146	
Ke (Kemiskinan)	44.894,330	15.018,392	0,005*	0,746
DAKp (DAK Fisik Pertanian)	-12,437	16,389	0,452	-0,043
DAKi (DAK Fisik Irigasi)	-2,382	5,201	0,649	-0,017
DAKj (DAK Fisik Jalan)	-1,296	2,326	0,580	-0,041
KP (Kredit Program)	225,31	92,422	0,019*	0,128
R-square		0,682		
F-Value		18,009		
Prob		0,000		
Persamaan (2) Kemiskinan				
Intercept	39,103	17,584	0,031	
PDRBp (PDRB Sektor Pertanian)	9,387E-06	0,000	0,001*	0,565
Pend (Angka Melek Huruf)	-0,387	0,193	0,051**	-1,913
Pop (Jumlah Populasi)	3,472E-05	0,000	0,024*	0,281
R-square		0,613		
F-Value		23,247		
Prob		0,000		

Ket: * signifikan pada taraf nyata 5%

** signifikan pada taraf nyata 10%

Sumber: BPS, SIKP, OMSPAN (diolah)

Dari hasil analisis menggunakan metode 2SLS setelah dilakukan pengujian asumsi pada **Lampiran 9** diperoleh bahwa kredit program memiliki pengaruh positif terhadap PDRB sektor pertanian dengan nilai elastisitas sebesar 0,128 yang artinya peningkatan

jumlah debitur program Kredit Program sebesar 10 persen akan meningkatkan PDRB sektor pertanian sebesar 1,28 persen dalam jangka pendek. Hal ini sesuai dengan harapan dari program Pemerintah untuk meningkatkan sektor pertanian melalui kebijakan fiskal yang diterapkan. Analisis 2SLS ini menunjukkan adanya pengaruh simultan PDRB sektor pertanian dengan kemiskinan secara positif artinya meningkatnya PDRB sektor pertanian maka kemiskinan juga meningkat. Menurut Dahlquist (2013), kemungkinan yang terjadi pada kondisi ini disebabkan tidak seimbangannya distribusi PDRB sektor pertanian per kapita, keuntungan yang diperoleh tidak mencerminkan seluruh aspek pelaku ekonomi. Di Sultra kondisi ini bisa terjadi karena tenaga kerja yang bekerja di sektor ini yaitu petani biasanya hanya sebagai penggarap saja bukan pemilik sawah sehingga hanya upah yang diterima. Kondisi ini juga sebagai penyebab ketimpangan yang tinggi di Sultra beberapa tahun terakhir yaitu pada September 2019 sebesar 0,393. Selain PDRB sektor pertanian, pendidikan (pada taraf nyata 10%) dan jumlah populasi (pada taraf nyata 5%) di Sultra juga berpengaruh terhadap kemiskinan. Kesimpulannya adalah nampaknya kebijakan fiskal Pemerintah melalui kredit program memberikan sumbangsih yang positif sebab mendorong tenaga kerja sektor pertanian untuk berperan aktif menciptakan usahanya sendiri melalui UMKM. Hal ini perlu didukung dengan peningkatan *knowledge* bagi SDM di Sultra sehingga meningkatnya PDRB yang dihasilkan dari sektor unggulan dapat dirasakan secara merata dan kemiskinan dapat teratasi.

6.3.2 Tantangan Fiskal Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom memiliki peran yang besar untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki di daerahnya. Sumber daya alam yang melimpah sebagian besarnya adalah sektor unggulan Sultra diantaranya pertanian, kehutanan dan perikanan, dan pertambangan dan penggalian. Sektor unggulan jika dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Salah satu sektor unggulan yakni sektor pertanian masih memerlukan perhatian yang lebih sebab penyumbang PDRB terbesar ini belum menunjukkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah dalam mendukung sektor tersebut. Pemerintah Pusat ikut serta mendukung Pemerintah Daerah salah satunya melalui dana perimbangan DAK Fisik.

Sejalan dengan analisis 2SLS pada **Tabel 6.6**, diperoleh hasil analisis yang menunjukkan masih belum optimalnya penggunaan dana DAK Fisik sektor pertanian dalam mendukung perekonomian daerah di sektor pertanian. Oleh karena itu, perlu langkah strategis bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan melalui alokasi dana yang diperoleh. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan anggaran yang diperoleh untuk pengembangan sektor pertanian

sehingga berujung terpenuhinya kesejahteraan rakyat. Adapun yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan alokasi anggaran baik dari anggaran pusat maupun anggaran daerah itu sendiri yakni melalui analisis SWOT. Analisis SWOT adalah salah satu analisis melalui identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pengembangan. Dasar logika dalam analisis ini yaitu memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Hasil analisis SWOT dapat dilihat pada **Tabel 6.7**.

Tabel 6. 7 Matriks SWOT dan Alternatif Strategi Pengembangan Sektor Pertanian

INTERNAL EKSTERNAL	S - KEKUATAN	W - KELEMAHAN
	<ul style="list-style-type: none"> - SDA yang potensial dan dapat dikembangkan. - Komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan nilai tambah bagi sektor pertanian. - Dukungan legislatif yang baik dan mendukung pengembangan sektor pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar komoditi lokal masih berupa bahan baku yang diperuntukkan bagi perdagangan antar pulau. - Kualitas SDM masih rendah. - Efektifitas pengeluaran pemerintah sektor pertanian yang belum terlaksana.
O - PELUANG		
<ul style="list-style-type: none"> - Posisi geografis dengan iklim yang sesuai untuk pertanian. - Dukungan anggaran dr Pem Pusat pada sektor pertanian: DAK Fisik dan Kredit Program. - Meningkatkan kerjasama dengan investor untuk akses modal. - Kerjasama antar daerah untuk membangun jaringan dalam distribusi hasil pertanian. 	STRATEGI S – O <ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki sistem pengawasan dalam implementasi program pada sektor pertanian agar anggaran bisa memberikan <i>outcome</i> yang optimal. - Membangun kerjasama dengan investor untuk pengembangan sektor unggulan. - Membentuk kerjasama antar daerah untuk memperluas pasar. 	STRATEGI W – O <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sinergi dan kerjasama antara sektor dengan sektor lainnya. - Meningkatkan kualitas SDM melalui bimbingan dan pembinaan. - Pembinaan belanja anggaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi yang tepat sasaran.
T - ANCAMAN		
<ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya bencana karena eksploitasi SDA yang tidak sustainable. - Kondisi infrastruktur yang tidak memadai. - Dampak pemotongan anggaran. 	STRATEGI S – T <ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki infrastruktur agar hasil pertanian dapat di distribusikan ke daerah lain. - Memperbaiki sistem pengelolaan SDA secara bijak. - Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. 	STRATEGI W – T <ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki pengawasan pada pengeluaran agar tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Berdasarkan **Tabel 6.7**, pengembangan sektor pertanian membutuhkan 4 pilar yaitu pilar dari aspek sumberdaya fisik wilayah, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek kelembagaan. Pilar sumberdaya fisik wilayah terdiri dari sumber daya fisik alami meliputi

potensi lahan, iklim, dan air serta sumberdaya buatan seperti sarana dan prasarana penunjang sektor pertanian dan infrastruktur. Sultra telah mendukung sarana dan prasarana sektor pertanian melalui salah satunya dibangunnya bendungan Ladongi yang berada di Kabupaten Kolaka Timur. Pengembangan komoditas unggulan sebagai prioritas adalah komoditi jambu mete di Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Kolaka Utara, dan komoditi kakao/coklat di Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Konawe.

Aspek ekonomi diimplementasikan dari komoditas unggulan yang menyerap tenaga kerja. Saat ini sebagian besar tenaga kerja Sultra bekerja di sektor pertanian. Pendapatan masyarakat melalui upah pengolahan lahan hingga pemanenan akan meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya perputaran uang di wilayah tersebut untuk pembelian kebutuhan sehari-hari sehingga akan meningkatkan perekonomian wilayah. Program Pemerintah berupa pemberian pembiayaan untuk modal sektor pertanian bisa menjadi alternatif tenaga kerja untuk pembelian barang-barang pertanian maupun menciptakan UMKM dari hasil pertanian sehingga terdapat nilai tambah hasil produksi.

Aspek sosial melalui pembinaan tenaga kerja di sektor pertanian dan pembentukan koperasi kelompok tani akan membuat petani mempunyai modal sosial berupa kepercayaan (*trust*), norma (*norm*) dan terjalannya jaringan interaksi (*network*) yang kuat. Aspek ini akan meningkatkan pemahaman dan kemampuan petani untuk memasarkan hasil produksinya.

Aspek kelembagaan terbentuk dari peran Pemerintah membantu mendistribusikan hasil pertanian dengan memberikan sarana dan prasarana penunjang serta memberikan kebijakan yang proaktif terhadap kondisi surplus maupun defisit hasil pertanian. Selain itu gabungan koperasi kelompok tani berperan dapat memperkuat kelembagaan dari para petani dan meningkatkan nilai tawar (*bargaining power*) terhadap produk pertanian disamping peningkatan kualitas. Koperasi kelompok tani akan menjadi payung bagi petani dari para tengkulak yang sifatnya *oportunis* dan juga menjadi wadah untuk *share* pengetahuan dan pengalaman.

6.3.3 Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Pusat-Daerah

Sebelum masa pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan yang sentralistik yakni pemerintah pusat berperan dominan dalam menentukan keputusan termasuk perekonomian daerah. Setelah masa itu, pemerintah pusat menerapkan kebijakan baru dengan menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kebijakan tersebut dikenal dengan *desentralisasi fiskal*. Terlaksananya desentralisasi fiskal tidak berarti pemerintah daerah secara penuh lepas dari aturan pemerintah pusat. Daerah

otonom tetap mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional salah satunya adalah mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan nasional dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.

Dalam perencanaan pembangunannya, pemerintah pusat pada pelaksanaan RPJMN 2015-2019 membagi tiga dimensi pembangunan. Salah satu dimensinya adalah Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas: (1) Kedaulatan pangan, (2) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, (3) Kemaritiman dan kelautan, dan (4) Pariwisata dan industri. Sinergi Pemerintah daerah dalam pembangunan sektor unggulan dipaparkan dalam RPJMD 2018-2023 yaitu melakukan potensi pengembangan wilayah yang memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, seperti: perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lainnya dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Kawasan tersebut antara lain:

- a) Pusat Kegiatan Industri Pertambangan, terdiri atas:
 1. PKIP Asera-Wiwirano-Langgikima (AWILA) di Kabupaten Konawe Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe bagian selatan;
 2. PKIP Kapontori-Lasalimu (KAPOLIMU) di Lasalimu Kabupaten Buton dengan wilayah pelayanan mencakup Pulau Buton dan Pulau Muna;
 3. PKIP Kabaena-Torobulu-Wawonii (KARONI) di Lora Kabupaten Bombana dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Kepulauan;
 4. PKIP Pomalaa di Kabupaten Kolaka dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka Utara bagian selatan; dan
 5. PKIP Laiwoi di Kabupaten Kolaka Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe bagian utara.
- b) Kawasan strategis Teluk Kendari di Kota Kendari;
- c) Kawasan industri perkebunan Kakao di Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- d) Kawasan strategis kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- e) Kawasan industri pariwisata di Kabupaten Wakatobi;
- f) Kawasan strategis pertanian tanaman pangan di Wawotobi di Kabupaten Konawe;
- g) Kawasan industri semen di Pulau Muna;
- h) Kawasan pusat perdagangan di Kota Baubau; dan

- i) Kawasan pabrik gula di Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna dan Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

Kebijakan dalam penataan ruang yang mendukung pengembangan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri atas:

- Menata dan mengalokasikan sumber daya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di sektor unggulan pertanian, pertambangan, serta kelautan dan perikanan.
- Peningkatan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu.
- Menetapkan pola ruang secara proporsional untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, seimbang dan berkesinambungan.
- Menetapkan kawasan strategis dalam rangka pengembangan sektor unggulan dan pengembangan sosial ekonomi secara terintegrasi dengan wilayah sekitar.
- Pengembangan sumber daya manusia yang mampu mengelola sektor unggulan secara profesional dan berkelanjutan.

Pengembangan potensi wilayah merupakan proses untuk mengarahkan segala potensi wilayah untuk didayagunakan secara terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang tidak seimbang seringkali mengakibatkan disparitas pembangunan. Pengertian dari disparitas atau kesenjangan adalah suatu kondisi ketidakberimbangan pembangunan antar sektor atau wilayah dengan ditunjukkan perbedaan pertumbuhan antar wilayah. Hal ini tergantung pada perkembangan struktur ekonomi dan struktur wilayah (perkembangan sarana dan prasarana sosial-ekonomi). Dibukanya lapangan kerja yang padat dan tetap mempertimbangkan pemerataan fisik dan prasarana pendidikan di setiap wilayah merupakan upaya yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan antar wilayah (Gama, 2007).

BAB VII



Pengenalan ARBN Sejak Dini pada Hari Bakti Perbendaharaan di TPSA Puuwatu

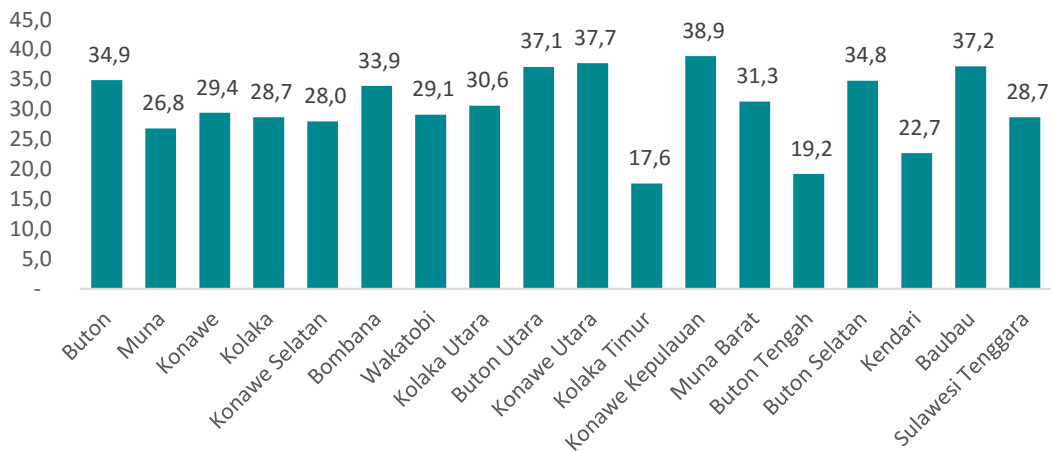
ANALISIS TEMATIK

BAB VII

ANALISIS TEMATIK

Stunting adalah suatu kondisi buruknya pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan kekurangan gizi, infeksi berulang dan tidak memadainya stimulasi psikososial (WHO). Seorang anak dikategorikan menderita *stunting* apabila memiliki tinggi badan lebih rendah dua tingkat dibawah rata-rata pertumbuhan anak sesuai standar World Health Organization (WHO). *Stunting* menyasar 1000 Hari Pertama Kehidupan sejak pembuahan berlangsung. *Stunting* berdampak pada kesehatan dalam bentuk gagal tumbuh, terhambatnya perkembangan kognitif dan motorik, berkurangnya produktifitas, dan meningkatnya risiko penyakit degenerative seperti diabetes. Selain berdampak pada kesehatan, *stunting* juga akan berdampak pada pada potensi kerugian ekonomi setiap tahunnya 2-3% dari GDP, *potential gain* dari investasi penurunan *stunting* di Indonesia sebanyak 48 kali lipat.

Grafik 7. 1 Prevalensi *Stunting* Sulawesi Tenggara 2018 (%)



Sumber: Kemenkes, 2019

Diperkirakan sebanyak 151 juta anak-anak di dunia menderita *stunting* dan tiga per empat penderita berada di wilayah Asia (55%) dan Afrika (39%) (WHO, 2019). Jumlah prevalensi *stunting* di Indonesia tahun 2019 sebanyak 27,67% (SSGBI, 2019) lebih rendah dibanding prevalensi *stunting* tahun 2018 (30,8%) (Riskesdes, 2018). Sementara itu, prevalensi *stunting* di Sulawesi Tenggara tahun 2017 sebanyak 35,5%, angka ini turun menjadi 28,7% di tahun 2018, nomor kedua terendah di wilayah Sulawesi. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 (Riskesdes) Kementerian Kesehatan, tiga besar prevalensi *stunting* tertinggi di wilayah Sulawesi Tenggara terjadi di Kabupaten Konawe Kepulauan dengan prevalensi sebanyak 38,9% disusul kemudian

Konawe Utara 37,7% dan Buton Utara 37,1%. Sementara itu, daerah dengan prevalensi terendah di Sulawesi Tenggara berada di Kolaka Timur 17,6%, Buton Tengah 19,2% dan Kota Kendari 22,7% (**Grafik 7.1**).

Gambar 7. 1 Konsep Malnutrisi



Sumber: Kementerian Kesehatan (2018)

Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam usaha penanganan *stunting*. Melalui Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013, pemerintah mendorong percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan. Dalam peraturan ini, ditetapkan beberapa strategi utama perbaikan gizi yang meliputi pengarusutamaan pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif, dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi.

Dalam usaha menangani *stunting*, Menteri Keuangan telah menetapkan *stunting* sebagai salah satu fokus penganggaran dengan tema Upaya Konvergensi Penanganan *Stunting* sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018. Secara kuantitatif kebijakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi output K/L dan mengalokasikan anggaran terkait percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*. Sedangkan secara kualitatif memastikan intervensi pencegahan/penurunan *stunting* dilakukan secara terintegrasi lintas sektor.

Pelibatan instansi lintas sektor dan masyarakat didasari pada penyebab *stunting* yang tidak saja disebabkan faktor gizi buruk yang diderita ibu hamil maupun anak balita tetapi juga terkait faktor lingkungan dan pola asuh. Faktor ini sejalan dengan Organisasi

Kesehatan Dunia (WHO) yang mengidentifikasi beberapa penyebab *stunting*, diantaranya praktek pemberian makanan kepada bayi dan anak, penyakit infeksi akut, infeksi yang berasal dari lingkungan, dan kemiskinan. Pola asuh menjadi faktor yang berperan dalam peningkatan *stunting*. Pemahaman pasangan muda atau calon ibu mengenai pola pengasuhan anak memberikan pengaruh pada pola pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). Selain itu, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC/*Ante Natal Care* (palayanan kesehatan ibu di masa kehamilan) dan *Post Natal Care*. Kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi juga menjadi faktor penyebab *stunting*. Selain faktor-faktor tersebut, permasalahan akses ke air bersih dan kurangnya sanitasi turut menyebabkan permasalahan *stunting*.

7.1. KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING*

Dengan faktor penyebab yang multidimensi, penanganan *stunting* tidak dapat dilakukan hanya pada satu faktor tetapi harus mencakup keseluruhan faktor penyebab. Oleh karenanya pemerintah telah menetapkan strategi penanganan *stunting* ke dalam 5 pilar. Diharapkan dengan penanganan *stunting* yang sistematis, tumbuh kembang anak menjadi maksimal dengan kemampuan emosional, social dan fisik siap untuk belajar, berinovasi dan berkompetisi. Dari berbagai penyebab masalah *stunting*, fokus Pemerintah adalah penanganan masalah kekurangan gizi kronis atau malnutrisi.

Gambar 7. 2 Lima Pilar Penanganan *Stunting* di Indonesia



Sumber: Kemenkes (Kebijakan dan Strategi Penanggulangan *Stunting* di Indonesia), 2019

Kerangka intervensi stunting yang dilakukan oleh pemerintah terbagi menjadi tiga kegiatan yang harus dilakukan yaitu (Kemenkes, 2018):

1. Intervensi Gizi Spesifik

Intervensi lebih ditujukan pada upaya menangani penyebab langsung masalah gizi (asupan makan dan penyakit infeksi) dan berada dalam lingkup kebijakan kesehatan. Melalui intervensi spesifik, sekitar 15 persen kematian balita dapat dikurangi bila intervensi berbasis bukti tersebut dapat ditingkatkan hingga cakupannya 90 persen, termasuk *stunting* yang dapat diturunkan sekitar 20,3 persen serta mengurangi prevalensi sangat kurus 61,4 persen. Selibhnya membutuhkan peran dari intervensi sensitif (sekitar 80 persen).

2. Intervensi Gizi Sensitif

Intervensi ditujukan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mendasari terjadinya masalah gizi (ketahanan pangan, akses pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, serta pola asuh) dan terkait dengan kebijakan yang lebih luas tidak terbatas bidang kesehatan saja tetapi juga pertanian, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial, dan pemberdayaan perempuan. Program dan kebijakan gizi sensitif ini memiliki kontribusi yang cukup besar untuk mendukung pencapaian target perbaikan gizi meskipun secara tidak langsung.

3. Lingkungan yang Mendukung

Lingkungan yang mendukung ditujukan untuk faktor-faktor mendasar yang berhubungan dengan status gizi seperti pemerintahan, pendapatan, dan kesetaraan. Investasi ini dapat berbentuk undang-undang, peraturan, kebijakan, investasi untuk pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kapasitas pemerintahan. Sebagian besar investasi yang menasar pada penyebab tidak langsung dan akar masalah gizi bukanlah hal yang langsung berkaitan dengan masalah gizi, dengan kata lain kegiatan yang dilakukan tidak secara eksplisit ditujukan untuk tujuan penanggulangan masalah gizi, namun intervensi ini dapat menjadi bagian penting dari perbaikan gizi.

Percepatan pencegahan *stunting* lebih efektif bila intervensi gizi baik spesifik maupun sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi merupakan pendekatan intervensi secara terkoordinir dan terpadu serta bersama-sama pada target prioritas. Intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama dalam hal ini adalah pencegahan *stunting*. Upaya ini dapat dicapai jika:

1. Program nasional, daerah, dan desa sebagai penyedia layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif dilaksanakan terpadu dan terintegrasi sesuai kewenangan.
2. Layanan setiap intervensi gizi tersedia dan dapat diakses bagi masyarakat yang membutuhkan terutama pada kelompok 1.000 HPK.

- Kelompok target prioritas menggunakan dan mendapatkan manfaat dari layanan tersebut.

7.2. PENANGANAN STUNTING OLEH PEMERINTAH

7.2.1. Belanja K/L dalam APBN

Penanganan stunting dapat dibagi menjadi tiga yaitu intervensi spesifik, intervensi sensitif, serta pendampingan, koordinasi dan dukungan teknis. Di wilayah Sulawesi Tenggara dana APBN untuk penanganan stunting dialokasikan kepada 8 kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran sebesar Rp135,3 miliar dengan realisasi mencapai Rp132,9 (98,2%).

Adapun kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan di Sulawesi Tenggara dilakukan dalam tiga program utama yakni kegiatan intervensi sensitive dengan anggaran sebesar Rp5,92 miliar (**Tabel 7.1**), intervensi spesifik Rp114,9 miliar (**Tabel 7.2**), dan kegiatan pendukung lainnya sebesar Rp14,4 miliar (**Tabel 7.3**).

Tabel 7. 1 Realisasi Anggaran Penanganan Stunting: Intervensi Sensitif

Program/Kegiatan/Output		Pagu	DIPA Realisasi	%Real
KEMENTERIAN KESEHATAN				
0240306 'Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat				
2080 Pembinaan Gizi Masyarakat				
'003	Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi Pada Ibu Hamil dan Balita	100,000,000	98,805,100	99%
'007	Pembinaan Dalam Peningkatan Pengetahuan Gizi Masyarakat	412,150,000	410,150,000	100%
'504	Peningkatan Surveilans Gizi	1,688,028,000	1,671,588,830	99%
5832 Pembinaan Kesehatan Keluarga				
'001	Pembinaan Dalam Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	402,634,000	401,386,000	100%
'002	Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama	123,880,000	56,642,800	46%
'004	Pembinaan Dalam Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	398,360,000	397,112,000	100%
'005	Pembinaan Pencegahan Stunting	211,335,000	210,351,600	100%
'018	Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal	375,019,000	372,234,000	99%
0240508 'Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
2058 Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra				
'006	Layanan Imunisasi	721,618,000	717,484,000	99.4%
2059 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang				
'005	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	489,550,000	466,683,900	95.3%
'008	Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan	1,010,000,000	1,002,744,000	99.3%
Total Belanja Intervensi Spesifik		5,932,574,000	5,805,182,230	97.9%

Sumber: Monitoring and Evaluation Budget Execution, 2019

Bimbingan pra nikah merupakan kegiatan Kementerian Agama untuk menyampaikan bimbingan terkait pernikahan dan kehidupan berkeluarga termasuk di dalamnya kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak. Target output pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah disebabkan oleh beberapa hal. Pertama jumlah persitiwa pernikahan di Kab. Konawe Utara tergolong masih rendah, sehingga kegiatan bimbingan pra nikah tidak dilaksanakan. Kedua, perbedaan tanggal pernikahan menyebabkan pelaksanaan bimbingan pra nikah tidak dapat dilakukan. Terkait jadwal pelaksanaan, kegiatan bimbingan pra nikah dapat dilaksanakan pada saat pasangan pengantin

mengurus izin pernikahan ke KUA sehingga tidak membutuhkan forum khusus untuk mengumpulkan seluruh pasangan pengantin. Kedua, bimbingan pra nikah dapat dilakukan juga melalui media cetak atau media social yang dapat diakses oleh calon pengantin tanpa diperlukan kehadiran secara fisik.

Tabel 7. 2 Realisasi Anggaran Penanganan Stunting: Intervensi Spesifik

Program/Kegiatan/Output		Pagu	DIPA Realisasi	%Real
KEMENTERIAN PERTANIAN				
0181114 'Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan				
'102	Lumbung Pangan Masyarakat	929,200,000.00	926,100,000.00	99.7%
1816 Pengembangan Pengankaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segara				
'101	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	4,218,000,000.00	4,166,200,000.00	98.8%
'106	hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	510,000,000.00	468,940,000.00	91.9%
KEMENTERIAN KESEHATAN				
0240306 'Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat				
5833 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				
'002	Kampanye Hidup Sehat Melalui Berbagai Media	1,479,444,000.00	1,472,421,000.00	99.5%
'004	Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan Dalam Mendukung Program Kesehatan	326,844,000.00	326,840,000.00	100%
5834 Penyehatan Lingkungan				
'504	Pengawasan Terhadap Saranan Air Minum	100,254,000.00	100,054,000.00	99.8%
'505	Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	208,630,000.00	207,470,000.00	99.4%
KEMENTERIAN AGAMA				
0250308 Program Bimbingan Masyarakat Islam				
2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah				
'008	Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	303,287,000.00	274,911,200.00	90.6%
0250812 Pengelolaan dan Pembinaan Masyarakat Budha				
2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha				
'014	Pembinaan Keluarga Hittasukhaya	22,250,000.00	21,104,220.00	94.9%
KEMENTERIAN SOSIAL				
0270507 'Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
2251 Jaminan Sosial Keluarga				
'001	Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat	3,136,325,000.00	3,111,004,500.00	99.2%
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
0330507 'Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman				
2414 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan				
'004	Sistem Pengelolaan Air Limbah	8,360,000,000.00	7,660,000,000.00	91.6%
2415 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
'007	Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan	42,359,993,000.00	42,107,166,500.00	99.4%
'008	SPAM Berbasis Masyarakat	49,231,751,000.00	48,844,298,611.00	99.2%
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN				
0630106 'Program Pengawasan Obat dan Makanan				
3165 Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM				
088	KIE Obat dan Makanan Aman	775,590,000.00	747,505,102.00	96.4%
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL				
0680106 'Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga				
3331 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi				
'081	Keluarga Yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	1,190,000,000.00	1,149,176,663.00	96.6%
'085	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR Dalam Edukasi Kespro dan Gizi Bagi Remaja Putri Sebagai Calon Ibu	1,819,507,000.00	1,701,044,300.00	93.5%
		114,971,075,000.00	113,284,236,096.00	99%

Sumber: Monitoring and Evaluation Budget Execution, 2019

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang berperan dalam penanganan *stunting*, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan berbagai kegiatan. BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kegiatan seputar keluarga berencana diantaranya berupa Penyiapan

Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR). Program PKBR merupakan program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan dengan tujuan agar para remaja mampu melangsungkan pendidikan, bekerja dan menikah secara terencana. Program PKBR terdiri atas dua kegiatan yakni Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja).

Tabel 7. 3 Realisasi Anggaran Penanganan Stunting: Intervensi Spesifik

Program/Kegiatan/Output	Pagu	DIPA Realisasi	%Real
KEMENTERIAN PERTANIAN			
0181114 'Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan			
'115 Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	230,000,000	193,590,000	84.2%
KEMENTERIAN KESEHATAN			
0240101 'Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
Kementerian Kesehatan			
2038 Pengelolaan Data dan Informasi			
'963 Layanan Data dan Informasi	474,969,000	465,176,000	97.9%
0240306 'Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat			
5833 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			
'001 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1,095,129,000	1,093,961,000	99.9%
0241210 'Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)			
2076 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
'501 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	119,915,000	100,458,000	83.8%
'505 Pelatihan Strategis Sumber Daya Manusia Kesehatan	3,438,897,000	3,328,570,752	96.8%
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
0330507 'Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman			
2414 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan			
'003 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	1,501,825,000	1,141,789,770	76.0%
2415 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
'003 Pembinaan dan Pengawasan SPAM	1,998,412,000	1,933,803,845	96.8%
BADAN PUSAT STATISTIK			
0540106 'Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik			
2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi			
'009 Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Masyarakat	5,266,716,000	5,232,786,317	99.4%
	14,452,707,000	13,816,975,684	96%

Sumber: Monitoring and Evaluation Budget Execution, 2019

BKKBN Prov. Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap 165 kelompok BKR dan 183 kelompok PIK-R. Khusus untuk penanganan stunting, pada tahun 2018 dan 2019 BKKBN Prov. Sulawesi Tenggara telah melaksanakan penyuluhan kepada 20 Desa di Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka sesuai dengan Peraturan Kepala Bappenas/Menteri PPN tentang lokus prioritas intervensi *stunting* dengan anggaran sebesar Rp3,6 miliar untuk 2 tahun (**Tabel 7.5**).

Dari hasil pembinaan terhadap keluarga dan remaja di beberapa daerah, ditemukan bahwa kasus stunting tidak saja terjadi di daerah yang secara ekonomi kekurangan tetapi juga dapat terjadi di daerah yang secara ekonomi tergolong mampu. Faktor yang

menyebabkan hal ini adalah pola asuh yang tidak memadai. Pada keluarga yang kedua orang tuanya bekerja, pola asuh termasuk pemberian makan kepada anak cenderung tidak diperhatikan sehingga anak tidak mendapatkan gizi yang mencukupi. Kedua, faktor jarak kelahiran anak yang terlalu dekat. Sesuai dengan waktu kritis terjadinya stunting yang di 1000 HPK -kurang lebih sampai dengan usia anak 3 tahun- anak dan ibu membutuhkan asupan nutrisi yang memadai. Pada keluarga dengan jarak kelahiran berdekatan, ada kecenderungan orang tua abai untuk memberikan pengasuhan dan nutrisi yang baik kepada anak-anaknya.

Tabel 7. 4 Lokus Prioritas Stunting Oleh BKKBN di Sultra

NO	DESA LOKUS PENANGANGAN STUNTING					
	2018 BUTON		2019 BUTON		KOLAKA	
1	Desa Laburunci	Kec. Pasarwajo	Desa Laburunci	Kec. Pasarwajo	Desa Lasiroku	Kec. Iwoimendaa
2	Desa Kabawakole	Kec. Pasarwajo	Desa Kabawakole	Kec. Pasarwajo	Desa Oko-Okoko	Kec. Pomalaa
3	Desa Sampuabalo	Kec. Siotapina	Desa Sampuabalo	Kec. Siotapina	Desa Tambea	Kec. Pomalaa
4	Desa Manuru	Kec. Siotapina	Desa Manuru	Kec. Siotapina	Desa Tanggeau	Kec. Polinggona
5	Desa Kumbewaha	Kec. Siotapina	Desa Kumbewaha	Kec. Siotapina	Desa Plasma Jaya	Kec. Polinggona
6	Desa Labuandiri	Kec. Siotapina	Desa Labuandiri	Kec. Siotapina	Desa Konawehea	Kec. Samaturu
7	Desa Bukit Asri	Kec. Kapontori	Desa Bukit Asri	Kec. Kapontori	Desa Amamutu	Kec. Samaturu
8	Desa Todanga	Kec. Kapontori	Desa Todanga	Kec. Kapontori	Desa Latuo	Kec. Samaturu
9	Desa Siontapina	Kec. Lasalimu Selatan	Desa Siontapina	Kec. Lasalimu Selatan	Desa Lapao-Pao	Kec. Wolo
10	Desa Talaga Baru	Kec. Lasalimu	Desa Talaga Baru	Kec. Lasalimu	Desa Puulemo	Kec. Baula

Sumber: BKKBN Prov. Sultra

7.2.2. Belanja DFDD

Gambar 7. 3 DFDD untuk Mengatasi Stunting



Dalam arah kebijakan TA 2019, Kebijakan DAK Fisik dan Dana Desa TA 2019 salah satunya adalah pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program (*programmatic approach*), contohnya adalah program penanggulangan *stunting*. Pada alokasi DFDD pemerintah telah mengalokasikan anggaran kedalam beberapa

kegiatan/menu yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun kegiatan/menu yang menjadi tema disasar adalah sebagaimana pada gambar 7.3.

Sumber: DJPK, Arah Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa T.A. 2019

Total penyaluran DFDD tahun 2019 di wilayah Sulawesi Tenggara mencapai Rp3,73 triliun atau sebesar 96,8% dari alokasi DFDD tahun 2019. Dari realisasi penyaluran tersebut sebanyak Rp663.575.857.942 ditujukan untuk penanganan stunting di daerah (**Tabel 7.5**). Anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang Kesehatan sebanyak Rp342,2 miliar, bidang air minum sebesar Rp110,1 miliar, dan sanitasi Rp97,7 miliar. Penanganan stunting melalui DFDD bidang kesehatan difokuskan pada pemberian makanan tambahan, bina keluarga balita, kegiatan sanitasi dan kegiatan penyuluhan kesehatan, gizi, serta keluarga berencana. Upaya ini didukung dengan upaya menyediakan air minum layak dan peningkatan kebersihan lingkungan.

Tabel 7.5 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Dalam Penanganan Stunting

	DAK Fisik	Dana Desa	Total
Rumah	18.426.820.000	-	18.426.820.000
Sanitasi	45.083.599.380	52.649.958.385	97.733.557.765
Air Minum	55.670.990.670	54.482.268.419	110.153.259.089
Kesehatan	304.367.658.411	37.854.589.208	342.222.247.619
Pendidikan	51.845.295.064	43.194.678.405	95.039.973.469
Total	475.394.363.525	188.181.494.417	663.575.857.942

Sumber: Online Monitoring SPAN

Dengan total penyalurn sebesar Rp663,5 miliar, pemerintah melalui DFDD telah membangun 1.312 unit gedung PAUD/TK/TPA baru pengadaan barang operasional PAUD sebanyak 30.012.207 paket, penyambungan air bersih ke rumah tangga sepanjang 119,4 km dan capaian *output* lainnya.

7.2.3. Belanja APBD

Penanganan stunting oleh Pemerintah Daerah (Pemda) di Sulawesi Tenggara dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Pembagungan Daerah (BAPPEDA). Penanganan *stunting* melalui intervensi gizi spesifik oleh Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara telah meningkatkan cakupan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil mencapai 87,87%, cakupan distribusi PMT pada Balita mencapai Secara keseluruhan Pemda di wilayah Sulawesi Tenggara telah merealisasikan belanja untuk penanganan

Tabel 7.6 Realiasi APBD Untuk Penanganan Stunting

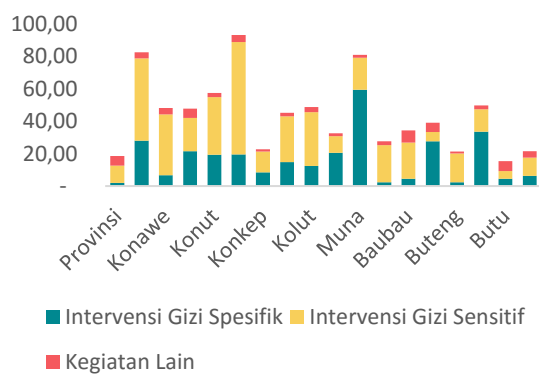
Kegiatan	Realisasi Anggaran
Intervensi Gizi Spesifik	293.459.607.279
Intervensi Gizi Sensitif	426.239.752.119
Kegiatan Lain	65,801,900,272
Total	785.501.079.670

Sumber : SIKD, 2019

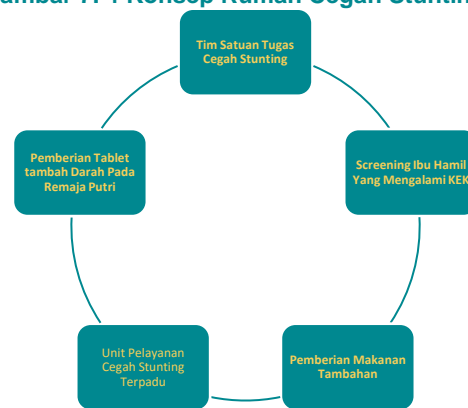
stunting sebesar Rp785,5 miliar. Kegiatan intervensi gizi sensitif mendapatkan alokasi terbesar dalam penanganan stunting dengan total anggaran sebesar Rp426,4 miliar. Realisasi anggaran untuk kegiatan terkait intervensi gizi spesifik pada tahun 2019 sebesar Rp284 miliar dan realisasi kegiatan lainnya direalisasikan sebesar Rp65 miliar.

Pemda Bombana pada tahun 2019 telah merealisasikan anggaran penanganan *stunting* sebesar Rp93 miliar yang didominasi kegiatan intervensi gizi sensitif sebesar Rp69,2 miliar yang digunakan untuk program pengembangan perumahan dan program keluarga berencana. Sementara itu dua kabupaten yang menjadi prioritas intervensi *stunting* di Sulawesi Tenggara yakni Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka pada tahun 2019 telah merealisasikan total anggaran sebesar Rp84,2 miliar.

Grafik 7. 2 Realiasi APBD 2019 Untuk Penanganan Stunting



Gambar 7. 4 Konsep Rumah Cegah Stunting



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara, 2019

Sumber: SIKD, 2019

Angka prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 sebesar 28,7% melampaui target RPJM tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 35,4%. Namun Pemda di Sulawesi Tenggara masih memiliki tantangan untuk mencapai target WHO diangka 20,2%. Untuk mencapai target ini, Provinsi Sulawesi Tenggara tengah merancang inovasi penurunan *stunting* dengan melibatkan masyarakat (RT/RW) yang bernama Rumah Cegah Stunting (RCS). Keberhasilan RCS ditentukan oleh adanya Satgas cegah *stunting* yang melakukan *screening* dari rumah ke rumah untuk mencari dan mendata Ibu hamil dengan KEK dan anak yang diindikasikan *stunting*. Apabila ditemukan adanya anak dengan indikasi stunting, Satgas cegah *stunting* akan melaporkan kepada unit pelayanan cegah *stunting* terpadu di Puskesmas untuk dilakukan tindakan kuratif lanjutan. Selain melakukan upaya pendataan, RCS juga mengedepankan upaya preventif. Upaya preventif kasus *stunting* dilakukan dengan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal pada ibu hamil dengan KEK dan Baduta kurang gizi.

RCS memiliki kelebihan dibanding kegiatan serupa (Posyandu), pertama karena kegiatannya bersifat khusus sehingga dapat lebih fokus untuk mengurangi *stunting*.

Kedua, potensi tingkat keberhasilan RCS lebih tinggi dibandingkan Posyandu karena sistem jemput bola yang dilakukan satgas cegah *stunting*. Sistem ini dapat berhasil karena pelibatan RT/RW/warga setempat sehingga sangat memahami kondisi lingkungan dan warganya. Namun demikian, upaya ini perlu disinkronkan dengan upaya penyuluhan mengenai keluarga berencana dan pola asuh yang menjadi fungsi BKKBN.

BAB VIII



Masjid Al Alam Kendari

PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah disusun dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 telah mempedomani RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara dan memperhatikan RPJMN, demikian pula dengan rencana pembangunan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 sudah mengacu dan harmonis dengan RKP;
2. Tantangan-tantangan yang dianggap memiliki nilai prioritas oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menjadi fokus program pembangunan baik dalam RPJMD maupun dalam RKPD dan dialokasikan dalam pagu indikatif;
3. Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 dapat tumbuh dengan signifikan di tengah tensi perang da dunia dan ketidakpastian ekonomi. Hal ini tercermin dari kinerja ekonomi yang mampu tumbuh pada level 6,51% dengan inflasi yang terkendali pada level 3,22%, suku bunga yang turun dari level 6% ke level 5% serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar Rp 14.000,- per dolar;
4. Pada tahun 2019, tingkat kesejahteraan di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami sedikit perbaikan. Tingkat kemiskinan turun menjadi 11,04% namun distribusi pendapatan tidak merata yang menyebabkan rasio gini meningkat menjadi 0,393 disertai peningkatan angka pengangguran sebesar 3,59%;
5. Terdapat kecenderungan pergeseran basis perekonomian Sulawesi Tenggara yang ditandai perlambatan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan bersamaan dengan peningkatan pertumbuhan industri pengolahan dan pertambangan. Disisi tenaga kerja, pertumbuhan industri pengolahan dan pertambangan tidak sejalan dengan peningkatan serapan tenaga kerja. Kedua hal ini dapat menyebabkan bertambahnya ketimpangan;
6. Target pendapatan pada APBN lingkup Sulawesi Tenggara tahun 2019 sebesar Rp3.066,71 miliar (target tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir). Di sisi belanja, pagu belanja tahun 2019 sebesar Rp25.329,49 miliar meningkat 10,01% dibandingkan tahun 2018. Sementara itu, realisasi pendapatan APBN di Provinsi

Sulawesi Tenggara tahun 2019 mencapai 122,90% sedangkan realisasi belanja APBN mencapai 96,50%;

7. Realisasi pendapatan perpajakan APBN pada tahun 2019 meningkat sebesar 38,58% menjadi Rp3.150,93 miliar dibanding tahun 2018 atau meningkat sebesar 91,019% dibanding tahun 2017. Sama halnya dengan realisasi perpajakan APBN, realisasi pendapatan bukan pajak juga mengalami peningkatan sebesar 3,58% menjadi Rp618,01 miliar pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 18,85% dari tahun 2017;
8. Pada tahun 2019, alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa se- Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan sebesar 10,21% dari tahun 2018 menjadi Rp17.672 miliar atau meningkat sebesar 10,79% dari tahun 2017. Sedangkan realisasi Dana Transfer ke Daerah pada tahun 2019 mencapai Rp17.189 miliar, meningkat sebesar 8,07% dari tahun 2018 atau 12,40% dari tahun 2017;
9. Persentase realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa terhadap alokasi pada tahun 2019 sebesar 97,27% menurun jika dibanding tahun 2018 yang sebesar 99,19% namun sebaliknya meningkat jika dibanding dengan tahun 2017 yang sebesar 95,88%;
10. Ruang fiskal Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 mencapai Rp 5.245,98 miliar atau 26,86 % dari total pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan Rasio PAD Provinsi Sulawesi Tenggara hanya sebesar 9,63% dan rasio dana transfer sebesar 87,99%. Sementara itu, realisasi TKDD lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara berpengaruh positif terhadap beberapa capaian indikator makroekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah penyaluran KUR dan UMi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp1,94 triliun yang disalurkan kepada 56.740 debitur. Daerah penyaluran KUR terbesar adalah Kota Kendari sebesar Rp373,46 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 7.418 debitur. Sementara itu sektor yang mendominasi penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai mencapai Rp1,1 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 28.774 debitur;
12. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Kredit Program (KUR dan UMi) memberikan pengaruh positif kepada peningkatan pendapatan (daya beli) masyarakat, PDRB, dan penurunan tingkat kemiskinan;
13. Alokasi belanja wajib, sektor pendidikan di Sultra pada tahun 2019 sebesar Rp1,57 triliun atau 20,53% sedangkan alokasi belanja sektor kesehatan sebesar Rp173,78 miliar atau 2,27% dari total belanja;
14. Target pendapatan APBD dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, pendapatan daerah ditargetkan

sebesar Rp20.855 miliar meningkat sebesar 10,39% dari tahun 2018, dan meningkat sebesar 20,41% dari tahun 2017. Demikian pula anggaran belanja, mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Rp22.026 miliar dari Rp19.072 miliar pada tahun 2018 dan Rp20.714 miliar pada tahun 2017;

15. Total realisasi pendapatan APBD seluruh pemerintah daerah se- Sultra mencapai Rp19.534 miliar meningkat sebesar 5,98% dari tahun 2018 atau meningkat sebesar 17,00% dari tahun 2017. Di sisi lain, realisasi belanja juga mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 7,27% dari tahun 2018 menjadi Rp19.413,6 miliar atau naik sebesar 13,79% dari tahun 2017;
16. Realisasi pendapatan APBD seluruh pemerintah daerah se- Sultra pada tahun 2019 didominasi oleh pendapatan dana transfer sebesar 87,52% dari total pendapatan daerah;
17. Berdasarkan hasil analisis dari penggabungan Analisis *location quotient*, analisis *Shift-Share*, Analisis Tipologi Klassen diperoleh bahwa sektor unggulan di Sultra adalah sektor pertambangan dan penggalian; pertanian, kehutanan dan perikanan; jasa pendidikan dan konstruksi;
18. Angka prevalensi *stunting* di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan. Penurunan ini melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Sulawesi Tenggara. Alokasi belanja, baik anggaran kementerian/lembaga, DAK Fisik dan Dana Desa maupun APBD telah memadai untuk penanganan *stunting*. Capaian output kegiatan penanganan *stunting* sudah cukup baik, namun pada beberapa kegiatan mengalami kendala teknis;

8.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Perkembangan pertumbuhan sektor-sektor di Sultra dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala pergeseran basis ekonomi dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ke sektor industri pengolahan atau manufaktur sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menyiapkan SDM yang dibekali dengan *skill* yang dibutuhkan di industri pengolahan;
2. Saat ini, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh dengan cukup impresif, namun pertumbuhan tersebut sangat bergantung pada cadangan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat mencari sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi di masa mendatang yang lebih *sustaine* untuk mengantisipasi habisnya cadangan sumber daya alam;
3. Inflasi Sultra dalam tiga tahun terakhir cenderung membentuk pola dimana inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni diikuti deflasi pada bulan agustus . Dengan pola ini,

- seluruh *stakeholder* yang berperan dalam pengendalian inflasi dapat mengambil langkah untuk mengantisipasi gejolak inflasi melalui penyediaan pasokan yang memadai bersamaan dengan edukasi pola konsumsi masyarakat serta perubahan pola tanam;
4. Mengingat sebaran penduduk miskin terbanyak berada di pedesaan dengan tingkat keparahan lebih dalam dibandingkan perkotaan maka diperlukan kebijakan untuk menjaga harga produk pertanian serta sarana yang dibutuhkan dalam bidang pertanian. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa dana yang di peruntukkan bagi masyarakat miskin di pedesaan telah tepat sasaran serta pekerjaan yang dibiayai oleh dana desa dilaksanakan dengan metode *cash for work* sehingga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan;
 5. Dengan ruang fiskal yang sempit ditambah dengan tingkat kemandirian Sultra yang rendah, pemerintah perlu menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah mengingat perekonomian Sultra masih mengalami pertumbuhan serta harus efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran
 6. Pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan negara bukan pajak mengingat Sultra memiliki potensi penerimaan dari sektor pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan yang terus mengalami pertumbuhan;
 7. Pemerintah daerah perlu meningkatkan lagi perannya dalam penyaluran KUR dan UMi sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sosialisasi dan pendataan wirausahawan baru perlu dilakukan secara massif agar tidak terkendala dengan modal usaha. Kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan sektor produktif dalam penyaluran KUR dan UMi perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyalur khususnya di daerah pedesaan untuk menumbuhkan wirausahawan baru dan mengurangi kemiskinan;
 8. Berdasarkan analisis potensi Sulawesi Tenggara, pemerintah perlu mendorong iklim investasi, kemudahan perizinan, kebijakan fiskal (*tax holiday, tax allowance*) pada bidang-bidang tersebut sehingga potensi pertumbuhan dapat lebih optimal. Pemerintah perlu mencari sumber pertumbuhan baru yang lebih *sustain* mengingat sumber pertumbuhan yang ada sekarang berasal dari *nonrenewable resources*. Kebijakan agraria (RTRW) perlu dirancang agar tidak terjadi alih fungsi lahan dibarengi dengan kebijakan modernisasi sarana prasarana pertanian. Pemerintah perlu mendorong hadirnya pusat-pusat ilmu/pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar tercipta kreasi dan inovasi baru yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*knowledge spillover/technology spillover*)

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia (2019). Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Vol. 20 No.12 Desember 2019
- Basuki, A.T dan Gayatri, U. 2009. Penentuan Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol 10, No.1. Imelia
- Brock, P., Rojas, L., (2000) Understanding The Behavior of Bank Spreads in Latin America. *Journal of Development Economics* 63, 113-134
- Dahlquist, Matilda. 2013. An Empirical Analysis of the Relationship between Poverty and Economic Growth across Low and Middle Income Countries, illustrated by the Case of Brazil [tesis]. Ilmu Sosial Sodertorn Universit.
- Gama AS 2007. Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Antara Kab/Kota Di Provinsi Bali. *J Eksos INPUT*. 2: 38-42
- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. 2009. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ho, T., Saunders, A., (1981) The Determinants of Bank Interest Margins: Theory and Empirical Evidence. *Journal of Financial and Quantitative Analysis* XV (4), 581-600
- Juanda, B. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. IPB Press. Bogor
- Krongkaew, M., & Kakwani, N. (2003). The growth-equity trade-off in modern economic development: The case of Thailand. *Journal of Asian Economics*, 14(5), 735–757. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2003.10.003>
- Kuncoro M 2006. *Ekonomika Pembangunan. Teori. Masalah dan Kebijakan*. Edisi ke4. Yogyakarta (ID): UPP STIM YKPN.
- Kuznet, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The Quarterly Journal of Economics*, 110, 353–377. <https://doi.org/10.2307/2118443>
- Levine, Ross.(1997). Financial Development and Economic Growth. *Journal of Economic Literature*. 35 (2): 688-726
- Mishkin, Frederic S. (2012). *Macroeconomics Policy and Practice*. Pearson Education, Boston
- N. Gregory Mankiw (2009). “*Macroeconomics*” Seventh Edition. Harvard University.

Nafziger, E. Wayne (2006). *Economic Development Fourth Edition*. Cambridge University Press, Cambridge

Okun, A. M. (1975). *Equality and Efficiency: The Big Tradeoff*.

Otoritas Jasa Keuangan (2019). *Statistik Perbankan Indonesia November 2019*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2017 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021.

Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard (2011). *“Macroeconomics” Eleventh Edition*. McGraw-Hill International Editions

Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju D.R. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta (ID) : Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sjafrizal 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta (ID): Rajagrafindo Persada

Sidabalok & Viverita (2011). *The Determinants of Net Interest Margin in the Indonesia Banking Sector*. *SSRN Electronic Journal*

Stiglitz, J. (1973). *Education and Inequality*. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 409, 135–145. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/1041499>

Todaro, M.P, 1977, *Economics for a developing world : an introduction to principles, problems and policies for development*, Longman, London

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

World Bank. (2015). *An Unfair Start: How Unequal Opportunities Affect Indonesia's Children*.

World Bank. (2016). *Ketimpangan Yang Semakin Lebar*. Jakarta: World Bank. Retrieved from <http://pubdocs.worldbank.org/en/986461460705141518/Indonesias-Rising-Divide-Bahasa-Indonesia.pdf>

www.sirusa.bps.go.id

www.sultra.bps.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Regresi Data Panel

Metode Common Effects

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/24/20 Time: 22:02
 Sample: 2016 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 17
 Total panel (balanced) observations: 68

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.77526	0.864790	74.90286	0.0000
KAPBD	2.72E-12	9.70E-12	0.280597	0.7800
KAPBN	-1.69E-11	2.32E-11	-0.728309	0.4692
KP	3.11E-11	6.24E-12	4.987738	0.0000
PABPD	8.85E-13	7.01E-12	0.126144	0.9000
PAPBN	1.11E-11	4.30E-12	2.583419	0.0122
R-squared	0.678773	Mean dependent var	67.95853	
Adjusted R-squared	0.652868	S.D. dependent var	4.748753	
S.E. of regression	2.797865	Akaike info criterion	4.979688	
Sum squared resid	485.3392	Schwarz criterion	5.175527	
Log likelihood	-163.3094	Hannan-Quinn criter.	5.057285	
F-statistic	26.20204	Durbin-Watson stat	0.191466	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Metode Fixed Effect

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/24/20 Time: 22:05
 Sample: 2016 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 17
 Total panel (balanced) observations: 68

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.74820	0.363165	183.7959	0.0000
KAPBD	5.65E-12	3.53E-12	1.599117	0.1166
KAPBN	-1.20E-11	6.18E-12	-1.933814	0.0593
KP	1.51E-11	4.78E-12	3.155132	0.0028
PABPD	-2.46E-12	2.43E-12	-1.015179	0.3153
PAPBN	-1.30E-13	1.38E-12	-0.094752	0.9249

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.988694	Mean dependent var	67.95853
Adjusted R-squared	0.983533	S.D. dependent var	4.748753
S.E. of regression	0.609383	Akaike info criterion	2.103453
Sum squared resid	17.08200	Schwarz criterion	2.821529
Log likelihood	-49.51741	Hannan-Quinn criter.	2.387977
F-statistic	191.5560	Durbin-Watson stat	1.221702
Prob(F-statistic)	0.000000		

Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	78.810423	(16,46)	0.0000
Cross-section Chi-square	227.583957	16	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 02/24/20 Time: 22:06

Sample: 2016 2019

Periods included: 4

Cross-sections included: 17

Total panel (balanced) observations: 68

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.77526	0.864790	74.90286	0.0000
KAPBD	2.72E-12	9.70E-12	0.280597	0.7800
KAPBN	-1.69E-11	2.32E-11	-0.728309	0.4692
KP	3.11E-11	6.24E-12	4.987738	0.0000
PABPD	8.85E-13	7.01E-12	0.126144	0.9000
PAPBN	1.11E-11	4.30E-12	2.583419	0.0122

R-squared	0.678773	Mean dependent var	67.95853
Adjusted R-squared	0.652868	S.D. dependent var	4.748753
S.E. of regression	2.797865	Akaike info criterion	4.979688
Sum squared resid	485.3392	Schwarz criterion	5.175527
Log likelihood	-163.3094	Hannan-Quinn criter.	5.057285
F-statistic	26.20204	Durbin-Watson stat	0.191466
Prob(F-statistic)	0.000000		

Nilai Chi-Square < 0,05 maka memilih fixed effect dibandingkan common effect

Uji Random Effects

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 02/24/20 Time: 22:08
 Sample: 2016 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 17
 Total panel (balanced) observations: 68
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.25918	0.680454	97.37494	0.0000
KAPBD	2.50E-12	3.38E-12	0.740467	0.4618
KAPBN	-1.28E-11	6.15E-12	-2.076794	0.0420
KP	2.24E-11	4.15E-12	5.395542	0.0000
PABPD	-1.29E-12	2.38E-12	-0.541543	0.5901
PAPBN	-1.94E-13	1.35E-12	-0.143364	0.8865

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		2.450592	0.9418
Idiosyncratic random		0.609383	0.0582

Weighted Statistics			
R-squared	0.461205	Mean dependent var	8.384983
Adjusted R-squared	0.417754	S.D. dependent var	0.899060
S.E. of regression	0.686028	Sum squared resid	29.17934
F-statistic	10.61434	Durbin-Watson stat	0.807741
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.509712	Mean dependent var	67.95853
Sum squared resid	740.7738	Durbin-Watson stat	0.031817

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.576865	5	0.0006

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
KAPBD	0.000000	0.000000	0.000000	0.0022
KAPBN	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.1800
KP	0.000000	0.000000	0.000000	0.0019
PABPD	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.0132
PAPBN	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.8024

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 02/24/20 Time: 22:09

Sample: 2016 2019

Periods included: 4

Cross-sections included: 17

Total panel (balanced) observations: 68

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.74820	0.363165	183.7959	0.0000
KAPBD	5.65E-12	3.53E-12	1.599117	0.1166
KAPBN	-1.20E-11	6.18E-12	-1.933814	0.0593
KP	1.51E-11	4.78E-12	3.155132	0.0028
PABPD	-2.46E-12	2.43E-12	-1.015179	0.3153
PAPBN	-1.30E-13	1.38E-12	-0.094752	0.9249

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.988694	Mean dependent var	67.95853
Adjusted R-squared	0.983533	S.D. dependent var	4.748753
S.E. of regression	0.609383	Akaike info criterion	2.103453
Sum squared resid	17.08200	Schwarz criterion	2.821529
Log likelihood	-49.51741	Hannan-Quinn criter.	2.387977
F-statistic	191.5560	Durbin-Watson stat	1.221702
Prob(F-statistic)	0.000000		

Karena nilai uji Hausman ($0,0006$) $< 0,05$ maka metode yang dipilih adalah fixed effect

Hasil analisis dengan fixed effect

Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 02/24/20 Time: 22:05
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 68

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.74820	0.363165	183.7959	0.0000
KAPBD	5.65E-12	3.53E-12	1.599117	0.1166
KAPBN	-1.20E-11	6.18E-12	-1.933814	0.0593
KP	1.51E-11	4.78E-12	3.155132	0.0028
PABPD	-2.46E-12	2.43E-12	-1.015179	0.3153
PAPBN	-1.30E-13	1.38E-12	-0.094752	0.9249

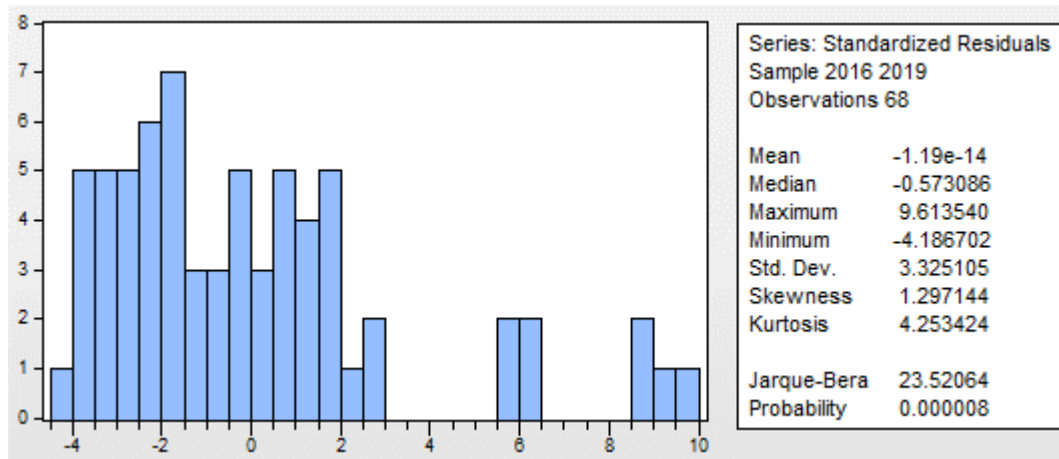
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.988694	Mean dependent var	67.95853
Adjusted R-squared	0.983533	S.D. dependent var	4.748753
S.E. of regression	0.609383	Akaike info criterion	2.103453
Sum squared resid	17.08200	Schwarz criterion	2.821529
Log likelihood	-49.51741	Hannan-Quinn criter.	2.387977
F-statistic	191.5560	Durbin-Watson stat	1.221702
Prob(F-statistic)	0.000000		

Pengujian Asumsi

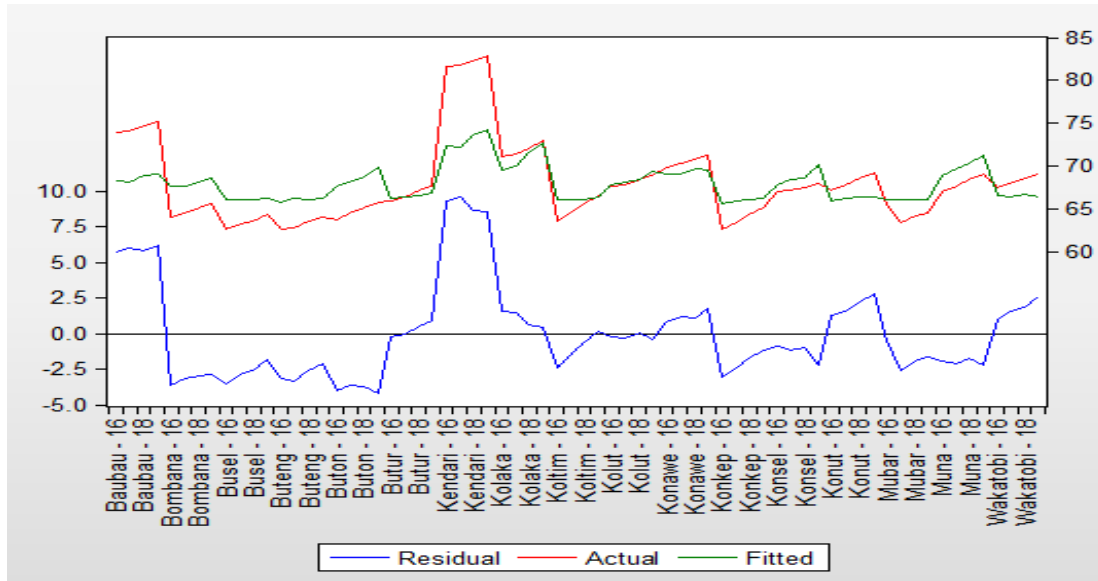
1. Uji Normalitas



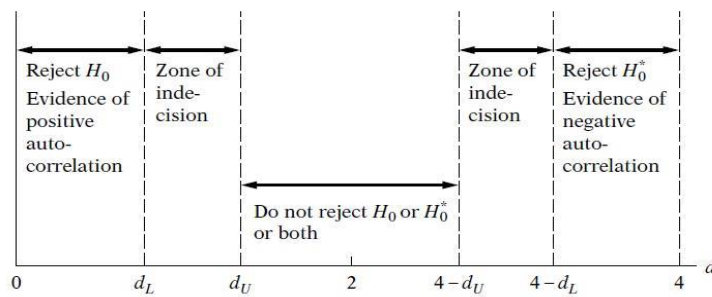
2. Uji Multikolinearitas

Correlation					
	KAPBD	KAPBN	KP	PABPD	PAPBN
KAPBD	1.000000	0.292748	0.675994	0.815139	0.341764
KAPBN	0.292748	1.000000	0.283255	0.028779	0.000961
KP	0.675994	0.283255	1.000000	0.666739	0.619044
PABPD	0.815139	0.028779	0.666739	1.000000	0.436631
PAPBN	0.341764	0.000961	0.619044	0.436631	1.000000

3. Uji Heteroskedasitas



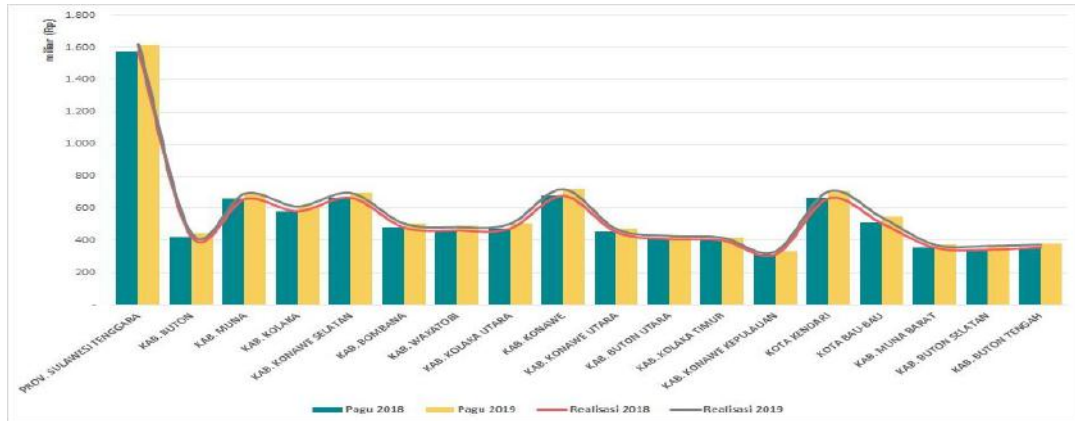
4. Uji Autokorelasi



	0	dl	du	2	4-du	4-dl	4
	0	1.4537	1.7678		2.2322	2.5463	
	daerah abu-abu			daerah abu-abu			
	autokol positif		daerah terima		autokol negatif		
	dl	du					
n=68	1.3565	1.8768				0.3564	2.7569
k=5							
Nilai 1.2217							

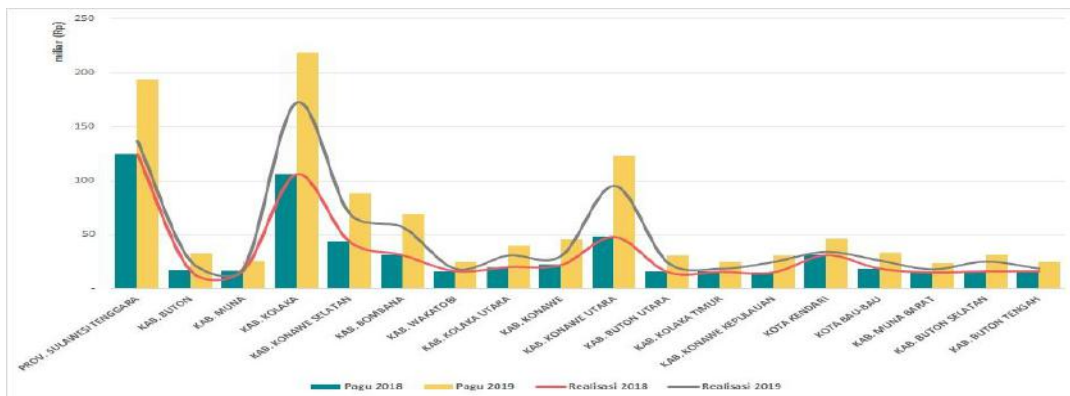
Lampiran 2 Realisasi Transfer

Pagu dan Realisasi DAU lingkup Sultra (miliar Rp.)



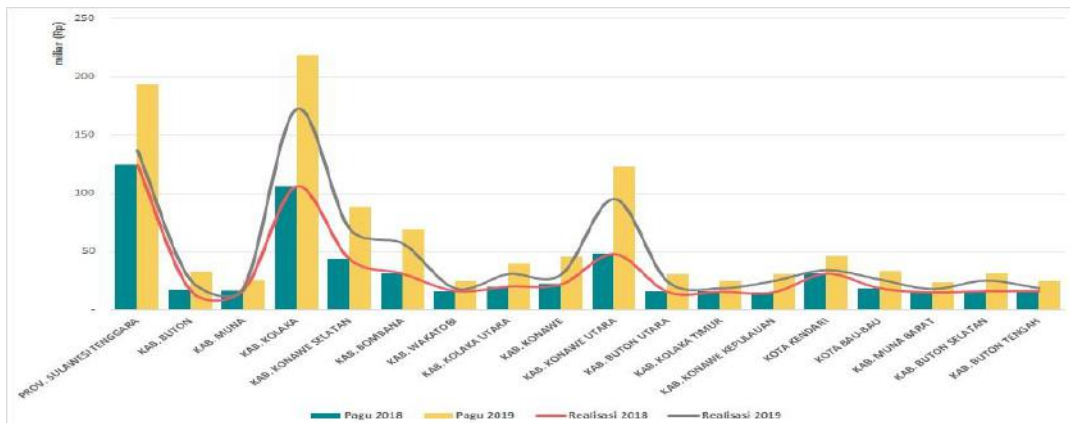
Sumber: SIMTRADA-DJPK (diolah)

Pagu dan Realisasi DBH lingkup Sultra (miliar Rp.)



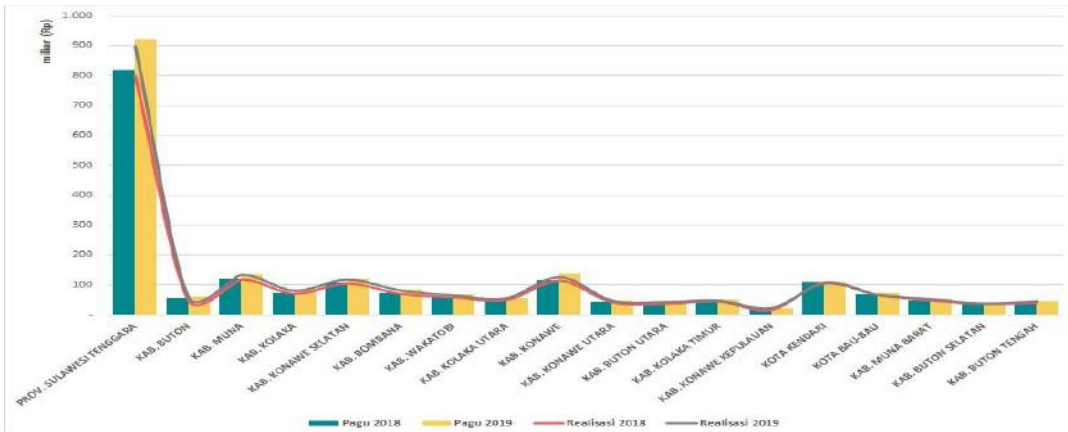
Sumber: SIMTRADA-DJPK (diolah)

Pagu dan Realisasi DAK Fisik lingkup Sultra (miliar Rp.)



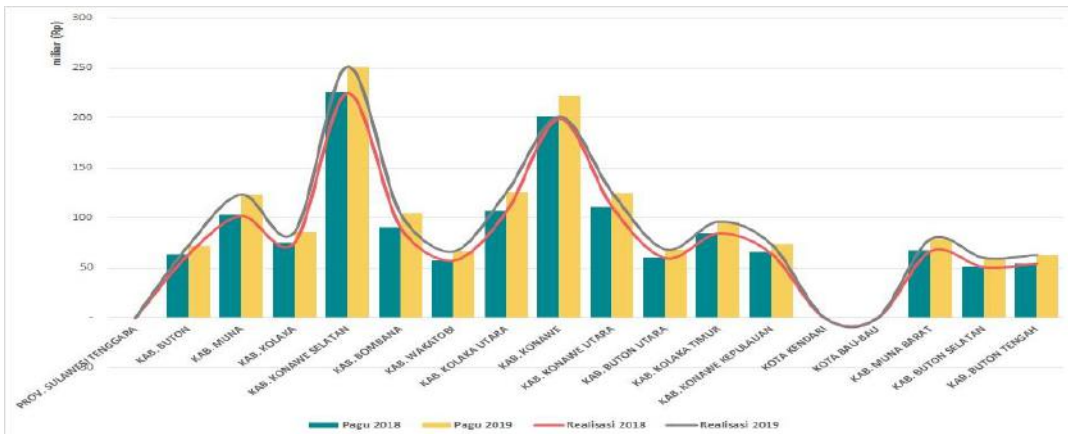
Sumber: SIMTRADA-DJPK (diolah)

Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik lingkup Sultra (miliar Rp.)



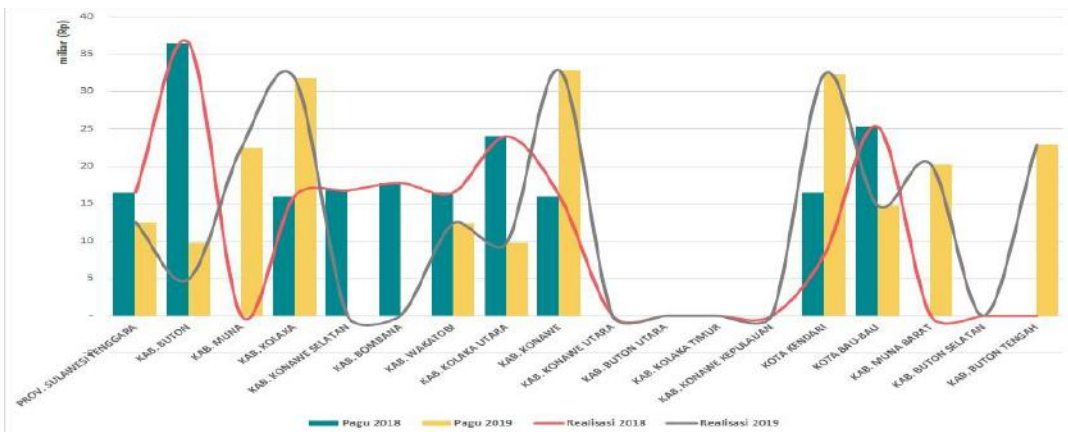
Sumber: SIMTRADA-DJPK (diolah)

Pagu dan Realisasi Dana Desa lingkup Sultra (miliar Rp.)



Sumber: SIMTRADA-DJPK (diolah)

Pagu dan Realisasi DID lingkup Sultra (miliar Rp.)



Sumber: SIMTRADA-DJPK (diolah)

Lampiran 3 Penyaluran Kredit Program

Penyaluran KUR per Wilayah lingkup Sultra

No.	Kabupaten/Kota	Debitur	Penyaluran	Outstanding	Rata-rata per Debitur
1	Kab. Kolaka	8.370	293.253.754.000	229.017.169.203	35.036.291
2	Kab. Konawe	7.238	180.125.567.101	121.701.314.248	24.886.097
3	Kab. Muna	8.999	234.055.500.000	154.800.805.908	26.009.057
4	Kab. Buton	5.598	166.633.000.000	118.721.847.520	29.766.524
5	Kab. Konawe Selatan	5.459	190.048.425.000	150.144.380.652	34.813.780
6	Kab. Bombana	3.161	120.595.277.374	94.569.403.476	38.150.989
7	Kab. Wakatobi	1.346	39.149.000.000	27.492.195.162	29.085.438
8	Kab. Kolaka Utara	3.993	139.293.485.800	112.260.032.596	34.884.419
9	Kab. Konawe Utara	255	13.405.125.000	11.056.311.693	52.569.118
10	Kab. Buton Utara	1.083	29.737.600.000	22.426.923.066	27.458.541
11	Kab. Kolaka Timur	74	12.907.000.000	11.184.915.844	174.418.919
12	Kab. Konawe Kepulauan	26	1.894.000.000	1.669.911.839	72.846.154
13	Kab. Muna Barat	4	672.000.000	464.341.452	168.000.000
14	Kab. Buton Tengah	15	3.265.000.000	3.057.367.891	217.666.667
15	Kab. Buton Selatan	21	2.805.000.000	2.743.085.837	133.571.429
16	Kota Kendari	7.418	373.462.206.104	296.524.277.116	50.345.404
17	Kota Bau-Bau	3.680	142.701.600.000	107.176.057.161	38.777.609
TOTAL		56.740	1.944.003.540.379	1.465.010.340.664	

Sumber: SIKP-DJPb (diolah)

Penyaluran KUR per Sektor lingkup Sultra

No.	Sektor	Debitur	Penyaluran	Outstanding	Rata-rata per Debitur
1	PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	15.108	379.010.246.633	280.821.331.247	25.086.725
2	PERIKANAN	3.962	94.291.900.000	67.592.793.116	23.799.066
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	3.385	119.850.300.000	89.045.073.957	35.406.292
4	KONSTRUKSI	14	987.000.000	829.563.129	70.500.000
5	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	28.774	1.104.371.459.901	838.322.672.735	38.380.881
6	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	1.511	102.106.800.000	82.999.024.425	67.575.645
7	TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	629	26.332.000.000	19.732.436.549	41.863.275
8	REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	218	16.855.888.045	13.975.745.900	77.320.587
9	JASA PENDIDIKAN	16	665.000.000	468.692.711	41.562.500
10	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	30	1.610.000.000	795.353.011	53.666.667
11	JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA	3.092	97.908.415.800	70.427.653.894	31.665.076
12	JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA	1	14.530.000	-	14.530.000
TOTAL		56.740	1.944.003.540.379	1.465.010.340.664	

Sumber: SIKP-DJPb (diolah)

Penyaluran KUR per Skema lingkup Sultra

No.	Skema	2017		2018		2019		Perubahan 2018 - 2019	
		Debitur	Penyaluran	Debitur	Penyaluran	Debitur	Penyaluran	Debitur	Penyaluran
1	MIKRO	41.345	787.286.820.000	44.474	873.277.050.000	46.109	942.255.126.633	3,68%	7,90%
2	KECIL	3.716	426.484.782.000	5.591	687.155.129.869	7.721	990.237.882.946	38,10%	44,11%
3	TKI	11	220.385.000	21	366.160.000	52	813.130.800	147,62%	122,07%
4	UMI	157	1.155.500.000	1.522	5.814.800.000	2.858	10.697.400.000	87,78%	83,97%
TOTAL		45.229	1.215.147.487.000	51.608	1.566.613.139.869	56.740	1.944.003.540.379	9,94%	24,09%

Sumber: SIKP-DJPb (diolah)

Lampiran 4 Profil Keuangan Pemerintah Daerah

Profil APBD Sulawesi Tenggara Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Urusan Pemerintahan	Perkembangan Belanja APBD berdasarkan Jenis Urusan (dalam miliar Rupiah)				
	2017 Pagu	2018 Pagu	Porsi (%)	2019 Pagu	Porsi (%)
Urusan Wajib					
1. Pendidikan	4.015,4	4.431,58	22,88	4.734,02	21,81
2. Kesehatan	2.053,6	2.345,94	12,11	2.770,55	12,76
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.699,2	2.798,47	14,45	3.381,32	15,58
4. Perumahan	148,83	197,97	1,02	241,52	1,11
5. Ketentraman, kantibmum, perlint masy	0	223,29	1,15	269,62	1,24
6. Perencanaan Pembangunan	158,22	0	0,07	0	0,00
7. Perhubungan	292,02	251,19	1,30	282,73	1,30
8. Lingkungan Hidup	155,26	176,01	0,91	177,33	0,82
9. Pertanahan	2,99	3,11	0,02	4,14	0,02
10. Kependudukan dan Catatan Sipil	77,26	79,51	0,41	90,34	0,42
11. Pemberdayaan Perempuan	64,93	74,06	0,38	76,77	0,35
12. Keluarga Berencana & Keluarga	86,96	155,54	0,80	160,37	0,74
13. Sosial	82,65	103,87	0,54	103,87	0,54
14. Tenaga Kerja	172,88	43,17	0,22	59,06	0,27
15. Koperasi dan UKM	72,75	71,33	0,37	94,32	0,43
16. Penanaman Modal	51,06	54,41	0,28	73,19	0,34
17. Kebudayaan	10,04	18,29	0,09	26,12	0,12
18. Pemuda dan Olahraga	65,31	86,29	0,45	89,67	0,41
19. Kesatuan Bangsa & Politik Dlm. Negeri	220,50	223,29	0,21	0	0
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum	6.699,3	6.829,78	35,27	7.471,35	34,42
21. Ketahanan Pangan	72,58	71,20	0,37	71,20	0,37
22. Pemberdayaan Masy. dan Desa	83,72	79,82	2,01	84,54	0,39
25. Komunikasi dan Informatika	68,89	69,19	0,36	95,11	0,44
26. Perpustakaan	44,71	51,35	0,27	69,11	0,32
Urusan Pilihan					
1. Pertanian	366,27	438,33	2,26	547,64	2,52
2. Kehutanan	15,86	82,25	0,42	95,26	0,44
3. Energi dan SD Mineral	78,88	65,52	0,34	13,98	0,06
4. Pariwisata	120,19	135,37	0,70	163,80	0,75
5. Kelautan dan Perikanan	158,16	168,59	0,87	178,00	0,82
6. Perdagangan & Perindustrian	161,37	221,81	1,15	237,54	1,09
7. Transmigrasi	0	39,54	0,20	47,06	0,22

Sumber: Web DJPK (SIKD)

Lampiran 5

Profil dan Jenis Layanan BLU Daerah di Sulawesi Tenggara

No	Jenis Layanan	Nama BLUD	Alamat	No. Telpn	Instansi Teknis	Alamat
1	Kesehatan	RSUD BahteraMas Prov Sultra	Jl. Kapten Piere Tendean No.50 Baruga	08134150437	Dinas Kesehatan Prov. Sultra	Jl. Balaikota No.1 Kendari
2	Kesehatan	RSUD Abunawas Kendari	Jl. ZA Sugianto No. 39 Kendari	08218857633	Dinas Kesehatan Kota Kendari	Jl.Drs. H.Abdullah Silondae No.8 Kendari
3	Kesehatan	RSUD Kab Konawe	Jl. P. Diponegoro No.301 Konawe	0408-2421014	Dinas Kesehatan Kab. Konawe	Jl. Ingolobungga due II No.323 Unaaha
4	Kesehatan	RSUD Kab. Konawe Selatan	Jl. Poros Andoolo no. 1	08114001003	Dinas Kesehatan Kab. Konse	Andoolo Kab. Konse
5	Kesehatan	RSUD Kab. Konawe Utara	Jl. Poros Kendari Asera Kab. Konawe Utara		Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara	Jl. Asera Kel. Wongudu Kec. Asera Kab. Konut
6	Kesehatan	RSUD Kab. Bombana	Kl. Poros Poea Kec. Rumbia Tengah Bombana	085241342868	Dinas Kesehatan Kab. Bombana	Jl. Masjid Raya No. 7 Rumbia Bombana
7	Kesehatan	RSUD Kota Baubau	Jl. Laode Manarfa Baubau	085241618035	Dinas Kesehatan Kota Baubau	Jl. Bhakti ABRI No.01 Baubau
8	Kesehatan	RSUD Wakatobi	Jl. Uludae Samad Wakatobi	085824560031	Dinas Kesehatan Kab. Wakatobi	Jl. Perkantoran Manugelang Wangi-wangi Wakatobi
9	Kesehatan	RSUD HM. Djafar Harun Kolaka Utara	Jl. Trans Sulawesi Lasusua Kolaka Utara	08118880545	Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Utara	Komplek Perkantoran Bundaran Ponggiha Lasusua Kab. Konut
10	Kesehatan	RSUD Kab. Kolaka	Jl. Dr. Sutomo No. 01 Kolaka	0405-2321042	Dinas Kesehatan Kab. Kolaka	Jl. Pancasila No. 12 Kolaka
11	Kesehatan	RSUD Kab. Muna	Jl. Ahmad Yani no. 10 Raha	0403-21220	Dinas Kesehatan Kab. Muna	Jl. MH Thamrin No.21 Raha
12	Simpan Pinjam	BLUD Harum Kota Kendari	Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 37 Kendari	081341546525	Dinas Koperasi dan UMKM Prov Sultra	Jl. Mayjen S.Parman No.41 Kendari
13	Pengelolaan Hutan Produksi	BLUD UPTD KPH Unit XXIV Gularaya	Andoolo Desa Anduna Jl. Poros Tinanggea- Punggaluku Kab. Konse	082188054799	Dinas Kehutanan Prov. Sultra	Karumba, Mandonga Kota Kendari

Sumber : data primer

Lampiran 6 Belanja APBN Untuk Penanganan Stunting

Belanja Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2019 : Intervensi Gizi Spesifik

Program/Kegiatan/Output	DIPA			Output			Keterangan
	Pagu	Realisasi	%Real	Target	Capaian	% Capaian	
KEMENTERIAN KESEHATAN							
0240306 'Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat							
2080 Pembinaan Gizi Masyarakat							
'003	Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi Pada Ibu Hamil dan Balita	100,000,000	98,805,100	99%	17	17	100%
'007	Pembinaan Dalam Peningkatan Pengetahuan Gizi Masyarakat	412,150,000	410,150,000	100%	17	17	100%
'504	Peningkatan Surveilans Gizi	1,688,028,000	1,671,588,830	99%	17	17	100%
5832 Pembinaan Kesehatan Keluarga							
'001	Pembinaan Dalam Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	402,634,000	401,386,000	100%	1	1	100%
'002	Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama	123,880,000	56,642,800	46%	1	1	100%
'004	Pembinaan Dalam Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	398,360,000	397,112,000	100%	1	1	100%
'005	Pembinaan Pencegahan Stunting	211,335,000	210,351,600	100%	1	1	100%
'018	Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal	375,019,000	372,234,000	99%	5	5	100%
0240508 'Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit							
2058 Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra							
'006	Layanan Imunisasi	721,618,000	717,484,000	99.4%	17	16.83	99%
2059 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang							
'005	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	489,550,000	466,683,900	95.3%	606	575.7	95%
'008	Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan	1,010,000,000	1,002,744,000	99.3%	6	6	99%
Total Belanja Intervensi Spesifik		5,932,574,000	5,805,182,230	97.9%	689	658	96%

Belanja Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2019 : Intervensi Gizi Sensitif

Program/Kegiatan/Output	Pagu	DIPA		Target	Output		Keterangan
		Realisasi	%Real		Capaian	% Capaian	
KEMENTERIAN PERTANIAN							
0181114 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							
1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan							
'102 Lumbung Pangan Masyarakat	929,200,000.00	926,100,000.00	99.7%	13.0	13.0	100.0%	
1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segara							
'101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan	4,218,000,000.00	4,166,200,000.00	98.8%	98.0	96.0	98.0%	
'106 hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	510,000,000.00	468,940,000.00	91.9%	1.0	1.0	100.0%	
KEMENTERIAN KESEHATAN							
0240306 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat							
5833 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
'002 Kampanye Hidup Sehat Melalui Berbagai Media	1,479,444,000.00	1,472,421,000.00	99.5%	2.0	2.0	100.0%	
'004 Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan Dalam Mendukung Program Kesehatan	326,844,000.00	326,840,000.00	100%	1.0	1.0	100.0%	
5834 Penyehatan Lingkungan							
'504 Pengawasan Terhadap Saranan Air Minum	100,254,000.00	100,054,000.00	99.8%	7.679	7.679	100.0%	
'505 Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	208,630,000.00	207,470,000.00	99.4%	992	992	100.0%	
KEMENTERIAN AGAMA							
0250308 Program Bimbingan Masyarakat Islam							
2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah							
'008 Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	303,287,000.00	274,911,200.00	90.6%	1637.0	985.0	60.2%	
0250812 Pengelolaan dan Pembinaan Masyarakat Budha							
2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha							
'014 Pembinaan Keluarga Hittasukhaya	22,250,000.00	21,104,220.00	94.9%	1.0	1.0	100.0%	
KEMENTERIAN SOSIAL							
0270507 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							
2251 Jaminan Sosial Keluarga							
'001 Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat	3,136,325,000.00	3,111,004,500.00	99.2%	1.0	1.0	100.0%	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT							
0330507 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman							
2414 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan							
'004 Sistem Pengelolaan Air Limbah	8,360,000,000.00	7,660,000,000.00	91.6%	1000.0	916.0	91.6%	
2415 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							
'007 Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan	42,359,993,000.00	42,107,166,500.00	99.4%	70.0	69.3	99.0%	
'008 SPAM Berbasis Masyarakat	49,231,751,000.00	48,844,298,611.00	99.2%	70.0	69.3	99.0%	
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN							
0630106 Program Pengawasan Obat dan Makanan							
3165 Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM							
088 KIE Obat dan Makanan Aman	775,590,000.00	747,505,102.00	96.4%	30.0	30.0	100.0%	
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL							
0680106 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga							
3331 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi							
'081 Keluarga Yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	1,190,000,000.00	1,149,176,663.00	96.6%	8399.0	8399.0	100.0%	
'085 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR Dalam Edukasi Kespro dan Gizi Bagi Remaja Putri Sebagai Calon Ibu	1,819,507,000.00	1,701,044,300.00	93.5%	348.0	348.0	100.0%	
	114,971,075,000.00	113,284,236,096.00	99%	12,670.7	11,931.3	94.2%	

Belanja Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2019: Pendampingan, Koordinasi, dan Dukungan Teknis

Program/Kegiatan/Output	DIPA		%Real	Target	Output		Keterangan
	Pagu	Realisasi			Capaian	% Capaian	
KEMENTERIAN PERTANIAN							
0181114 *Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							
1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan							
'115 Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	230,000,000	193,590,000	84.2%	3	3	100.0%	
KEMENTERIAN KESEHATAN							
0240101 *Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							
Kementerian Kesehatan							
2038 Pengelolaan Data dan Informasi							
'963 Layanan Data dan Informasi	474,969,000	465,176,000	97.9%	2.0	2.0	100.0%	
0240306 *Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat							
5833 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
'001 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1,095,129,000	1,093,961,000	99.9%	7.679	7.679	100.0%	
0241210 *Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)							
2076 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
'501 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	119,915,000	100,458,000	83.8%	30	30	100.0%	
'505 Pelatihan Strategis Sumber Daya Manusia Kesehatan	3,438,897,000	3,328,570,752	96.8%	660	660	100.0%	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT							
0330507 *Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman							
2414 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan							
'003 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	1,501,825,000	1,141,789,770	76.0%	5	0	0.0%	
2415 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							
'003 Pembinaan dan Pengawasan SPAM	1,998,412,000	1,933,803,845	96.8%	32	0	0.0%	
BADAN PUSAT STATISTIK							
0540106 *Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik							
2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi							
'009 Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Masyarakat	5,266,716,000	5,232,786,317	99.4%	28	28	100.0%	
	14,452,707,000	13,816,975,684	96%	768.7	731.7	95.2%	

Lampiran 7 Realisasi dan Capaian Output DFDD Untuk Penanganan Stunting

Dana Desa: Capaian Output Bidang Pendidikan Dalam Rangka Penanganan Stunting

No	Output	Penyerapan (Rp)	Capaian Output Volume	Satuan
1	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	18,190,462,393	30,012,207	Paket
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa	1,097,512,316	168	Paket
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	240,174,447	361	Unit
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	1,299,144,030	138	Unit
5	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/APE PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	1,820,753,600	383	Unit
6	Tanah untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	76,486,400	736	M ²
7	Gedung/Bangunan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	19,813,967,611	1,312	Unit
8	Saran/Prasarana PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Lainnya	2,536,414,270	459	Unit
9	Buku dan Pelajaran PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	17,928,400	1,731	Unit
10	Mebelair PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	279,618,569	245	Unit
11	Alat Peraga Edukatif (APE)	364,287,500	172	Unit
12	Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	428,745,550	24	Unit
13	Gedung/Bangunan Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	5,728,868,164	50	Unit
14	Mebelair Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	220,305,600	17	Unit
15	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar	140,036,535	3	Unit
16	Terselenggaranya Operasional Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	395,253,000	414	Paket
Total		52,649,958,385		

Sumber : OM-SPAN

Dana Desa: Capaian Output Bidang Sanitasi Dalam Rangka Penanganan Stunting

No	Output	Penyerapan (Rp)	Capaian Output	
			Volume	Satuan
1	Pemeliharaan Sanitasi	551,059,200	3,632	Meter (M)
2	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	1,155,478,283	140	Unit
3	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	134,834,000	167	Unit
4	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	509,691,000	8,108	Meter (M)
5	Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	2,961,866,571	9,153	Meter (M)
6	Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	1,097,286,400	1,990	Meter (M)
7	Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	4,029,937,327	619	Unit
8	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	25,309,925,451	43,790,982	Unit
9	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	32,100,000	1	Unit
10	Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	321,027,465	298	Unit
11	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	15,168,937,572	61,197	Meter (M)
12	Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	3,210,125,150	14,748	Meter (M)
Total		54,482,268,419		

Sumber : OM-SPAN

Dana Desa: Capaian Output Bidang Air Minum Dalam Rangka Penanganan Stunting

No	Output	Penyerapan (Rp)	Capaian Output	
			Volume	Satuan
1	Pemeliharaan Sumur Serapan	35,000,000	2	Unit
2	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	3,045,002,073	69,000,575	Unit
3	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	2,054,016,750	25,630	Meter (M)
4	Sumur Resapan	2,633,154,049	86,949,151	Unit
5	Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	518,832,400	39	Unit
6	Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur	17,947,439,888	7,137	Unit
7	Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	2,663,819,958	234	Unit
8	Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	2,454,876,249	17,472	Meter (M)
9	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	6,502,447,841	119,418	Meter (M)
Total		37,854,589,208		

Sumber : OM-SPAN

Dana Desa: Capaian Output Bidang Kesehatan Dalam Rangka Penanganan Stunting

No	Output	Penyerapan (Rp)	Capaian Output Volume	Satuan
1	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya	17,775,549,385	38,813,703	Paket
2	Jumlah Peserta KB Kontrasepsi keluarga Miskin	12,400,000	50	Orang
3	Obat-obatan	634,658,899	169	Paket
4	Makanan Tambahan	2,286,358,553	4,733	Unit
5	Jumlah Lansia	436,322,956	495	Orang
6	Jumlah Ibu Hamil	51,111,488	94	Orang
7	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	848,173,898	964	Orang
8	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya	512,726,339	120	Paket
9	Ambulance	214,147,200	3	Unit
10	Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	53,537,200	71	Paket
11	Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2,600,000	2	Orang
12	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	195,697,942	100	Paket
13	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	800,829,723	72	Unit
14	Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya	1,670,089,118	105	Unit
15	Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD	987,473,184	245	Unit
16	Tanah Posyandu/Polindes/PKD	102,913,000	64	M ²
17	Gedung/Bangunan Posyandu/Polindes/PKD	16,123,623,020	381	Unit
18	Mebelair Posyandu/Polindes/PKD	486,466,500	1,154	Unit
Total		43,194,678,405		

Sumber : OM-SPAN

DAK Fisik: Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Bidang Perumahan dan Pemukiman

No	Kegiatan	Penyerapan (Rp)	Capaian Output Volume	Output Satuan
1	Bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya, termasuk upah tukang	18,426,820,000	3,913	Unit

Sumber: OM-SPAN

DAK Fisik: Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Bidang Sanitasi

No	Kegiatan	Penyerapan (Rp)	Capaian Output Volume	Output Satuan
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)	18,963,368,550	1154	Unit
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Perkotaan	5,326,000,000	1001	Unit
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	1,977,500,000	305	Unit
4	Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 25 KK	6,177,053,830	17	Unit
5	Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK	3,568,500,000	8	Unit
6	Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK	4,036,833,000	7	Unit
7	Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan Agama minimal 300 menetap	2,801,296,000	6	Unit
8	Pembangunan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan	1,306,648,000	3	Hektar
9	Pengadaan Truk Tinja	926,400,000	2	Unit
Total		45,083,599,380		

Sumber: OM-SPAN

DAK Fisik: Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Bidang Air Minum

No	Kegiatan	Penyerapan (Rp)	Capaian Output Volume	Output Satuan
1	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM	23,387,928,766	6,077.20	SR
2	Pengembangan jaringan perpipaan SPAM	6,905,415,800	2,745.60	SR
3	Peningkatan kapasitas SPAM/Uprating IPA SPAM	7,727,803,000	1,685.99	SR
4	Pembangunan BJP terlindungi dengan pilihan Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air (PMA)	7,534,182,000	762.00	SR
5	Pembangunan JP Pembangunan Broncaptering	4,480,524,105	578.51	SR
6	Pembangunan BJP terlindungi dengan pilihan Pembangunan Sumur Dangkal	4,521,812,000	474.00	SR
7	Pembangunan SPAM JP Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	763,157,000	112.00	SR
8	Pembangunan JP Pembangunan Sumur Bor	350,167,999	51.00	SR
Total		55,670,990,670		

Sumber: OM-SPAN

DAK Fisik: Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Bidang Kesehatan

No	Kegiatan	Penyerapan (Rp)	Capaian Output Volume Satuan
1	Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD	4,325,505,000.00	1,494 Paket
2	Pengadaan Obat Puskesmas	60,268,835,422.00	580 Paket
3	Penyediaan Alat Antropometri	1,390,899,990.00	434 Paket
4	Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD)	32,030,800,212.00	344 Paket
5	Pengadaan BKB Kit	1,817,878,000.00	334 Paket
6	Penyediaan Vaccine Carrier	2,787,482,638.00	264 Unit
7	Alat Kesehatan Instalasi Rawat Jalan	32,007,020,392.00	260 Paket
8	Alat Kesehatan Rawat Inap Kelas I, II, dan III	32,064,371,034.00	252 Paket
9	Pengadaan KIE Kit	1,391,766,000.00	248 Paket
10	Pengadaan Implant Removal Kit	1,068,955,000.00	240 Paket
11	Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas	61,036,764,006.00	232 Unit
12	Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB	2,868,340,000.00	226 Paket
13	Pengadaan Sepeda Motor PPLKB/KA. UPT dan PKB/ PLKB	4,319,415,000.00	204 Unit
14	Pengembangan Balai Penyuluhan KB	1,871,630,000.00	202 Unit
15	Penyediaan Set Ruang Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Imunisasi	8,300,544,799.00	143 Paket
16	Kendaraan Pusling Roda Dua	3,053,600,000.00	134 Unit
17	Pengadaan IUD Kit	784,600,000.00	128 Paket
18	Penyediaan Peralatan UKM (Pustu Set, PHN Kit, Imunisasi Kit, UKS Kit, UKGS Kit, Bidan Kit, Posyandu Kit, Kesling Kit)	6,596,317,334.00	84 Paket
19	Pengadaan Genre Kit	1,180,068,600.00	72 Paket
20	Penyediaan Vaccine Carrier Refrigerator	2,336,799,228.00	64 Unit
21	Pengadaan Tempat Penyimpanan kit/alat dan obat kontrasepsi	910,704,000.00	62 Unit
22	Alat Kesehatan Instalasi Pengelolaan Makanan (Gizi)	498,095,750.00	59 Paket
23	Cetakan Jamban	361,320,000.00	52 Buah
24	Alat Kesehatan Neonatal Intensive Care Unit (NICU)	13,842,076,932.00	52 Paket
25	Kit Sanitasi Lingkungan (Sanitarian Kit)	5,117,200,000.00	52 Paket
26	Pembangunan Balai Penyuluhan KB	6,307,278,724.00	50 Unit
27	Penyediaan obat gizi (Vitamin A Merah, Vitamin A Biru, Tablet Penambah Darah Ibu Hamil, Tablet Penambah Darah Remaja Putri dan Mineral MIX)	6,980,192,150.00	30 Paket
28	Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit	238,865,000.00	22 Paket
29	Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi	438,121,000.00	10 Unit
30	Pengadaan Mobil Pelayanan KB (Muyan)	5,222,560,000.00	6 Unit
31	Kit Kesehatan Lingkungan (Kesling Kit)	1,353,000,000.00	4 Paket
32	Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB (Mupen)	1,596,652,200.00	2 Unit
Total		302,771,006,211.00	

Sumber: OM-SPAN

DAK Fisik: Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Bidang Pendidikan

No	Kegiatan	Penyerapan (Rp)	Capaian Output Volume	Satuan
1	Pengadaan bahan perpustakaan	977,375,864.00	8,757	Buah
2	Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta sanitasinya	4,965,556,635.00	435	Unit
3	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya	29,359,454,689.00	288	Ruang
4	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	1,495,995,520.00	75	Paket
5	Pengadaan Buku Koleksi PAUD	693,896,857.00	71	Paket
6	Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	3,506,146,999.00	62	Ruang
7	Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya	5,539,364,500.00	42	Ruang
8	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2,220,000,000.00	37	Ruang
9	Pembangunan jamban beserta sanitasinya	975,800,000.00	27	Ruang
10	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	1,470,844,000.00	16	Ruang
11	Rehabilitasi toilet (jamban), beserta sanitasinya	207,000,000.00	7	Ruang
12	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	433,860,000.00	6	Unit
Total		51,845,295,064.00		

Sumber : OM-SPAN

Lampiran 8
Sektor Perekonomian Unggulan (Komparatif dan Kompetitif) per Kabupaten/Kota
Perspektif Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	Sektor Unggulan
Kota Baubau	(1) Pertanian (2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (3) Konstruksi (4) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6) Informasi dan Komunikasi (7) Jasa Keuangan dan Asuransi (8) Real Estate (9) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (10) Jasa Pendidikan (11) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Kota Kendari	(1) Industri Pengolahan (2) Pengadaan Listrik dan Gas (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (4) Jasa Keuangan dan Asuransi (5) Jasa Perusahaan (6) Jasa Pendidikan (7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8) Jasa lainnya
Kabupaten Bombana	-
Kabupaten Buton Selatan	(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Kabupaten Buton Tengah	(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (3) Real Estate
Kabupaten Buton	(1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Kabupaten Buton Utara	(1) Real Estate (2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (3) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Kabupaten Kolaka	(1) Pertambangan dan Penggalan (2) Industri Pengolahan
Kabupaten Kolaka Timur	(1) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Kabupaten Kolaka Utara	(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (3) Konstruksi (4) Jasa lainnya

Kabupaten/Kota	Sektor Unggulan
Kabupaten Konawe	(1) Industri Pengolahan (2) Real Estate
Kabupaten Konawe Kepulauan	(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Kabupaten Konawe Selatan	(1) Pertambangan dan Penggalian (2) Transportasi dan Pergudangan
Kabupaten Konawe Utara	(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Konstruksi (3) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Kabupaten Muna Barat	(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Konstruksi (3) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (4) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Kabupaten Muna	(1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (3) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (4) Jasa Pendidikan (5) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6) Jasa lainnya
Kabupaten Wakatobi	(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (4) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (5) Real Estate (6) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (7) Jasa Pendidikan (8) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (9) Jasa lainnya

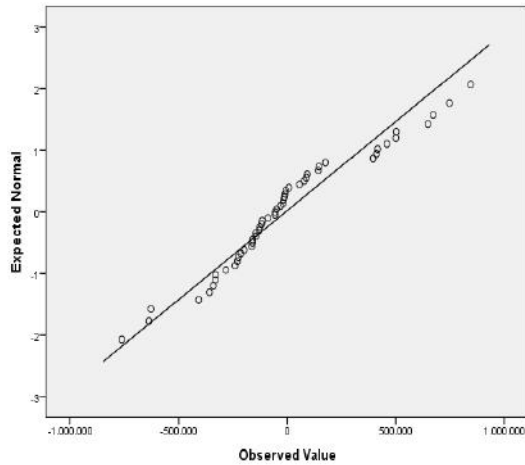
Sumber Data: BPS (diolah)

Lampiran 9

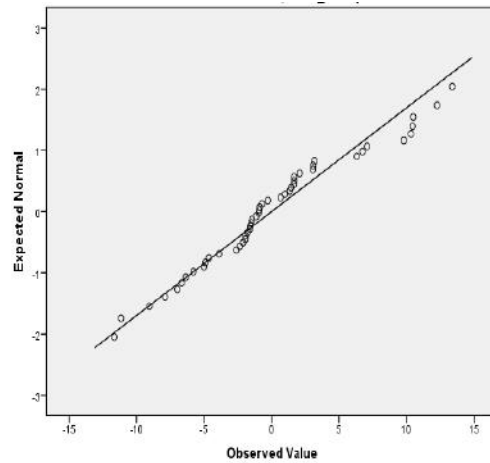
Pengujian asumsi pada analisis Two Stage Least Square (2SLS)

- Asumsi normalitas menggunakan Q-Q Plot

Persamaan 1



Persamaan 2



- Asumsi autokorelasi dengan Run Test

Persamaan 1

Test Value ^a	-56414,75742
Cases < Test Value	25
Cases >= Test Value	26
Total Cases	51
Number of Runs	22
Z	-1,271
Asymp. Sig. (2-tailed)	,204

a. Median

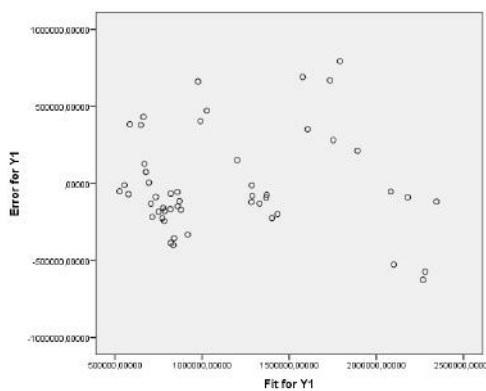
Persamaan 2

Test Value ^a	-,92425
Cases < Test Value	24
Cases >= Test Value	24
Total Cases	48
Number of Runs	26
Z	,146
Asymp. Sig. (2-tailed)	,884

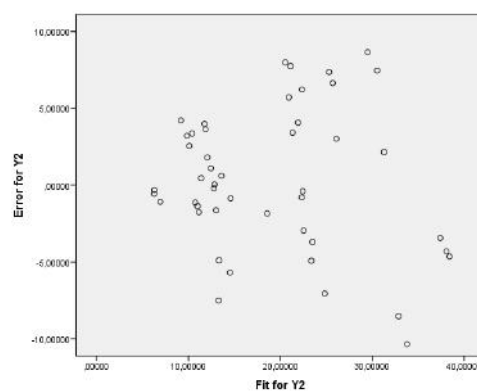
a. Median

- Asumsi Heteroskedastisitas dengan plot *predicted value* dan *residual*

Persamaan 1



Persamaan 2



- Asumsi Multikolinearitas
Persamaan 1

Correlations

		Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Jumlah Debitur (Jiwa)	DAK Fisik Bidang Pertanian (Juta Rupiah)	DAK Fisik Bidang Irigasi (Juta Rupiah)	DAK Fisik Jalan (Juta Rupiah)
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Pearson Correlation	1	,583**	,355*	,191	,155
	Sig. (2-tailed)		,000	,011	,180	,279
	N	51	51	51	51	51
Jumlah Debitur (Jiwa)	Pearson Correlation	,583**	1	,002	,164	-,065
	Sig. (2-tailed)	,000		,992	,249	,650
	N	51	51	51	51	51
DAK Fisik Bidang Pertanian (Juta Rupiah)	Pearson Correlation	,355*	,002	1	-,128	-,126
	Sig. (2-tailed)	,011	,992		,370	,378
	N	51	51	51	51	51
DAK Fisik Bidang Irigasi (Juta Rupiah)	Pearson Correlation	,191	,164	-,128	1	,353*
	Sig. (2-tailed)	,180	,249	,370		,011
	N	51	51	51	51	51
DAK Fisik Jalan (Juta Rupiah)	Pearson Correlation	,155	-,065	-,126	,353*	1
	Sig. (2-tailed)	,279	,650	,378	,011	
	N	51	51	51	51	51

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Persamaan 2

Correlations

		PDRB Pertanian (Juta Rupiah)	Angka Melek Huruf (Persentase)	Populasi (Jiwa)
PDRB Pertanian (Juta Rupiah)	Pearson Correlation	1	,269	,685**
	Sig. (2-tailed)		,064	,000
	N	51	48	51
Angka Melek Huruf (Persentase)	Pearson Correlation	,269	1	,278
	Sig. (2-tailed)	,064		,056
	N	48	48	48
Populasi (Jiwa)	Pearson Correlation	,685**	,278	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,056	
	N	51	48	51

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

JALAN MAYJEN SUTOYO NOMOR 34 KENDARI 93122
TELEPON (0401) 3127191; FAKSIMILI (0401) 3127119; SUREL: KANWILDJPB.SULTRA@KEMENKEU.GO.ID
LAMAM: WWW.DJPBN.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/SULTRA

NOTA DINAS
NOMOR ND-140/WPB.28/2020

Yth : Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Tahun 2019 Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara
Tanggal : 28 Februari 2020

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bersama ini dengan hormat disampaikan Kajian Fiskal Regional Tahun 2019 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik
Sugeng Winarno

